

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 8
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj.IP ini merupakan salah satu bentuk / media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pacitan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2015, dan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 diatas, Inpektorat Kabupaten Pacitan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja ini sehingga diharapkan laporan ini dapat menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini diharapkan dapat terwujud optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten



Pacitan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja utamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pacitan, Maret 2016

PJ. BUPATI PACITAN

Dr. Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT

Jl. A. Yani No. 65 A Pacitan, Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881164 Fax. 884879

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pacitan, 24 Maret 2016

Inspektur Kabupaten Pacitan


Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 199003 2 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Dalam rangka mencukupi kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKj.IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pelaksanaan RPJMD.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.



Matrik sasaran strategik yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah 19 (Sembilan belas) sasaran strategik dari 9 (sembilan) tujuan strategik atas 6 (enam) misi untuk mencapai visi.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2015 sebesar 111,96%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “SANGAT BAIK”. Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,93%

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.551.444.192.752,00 dan Realisasi sebesar Rp. 1.408.458.278.765,44 atau 90,78% dari anggaran.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategik tersebut terutama disebabkan karena :

- Pemahaman dan komitmen berbagai lapisan dan komponen masyarakat serta aparatur yang relatif belum merata mengenai berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
- Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif yang mempengaruhi sendi – sendi perekonomian dan pembangunan daerah.

Peningkatan dan perbaikan kinerja akan terus dilakukan dengan cara meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk :

- Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.



- Koordinasi, informasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing – masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan pemerintah kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- Meningkatkan peran serta lembaga – lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sehingga kegiatan pembangunan akan mampu menumbuhkembangkan kreativitas dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mandiri, maju dan semakin sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Surat Pernyataan Reviu	iii	
Ikhtisar Eksekutif	iv	
Daftar Isi	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud Dan Tujuan	3
	C. Dasar Hukum	4
	D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan	6
	E. Struktur Organisasi	16
	F. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015	21
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	22
	KABUPATEN PACITAN 2011-2016	
	A. Visi	24
	B. Misi	25
	C. Rencana Strategis	29
	D. Rencana Kinerja	30
	E. Perjanjian Kinerja	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	33
	A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015	33
	B. Akuntabilitas Keuangan	182
BAB IV	PENUTUP	211
LAMPIRAN		
	1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan	
	2. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015	
	3. Penetapan Kinerja Tahun 2015	
	4. Pengukuran Kinerja Tahun 2015	
	5. Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2015	
	6. Daftar Penghargaan (Hasil Capaian Kinerja) Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan



untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LKj.IP Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana telah dirangkum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan dan penetapan/perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKj.IP Kabupaten Pacitan menjadi laporan kemajuan



penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj.IP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015 yaitu tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 kepada seluruh *stakeholders*.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2015;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang;



- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan



- Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2016 ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
 22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;



24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

D.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat Daya Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di antara $07^{\circ} 55'$ - $08^{\circ} 17'$ Lintang Selatan $110^{\circ} 55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha, yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu luas 71,86 Km².



Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

➤ Tanah ladang	: 21,36% atau 29.690,58	Ha
➤ Pemukiman Penduduk	: 4,43% atau 6.157,33	Ha
➤ Hutan	: 57,13% atau 79.397,00	Ha
➤ Sawah	: 9,00% atau 12.509,26	Ha
➤ Pesisir dan tanah kosong	: 8,08% atau 11.232,99	Ha



1. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Usia (tahun)	Tahun 2015					
	L	%	P	%	Jumlah	%
0 – 4	10,113	3,47	9,694	3,39	19,807	3,43
5 – 9	19,878	6,83	18,703	6,53	38,581	6,68
10 – 14	19,973	6,86	18,733	6,54	38,706	6,70
0-14	49,964	17,16	47,13	16,46	97,094	16,82
15 – 19	19,233	6,61	17,884	6,25	37,117	6,43
20 – 24	22,216	7,63	20,38	7,12	42,596	7,38
25 – 29	21,066	7,24	20,148	7,04	41,214	7,14
30 – 34	23,016	7,91	21,822	7,62	44,838	7,77
35 – 39	19,852	6,82	19,037	6,65	38,889	6,74
40 – 44	20,812	7,15	21,652	7,56	42,464	7,35
45 – 49	23,024	7,91	23,213	8,11	46,237	8,01
50 – 54	21,424	7,36	22,105	7,72	43,529	7,54
55 – 59	19,141	6,58	19,831	6,93	38,972	6,75
60 – 64	15,632	5,37	14,821	5,18	30,453	5,27
15-64	205,416	70,57	200,893	70,17	406,309	70,37
65 ke atas	35,713	12,27	38,259	13,36	73,972	12,81
Jumlah	291,093	100,00	286,282	100,00	577,375	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2015 mencapai 577.375 jiwa terdiri atas 291.093 jiwa penduduk laki – laki dan 286.282 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 406.309 jiwa atau mencapai 70,37% total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya



mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat)..

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Pertanian/ Perkebunan	209.918	36,36
2	Perikanan / Kelautan	1.481	0,26
3	Pertambangan/ Industri	1.915	0,33
4	Perdagangan	91.201	15,80
5	Angkutan/ Transportasi	2.021	0,35
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	87.586	15,17
7	Jasa – jasa	6.002	1,04
8	Pemerintahan	12.427	2,15
9	Kesehatan	1.579	0,27
10	Pendidikan	8.452	1,46
11	Keagamaan	440	0,08
12	Lain - lain	154.353	26,73
	- Pensiunan	4.409	0,76
	- Belum/tdk bekerja	17.423	3,02
	- Mengurus rumah tangga	85.649	14,83
	- Pelajar mahasiswa	46.872	8,12
		577.375	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 36,36%. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat



ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	141.799	24,56
2	Tamat SD	232.896	40,34
3	Tamat SLTP	109.210	18,91
4	Tamat SLTA/ sederajat	73.568	12,74
5	Tamat D1/D2	2.965	0,51
6	Tamat D3/ Akademi	2.192	0,38
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	14.745	2,55
Jumlah		577.375	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

2. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi Tahun 2015 sebagai berikut :

1. **Pertanian**, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam / keprok;
2. **Tanaman perkebunan**, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, panili, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur, janggolan, aren, kapas, jarak pagar, nilam;
3. **Ternak**, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok;
4. **Kehutanan**, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono dan bambu;
5. **Energi dan Sumber Daya Mineral**, terdiri dari :
 - a. **Batubara**
 - b. **Mineral logam** : timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, batu besi



- c. **Mineral bukan logam** : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/ agate, kristal kuarsa, rijang, jasper
- d. **Batuan** : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/ tanah liat
6. Pariwisata, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Srau	Desa candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Kali Wuluh	Desa Klesem, Kec. Kebonagung	20 Km
		Pantai Soge	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	28 Km
		Pantai Pidakan	Desa Jetak, Kec. Tulakan	25 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

7. Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tabel berikut :

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari : Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila



8. Perdagangan, sebagaimana tabel berikut :

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

9. Perindustrian, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Potensi Perindustrian di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi/ Pendapatan Domestik Regional Brutto Kabupaten Pacitan tahun 2015, disajikan pada tabel berikut :

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2015

NO	URAIAN	TAHUN	
		2014*	2015**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,91
2	PDRB ADHK (juta Rp.)	8.577.576	9.017.620
3	PDRB ADHB (juta Rp.)	10.498.617	11.418.922
4	Penduduk Miskin (%)	15,74	15,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,05	1,07
6	Laju Inflasi (dari harga konsumen) (%)	7,64	3,45



NO	URAIAN	TAHUN	
		2014*	2015**
7	Pendapatan per kapita (rupiah)	19.106,42	21.200,65
8	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,80	70,75
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,06	7,27
10	Angka Melek Huruf P15 Tahun + (%)	92,69	92,83
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,68	74,08

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

*) = Angka diperbaiki

***) = Angka Proyeksi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 5,91% sedangkan tahun 2014 mencapai 5,21%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas politik serta peluang sektor ekonomi ke arah positif.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2014 jumlah PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga *berlaku* mencapai Rp. 10.498,61 milyar dan meningkat menjadi Rp. 11.418,92 milyar pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 8,06%. Sedangkan PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga *konstan* tahun 2014 mencapai Rp. 8.577,57 milyar dan meningkat menjadi Rp. 9.017,62 milyar pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 4,88%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2014 mencapai 5,21% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2015 mencapai 5,91%, hal tersebut dikarenakan agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif.

Jumlah penduduk miskin dengan kondisi tahun 2014 sejumlah 15,74% dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2015 mencapai 15,31% atau mengalami penurunan sebesar 0,43%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2014 mencapai 1,05% dan meningkat pada tahun 2015 mencapai 1,07%, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pihak swasta yang mengurangi jumlah pekerja (PHK) sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat pacitan kehilangan mata pencaharian.



Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebesar 7,64%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 3,45% atau mengalami penurunan sebesar 4,19%.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2014 mencapai Rp. 19.106,42 dan meningkat menjadi Rp. 21.200,65 pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 9,8%.

Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 mencapai 71.80 dan turun menjadi 70,75 pada Tahun 2015.

Angka rata - rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 mencapai 7,06 dan meningkat menjadi 7,27 pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,21.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 mencapai 92,69 dan meningkat menjadi 92,83 pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,14.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2014 mencapai 73,68 dan meningkat menjadi 74,08 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,04 .

➤ PDRB ADHK

PDRB ADHK merupakan pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK tahun 2014 mencapai Rp. 8.577.576.000.000 meningkat pada tahun 2015 mencapai Rp. 9.017.620.850.000 adapun perkembangan PDRB ADHK tahun 2014-2015 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel PDRB ADHK Kabupaten Pacitan
Tahun 2014 - 2015 (dalam juta)**

NO	SEKTOR	2014*	%	2015**	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.392.241,20	27,89	2.481.869,08	27,52
2	Pertambangan dan Penggalian	516.399,10	6,02	531.291,70	5,89
3	Industri Pengolahan	590.005,40	6,88	611.767,50	6,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.424,20	0,04	3.600,15	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.072,40	0,09	8.529,75	0,09
6	Konstruksi	1.239.596,90	14,45	1.310.048,55	14,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.456.620,10	16,98	1.554.621,10	17,24
8	Transportasi dan Pergudangan	195.994,10	2,28	210.248,20	2,33



NO	SEKTOR	2014*	%	2015**	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167.569,00	1,95	180.356,55	2,00
10	Informasi dan Komunikasi	544.065,40	6,34	581.095,33	6,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	161.881,30	1,89	174.830,28	1,94
12	Real Estate	143.474,20	1,67	152.326,35	1,69
13	Jasa Perusahaan	23.904,60	0,28	25.069,28	0,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	386.725,60	4,51	394.281,80	4,37
15	Jasa Pendidikan	420.610,50	4,90	450.583,43	5,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83.109,90	0,97	90.370,58	1,00
17	Jasa Lainnya	243.882,10	2,84	256.731,25	2,85
	JUMLAH	8.577.576,00	100,00	9.017.620,85	100,00

Ket : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHK Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 27,52%; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,24%; Bangunan/ konstruksi 14,53%; Industri Pengolahan 6,78%; Informasi dan Komunikasi 6,44%; Pertambangan dan Penggalian 5,89%; Jasa Pendidikan 5,00%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,37%; Jasa Lainnya 2,85%; Transportasi dan Pergudangan 2,33%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,00%; Jasa Keuangan dan Asuransi 1,94%; Real Estate 1,69%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,00%; Jasa Perusahaan 0,28%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,04%.

➤ PDRB ADHB

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun capaian PDRB ADHB masing masing sektor di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 - 2015 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel PDRB ADHB Kabupaten Pacitan
Tahun 2014 - 2015 (dalam juta)**

NO	SEKTOR	2014 *	%	2015 **	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.205.937,20	30,54	3.498.989,08	30,64
2	Pertambangan dan Penggalian	619.434,50	5,90	660.085,95	5,78



NO	SEKTOR	2014 *	%	2015 **	%
3	Industri Pengolahan	703.833,80	6,70	754.053,00	6,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.001,80	0,03	3.072,15	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.586,40	0,09	10.422,25	0,09
6	Konstruksi	1.587.605,70	15,12	1.745.059,55	15,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.669.333,70	15,90	1.820.513,10	15,94
8	Transportasi dan Pergudangan	217.275,00	2,07	236.849,33	2,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200.978,50	1,91	222.118,43	1,95
10	Informasi dan Komunikasi	563.524,00	5,37	605.418,58	5,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	202.167,00	1,93	225.187,40	1,97
12	Real Estate	160.161,30	1,53	173.185,23	1,52
13	Jasa Perusahaan	27.689,10	0,26	29.799,90	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446.622,90	4,25	469.153,43	4,11
15	Jasa Pendidikan	509.039,70	4,85	561.119,93	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.619,70	0,91	106.007,83	0,93
17	Jasa Lainnya	276.807,00	2,64	297.887,38	2,61
	JUMLAH	10.498.617,30	100,00	11.418.922,48	100,00

Ket : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHB Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 30,64%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,94%; Konstruksi 15,28%; Industri Pengolahan 6,60%; Pertambangan dan Penggalian 5,78%; Informasi dan Komunikasi 5,30%; dan Jasa Pendidikan 4,91%.

E. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,



Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan

E.1. Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.



Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten terdiri dari :
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

E.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Kerjasama dan Perbatasan;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

E.1.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- d. Bagian Pengolah Data Elektronik.

E.1.3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.

E.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta



mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

E.3. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012). Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari 14 Dinas Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 4) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- 6) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E.4. Lembaga Teknis Daerah

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.



Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012), ada 14 lembaga teknis daerah yaitu :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
- 8) Inspektorat;
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 10) Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- 11) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 12) Kantor Lingkungan Hidup;
- 13) Kantor Ketahanan Pangan;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada bulan Desember 2010 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

Sehingga secara keseluruhan terdapat 15 lembaga teknis daerah, 14 dinas daerah dan 2 sekretariat sehingga total ada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pacitan.

E.5. Kecamatan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam wilayah kecamatan. Di Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan, yaitu :



- 1) Kecamatan Pacitan
- 2) Kecamatan Arjosari
- 3) Kecamatan Tegalombo
- 4) Kecamatan Nawangan
- 5) Kecamatan Bandar
- 6) Kecamatan Pringkuku
- 7) Kecamatan Punung
- 8) Kecamatan Donorojo
- 9) Kecamatan Kebonagung
- 10) Kecamatan Tulakan
- 11) Kecamatan Ngadirojo
- 12) Kecamatan Sudimoro

E.6. Kelurahan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Pacitan terdapat 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1) Pacitan,
- 2) Pucangsewu,
- 3) Sidoharjo,
- 4) Ploso,
- 5) Baleharjo.

F. Sistematika LAKIP Tahun 2015

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2016. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor



yang menyebabkan kinerja (*performance*) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sistematika penulisan yang dipakai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika LKj.IP Tahun 2015

BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

- A. Visi
- B. Misi
- C. Rencana Strategis
- D. Rencana Kinerja
- E. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- B. Realisasi Keuangan Tahun 2015

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Pemerintah Kabupaten Pacitan. Kewajiban menyusun perencanaan strategik diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dokumen perencanaan strategik Kabupaten Pacitan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 telah mengalami revisi / perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, perubahan tersebut merupakan hasil dari evaluasi terhadap capaian kinerja melalui hasil analisis dan rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pacitan serta dalam upaya mengakomodir regulasi-regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Minimal pada beberapa bidang dan urusan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh pemerintah daerah pada khususnya sehingga perubahan perencanaan jangka menengah pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan baik indikator maupun target-target yang akan dicapai, perubahan perencanaan jangka menengah tersebut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan serta penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut otomatis Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Pacitan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan



RPJDM dimaksud, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA ”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pacitan secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

“MASYARAKAT PACITAN” : adalah sekelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Pacitan dalam satu komunitas yang teratur

“SEJAHTERA” : adalah tatanan kehidupan masyarakat Pacitan yang terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi antara lain ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan daya beli masyarakat, hal tersebut selaras visi RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur



Kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pemerintah Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi "**Terwujudnya Masyarakat Pacitan Sejahtera**", maka ditetapkan misi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat ;
4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;
5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar



6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Makna dari misi tersebut adalah :

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak dasar rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas prestasi anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar.

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, komponen standar hidup layak diukur dengan indikator PDRB per kapita riil yang telah disesuaikan. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah sementara ketidakstabilan perekonomian daerah



akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah kabupaten ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Perkembangan perekonomian daerah diukur dengan menggunakan tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini dapat digunakan untuk mengukur intensitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan.

Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang atau jasa berupa jalan, jembatan, pasar, informasi dan telekomunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur irigasi sebagai penunjang produksi pertanian, penyediaan air bersih maupun listrik guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Misi ini dimaksudkan untuk membangun karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan tersebut maka disusunlah peta keterkaitan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:



Tabel. II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pacitan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA		
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
	2. Tercapainya SPM daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase SPM yang mencapai target
	3. Terselenggaranya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	<ul style="list-style-type: none"> • Opini audit: WTP (wajar tanpa pengecualian)
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1. Terwujudnya perilaku hidup sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penduduk yang menggunakan jamban • Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	2. Terciptanya lingkungan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU • Skor evaluasi adipura
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Usia harapan hidup
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Mempermudah akses pendidikan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	<p>Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - SD/MI • - SMP/MTs
	2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Angka rata-rata lama sekolah
2. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka melek huruf • Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif
	2. Ketersediaan pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan cadangan pangan
	3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase koperasi aktif • Jumlah UMKM
	4. Pemasaran komoditas daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Omset penjualan komoditas unggulan



MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik <ul style="list-style-type: none"> - Jalan - jembatan • jumlah terminal bis/sub terminal • jumlah rumah tangga pengguna listrik
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kriminalitas yang ditangani • Indeks pembangunan manusia (IPM)
	2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar • Persentase kader bina ketahanan keluarga

C. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) didasari asumsi – asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun aransemen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan di dalam Dokumen Renstra (RPJMD) selengkapnya dituangkan dalam formulir perencanaan strategik (Lampiran I : Form RS / Rencana Strategis)



D.RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015 perencanaannya berdasarkan Perubahan RPJMD 2011 - 2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016). Program - program yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang telah ditetapkan dalam:

1. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015; dan
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;

Peraturan Bupati tentang RKPD dan perubahannya tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2015 mencakup 154 program dan 892 kegiatan, dengan rincian Urusan Wajib 102 program dan 755 kegiatan sedangkan untuk Urusan Pilihan sebanyak 52 program dan 137 kegiatan.

Perencanaan kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2015 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja (**Lampiran II : Rencana Kinerja Tahun 2015**)



E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari Musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD yang disahkan menjadi Peraturan Daerah

Dokumen penetapan kinerja tersebut disusun setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Di tingkat SKPD dokumen penetapan kinerja disusun oleh Kepala SKPD paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diserahkan untuk dilaksanakan, yang berisi janji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), di tingkat Kabupaten dokumen penetapan kinerja disusun oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2015 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja (**Lampiran III : Penetapan Kinerja Tahun 2015**)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pacitan melaksanakan kewajiban menyusun akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2015 maupun RKPd Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016.



Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, serta membandingkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: a). Nilai 85 s.d \geq 100 kategori Sangat Baik; Nilai 75 s.d < 85 kategori Baik; Nilai 65 s.d < 75 kategori Cukup Baik; Nilai 50 s.d < 65 kategori Sedang; dan Nilai 0 s.d < 50 kategori Kurang.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2015 sebesar 111,96%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori "SANGAT BAIK". Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,93% melambatnya kenaikan capaian ini dikarenakan terdapat perubahan jumlah indikator serta perubahan target akibat penyesuaian sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan yang dikarenakan realisasi pada RPJMD induk telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015**

NO.	SASARAN	CAPAIAN KINERJA				2015	
		2011	2012	2013	2014	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis	91,15	105,59	88,61	96,56	98,52	Sangat Baik
2	Tercapainya SPM Daerah	93,31	76,63	107,34	94,01	94,01	Sangat Baik



NO.	SASARAN	CAPAIAN KINERJA				2015	
		2011	2012	2013	2014	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	104,16	109,66	103,18	125,51	100,00	Sangat Baik
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	90	98,37	105,91	100,00	n.a	-
5	Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat	96,53	92,09	103,96	105,94	103,73	Sangat Baik
6	Terciptanya Lingkungan Sehat	103,86	113,92	113,35	98,11	97,97	Sangat Baik
7	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	98,66	114,24	111,82	100,00	98,26	Sangat Baik
8	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan	101,53	105,92	103,25	126,19	95,35	Sangat Baik
9	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan	101,93	105,96	99,23	100,00	100,00	Sangat Baik
10	Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau	100,51	97,44	95,80	100,28	102,68	Sangat Baik
11	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	101,27	106,39	131,25	100,17	100,36	Sangat Baik
12	Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah	117,00	179,34	185,54	100,00	200	Sangat Baik
13	Ketersediaan Pangan Daerah	94,24	130,55	115,01	128,60	144,44	Sangat Baik
14	Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing	115,20	121,47	157,23	99,18	99,74	Sangat Baik
15	Pemasaran Komoditas Daerah	144,81	170,49	123,44	115,63	117,52	Sangat Baik
16	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian	94,47	113,62	106,53	103,21	104,92	Sangat Baik
17	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar	107,16	128,00	119,94	152,90	152,69	Sangat Baik
18	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai	96,26	100,03	116,25	126,5	92,60	Sangat Baik
19	Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat	108,77	108,46	111,23	98,63	112,41	Sangat Baik
JUMLAH / RATA-RATA		103,20	114,64	115,73	109,02	111,96	SANGAT BAIK

1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN



Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis” diarahkan untuk menciptakan aparatur yang profesional serta meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis” yang capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut :

Tabel Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	5,24	6,69	6,52	6,60	6,75	6,65	98,52

Target aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dari target sebesar 6,75% dapat terealisasi 6,65% dengan capaian sebesar 98,52%. Apabila dilihat dari capaian maka indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 termasuk kategori “Sangat baik” (98,52%).

Dalam menciptakan profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dengan hasil sebagai berikut:

- Capaian Kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya pada awal periode tahun 2011 mencapai 5,24% mengalami peningkatan sehingga setiap tahunnya selalu tercapai targetnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 6,65% dari target akhir tahun 2015 sebesar 6.75 %.



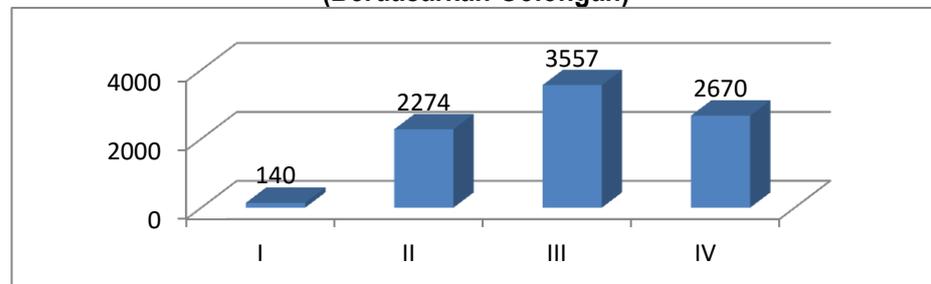
Capaian kinerja ini pada akhir tahun 2015 dengan dukungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Struktural
- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi

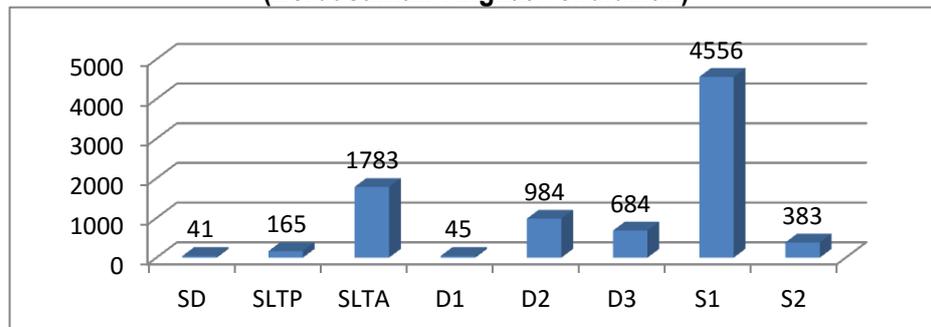
Capaian Kinerja RPJMD Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya apabila dibandingkan dengan target mencapai 98,52 %.

Berikut disajikan database kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2015

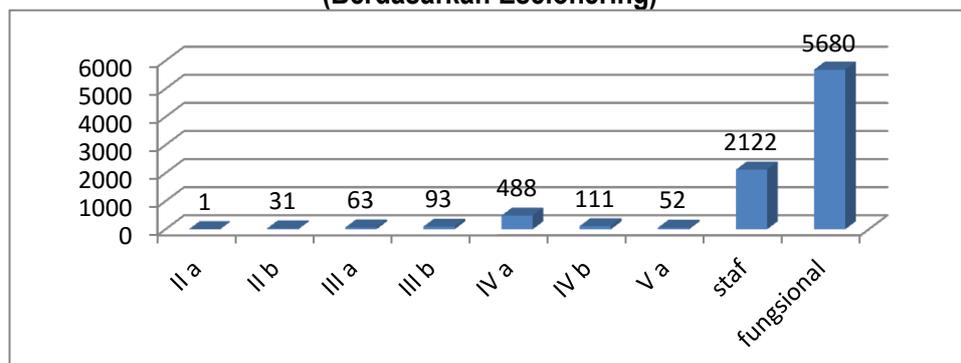
**Grafik Data PNS Kabupaten Pacitan Tahun 2015
(Berdasarkan Golongan)**



**Grafik Data PNS Kabupaten Pacitan Tahun 2015
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)**



**Grafik Data PNS Kabupaten Pacitan Tahun 2015
(Berdasarkan Eselonering)**





Tabel Database Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN						SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015*	
1	Kasus pelanggaran disiplin	Kasus	9	14	18	15	7	7	BKD
2	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat							600	
	1. Diklat Struktural								
	A. Diklat Pim II	Orang	1	2	4	6	1	1	BKD
	B. Diklat Pim III	Orang	32	40	0	1	4	-	BKD / Kantor Diklat
	C. Diklat Pim IV	Orang	32	80	160	-	30	30	BKD / Kantor Diklat
	2. Diklat Fungsional	Orang	24	24	27	-	58	0	BKD / Kantor Diklat
	3. Diklat Teknis	Orang	100	180	45	59	294	27	BKD / Kantor Diklat
3	∑ pegawai yang dikirim mengikuti diklat Struktural	Orang	3	3	4	6	5	1	BKD
	∑ seluruh pegawai yg seharusnya mengikuti diklat struktural	Orang	6	784	730	822	798	832	BKD
4	∑ pegawai yang dikirim mengikuti diklat Fungsional	Orang	50	46	45	-	50	41	BKD
	∑ seluruh pegawai yg seharusnya mengikuti diklat Fungsional	Orang	50	68	75	5.960	5.697	5.662	BKD
5	∑ pegawai yang dikirim mengikuti diklat Teknis / Fungsi	Orang	60	114	27	59	50	41	BKD
	∑ seluruh pegawai yg seharusnya mengikuti diklat Teknis/Fungsi	Orang	60	114	75	6.782	5.697	5.792	BKD
6	∑ pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi	Orang	564	388	338	329	594	600	BKD
	Jumlah seluruh pejabat struktural	Orang	778	784	730	822	813	832	BKD
7	∑ pejabat Fungsional yang memenuhi standar kompetensi	Orang	6.460	6.448	2.109	5.941	5.697	5792	BKD
	Jumlah seluruh pejabat Fungsional	Orang	6.460	6.448	1.150	5.941	5.697	5792	BKD
8	Jumlah dokumen kepegawaian yang terbit tepat waktu	Dokumen	3.168	7.100	9.565	10.359	10.610	7855	BKD
	Jumlah seluruh dokumen kepegawaian yang diterbitkan	Dokumen	3.752	7.159	10.553	11.374	14.178	11.374	BKD
9	Jml. PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman tahun yang bersangkutan	Orang	11	14	18	15	7	7	BKD
10	Jumlah PNS		9.553	9.626	9.240	8.908	8.620	8.641	BKD
	- Gol IV	Orang	3.190	3.312	3.165	2.980	2.795	2670	BKD
	- Gol III	Orang	3.712	3.504	3.368	3.295	3.266	3.557	BKD
	- Gol II	Orang	2.391	2.548	2.493	2.447	2.390	2.274	BKD
	- Gol I	Orang	260	262	214	186	169	140	BKD
16	Jumlah Pegawai Kontrak (SPK)	Orang	102	69	48	60	47	59	BKD

Sedangkan untuk mendukung administrasi kepegawaian pemerintah kabupaten pacitan menerapkan sistem manajemen kepegawaian untuk memudahkan aparatur sipil negara dalam mengakses informasi kepegawaian dan memudahkan pengelola kepegawaian unruk me-manage data kepegawaian aparatur sipil negara. Sistem informasi manajemen itu antara lain:



1. Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang mengolah data kepegawaian PNS, masih bersifat offline dan dengan akses terbatas hanya untuk pengelola data kepegawaian,
2. Sistem Informasi Kepegawaian, mengolah data pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sistem ini sudah berjalan secara online dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Sistem Informasi E-Dokumen, mengolah data Arsip PNS secara Elektronik, sistem ini bersifat offline dan hanya bisa diakses secara terbatas

Guna meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat umum yang menginginkan informasi atau konsultasi langsung terkait masalah kepegawaian, badan kepegawaian daerah kabupaten pacitan menyediakan sarana khusus yaitu Pusat Pelayanan Informasi Kepegawaian Satu Pintu, yang merupakan front office dan pusat informasi bagi seluruh pelayanan terkait masalah kepegawaian. Dengan keberadaan pusat informasi ini diharapkan pengelolaan kepegawaian akan lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran I tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, antara lain:

Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 1

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.773.058.000	2.512.674.250	90,61	260.383.750
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.789.334.999	48.167.703.684	96,74	1.621.631.315
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.980.000.000	1.810.628.245	91,45	169.371.755
JUMLAH		54.542.392.999	52.491.006.179	96,24	2.051.386.820

Dari tabel capaian kinerja sasaran 1 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2015 mencapai 98,52% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 1 yang pada tahun 2015 mencapai 96,24%.



SASARAN STRATEGIS 2

Tercapainya SPM Daerah

Sasaran “Tercapainya SPM Daerah” diarahkan untuk mewujudkan tercapainya pencapaian SPM daerah sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang bermutu kepada masyarakat.

Kinerja sasaran “Tercapainya SPM Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Prosentase SPM yang mencapai target	43,3	71,7	70,51	70,51	80,00	70,51	94,01

Indikator SKPD yang mencapai target SPM, dari target sebesar 80% pada tahun 2015 masih tercapai 70,51% atau sama dengan capaian pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena terlambatnya SKPD dalam menginput data capaian SPM, sehingga belum dapat dilaksanakan evaluasi dan pemantauan pencapaian pelaksanaan SPM.

Sedangkan progres pencapaian sasaran “Tercapainya SPM Daerah” selama tahun 2015 secara ringkas diuraikan berikut ini.

- Pencapaian Prosentase SPM yang mencapai target didukung oleh beberapa faktor pendukung antara lain pelaksanaan 15 jenis SPM merupakan hal yang wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota maka Pemerintah Kabupaten Pacitan segera menindaklanjuti dengan melaksanakannya. 15 SPM yang diterapkan antara lain:
 1. SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah;
 2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 3. SPM Bidang Sosial;
 4. SPM Bidang Kesehatan;
 5. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;



6. SPM Lingkungan Hidup;
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. SPM Bidang Pendidikan Dasar;
9. SPM Bidang Ketenagakerjaan;
10. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. SPM Bidang Ketahanan Pangan ;
12. SPM Bidang Kesenian;
13. SPM Bidang Kominfo;
14. SPM Bidang Perhubungan.
15. SPM Bidang Penanaman Modal

SKPD yang menerapkan SPM pada tahun 2014 sebanyak 15 SKPD ditambah 1 BUMD dari target yang ditetapkan sebanyak 13 SKPD. Sehingga capaiannya lebih dari 100%. SKPD/ BUMD yang menerapkan SPM pada tahun 2014 antara lain:

1. Dinas Cipta kaya, Tata Ruang dan Kebersihan, melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan SPM Bidang Sosial dan SPM Bidang Ketenagakerjaan
5. Dinas Kesehatan, melaksanakan SPM Bidang Kesehatan;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Kantor Lingkungan Hidup, melaksanakan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
8. Dinas Pendidikan, melaksanakan SPM Bidang Pendidikan Dasar;
9. Dinas Bina Marga dan Pengairan, melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal;
11. Kantor Ketahanan Pangan, melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan;



12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, melaksanakan SPM Bidang Kesenian;
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melaksanakan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dan SPM Bidang Perhubungan;
14. Sekretariat Daerah (Bagian PDE dan Bagian Humas Protokol) , melaksanakan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. BUMD yaitu PDAM yang turut melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung melalui 1 (satu) program, yaitu: (1) Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM dengan dukungan dana APBD tahun 2015 sebesar Rp 25.000.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp 24.647.000,00 atau 98,59% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 353.000,00.

Dari tabel capaian kinerja sasaran 2 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 2 tahun 2015 mencapai 94,01% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yang pada tahun 2015 mencapai 98,59%. Sehingga capaian kinerja sasaran perlu ditingkatkan untuk mengimbangi capaian kinerja anggaran.



SASARAN STRATEGIS 3

Terselenggaranya Pelayanan Prima

Sasaran “*Terselenggaranya Pelayanan Prima*” diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pencapaian sasaran “*Terselenggaranya Pelayanan Prima*” indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 :

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	80	79	97,9	100	100	100,00

Pencapaian sasaran terselenggaranya pelayanan prima dengan indikator utamanya adalah meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja persentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut telah mencapai target RPJMD tahun 2015 karena seluruh unit pelayanan telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,10% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, pencapaian ini didukung oleh program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan berupa Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan output berupa laporan indeks kepuasan masyarakat yang merupakan kompilasi dari survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh unit kerja.
- Disamping pelaksanaan survey IKM, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga telah melaksanakan perbaikan di bidang ketatalaksanaan yaitu dengan melaksanakan penerapan SOP pada tahun 2015 sebesar 100,00% dengan capaian ini



diharapkan pelayanan SKPD kepada masyarakat akan lebih jelas baik dari sisi prosedur pelayanan maupun dari sisi administrasi, sehingga seluruh unit pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dapat terukur. Capaian ini didukung oleh program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP dengan kegiatan Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan output berupa laporan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, yang pada tahun 2015 difokuskan pada unit pelayanan 24 UPT Puskesmas dengan hasil sebagai berikut

- 4 UPT puskesmas dengan kategori Baik Sekali dengan nilai 750,01 – 1000 (Ngadirojo, Kebonagung, Punung, dan Bubakan)
- 14 UPT puskesmas dengan kategori Baik dengan nilai 500,01 – 750 (Sukorejo, Pringkuku, Tegalombo, Tanjungsari, Gemaharjo, Kedungbendo, Pacitan, Candi, Pakisbaru, Arjosari, Donorojo, Tulakan, Sudimoro, dan Gondosari)
- 6 UPT puskesmas dengan kategori Cukup dengan nilai 250,01 – 500 (Kalak, Wonokarto, Ketrowonojoyo, Bandar, Nawangan, dan Jeruk)
- Dalam hal perbaikan ketatalaksanaan, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga fokus terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dihasilkan dari jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani tahun 2015 sebanyak 10 Aduan dibandingkan dengan Pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2015 sebanyak 10 aduan. Proses penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik secara umum dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, sedangkan secara teknis unit-unit pelayanan secara langsung juga menangani adanya pengaduan masyarakat seperti halnya pelayanan di puskesmas, dimana terdapat unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui kotak pengaduan ataupun melalui SMS atau call center yang telah disediakan. Secara khusus Bapak Bupati Pacitan juga menerima pengaduan melalui SMS center dengan nomor 081230130001, sehingga masyarakat dapat secara langsung memberikan masukan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Guna peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah kabupaten pacitan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan berupa Penyusunan



Dokumen ISO 9001-2008 dan Sertifikasi ISO 9001-2008 dengan output berupa sertifikat ISO yang diterima oleh unit pelayanan yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ISO dan telah diverifikasi oleh Badan Sertifikasi Internasional yang telah terakreditasi yaitu WQA (Worldwide Quality Assurance). Jumlah Pelayanan Berstandar Internasional (ISO) pada tahun 2015 sebanyak 17 unit pelayanan yang terdiri :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
5. UPT Puskesmas Punung;
6. UPT Puskesmas Kebonagung;
7. UPT Puskesmas Ngadirojo;
8. UPT Puskesmas Arjosari;
9. UPT Puskesmas Tulakan;
10. UPT Puskesmas Tegalombo;
11. UPT Puskesmas Tanjungsari
12. UPT SMKN 1 Pacitan;
13. UPT SMKN 2 Pacitan;
14. UPT SMKN 3 Pacitan;
15. UPT SMAN 1 Pacitan;
16. UPT SMPN 1 Pacitan;
17. UPT SMKN Donorojo.

Capaian tahun 2015 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 18 unit pelayanan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang disediakan pada tahun 2015, apabila dibanding dengan capaian kinerja pada tahun 2014, capaian kinerja pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 1 unit pelayanan yaitu dengan telah dicapainya sertifikat ISO oleh UPT Puskesmas Tanjungsari.



- Capaian kinerja pelayanan bidang kependudukan juga mengalami peningkatan antara lain:
 1. Cakupan penerbitan kartu keluarga pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 95,56 %, jumlah kartu keluarga yang diterbitkan 185.746 KK dibagi jumlah kepala keluarga 194.096 KK X 100 % = 95,70 %, realisasi tahun 2015 Adalah 93,14 %, sehingga capaian kinerja tahun 2015 sebesar 102,74 %.
 2. Jumlah kepemilikan KTP pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 89,48 %, jumlah KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 432.096 KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP 472.841 jiwa X 100 % = 91,38 %, realisasi tahun 2015 adalah 89,63 %, sehingga capaian kinerja cakupan penerbitan KTP tahun 2015 sebesar 101,95 %.
untuk mencapai kinerja tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015 melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
 - Pelayanan perekaman KTP-EI Di 12 kecamatan, ke semua sekolah-sekolah SLTA Se Kabupaten Pacitan dan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
 - Sosialisasi kebijakan kependudukan
 - Pelayanan Pro Aktif Kepada Masyarakat (PPA) ke desa-desa Se Kabupaten Pacitan
 3. Cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2015 adalah 81,30 %, jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 485.547 Lembar dibagi jumlah kelahiran yang terjadi 596.261 lembar x 100 % = 81,43 %, realisasi tahun 2015 adalah 79,06 %, sehingga capaian kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2015 sebesar 102,99 %.
Pencapaian ini didukung dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 8 Menteri, Peraturan Bupati Tentang Fasilitasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Pro Aktif (PPA) Ke Desa/Kelurahan, Dan Pelayanan Sidang Langsung Di Desa (SILADES)
 4. Cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2015 sebesar 54,65 %, jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 12.995 lembar dibagi jumlah kematian yang terjadi 23.760 lembar



X 100 % = 54,69 %, sehingga baru terealisasi sebesar 53,56 %,

Dalam hal pelayanan kependudukan yang menjadi isu utama di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang
2. Medan/wilayah di Kabupaten Pacitan sebagian besar sulit dijangkau
3. Belum tercukupinya kebutuhan blangko KTP-Elektronik sesuai kebutuhan dan kurangnya alat untuk mencetak KTP-EI (Printer)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain :

1. Adanya sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan meningkat ;
2. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara jemput bola
3. Selalu mengadakan koordinasi dengan pusat dan Dinas Kependudukan Propinsi untuk mendapatkan blangko KTP-Elektronik secara maksimal dan printer untuk mencetak KTP-EI.

Usaha dan inovasi yang dilaksanakan tersebut telah diapresiasi oleh Gubernur Jawa Timur Dengan dianugerahkannya Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 Kategori 3 Terbaik Se Jawa Timur Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan atas layanan kependudukan "PREDATOR" / Petugas Registrasi Armada Bermotor, yang dalam aplikasi pelayanannya langsung turun ke pedesaan untuk melaksanakan pelayanan registrasi administrasi kependudukan bagi penduduk yang belum terjangkau transportasi dan jauh dari pusat pelayanan kependudukan

Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja diatas didukung melalui 5 (lima) program, antara lain:

Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 3 :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SOP	75.000.000	73.556.850	98,08	1.443.150



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
2	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	45.000.000	26.088.400	57,97	18.911.600
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	750.000.000	712.905.300	95,05	37.094.700
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	922.000.000	801.840.250	86,97	120.159.750
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.479.162.852	15.814.060.109	95,96	665.102.744
Jumlah		18.271.162.852	17.428.450.909	95,39	842.711.944

Dari tabel capaian kinerja sasaran 3 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 3 tahun 2015 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 3 yang pada tahun 2015 mencapai 95,39%.



TUJUAN 2:
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN

SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran “Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” diarahkan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pencapaian kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 :

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Opini audit BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	dalam proses	n.a

- Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Pacitan untuk tahun 2015 yang diperiksa pada tahun 2016 ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa

NO.	TAHUN	OPINI BPK
1.	LKD TAHUN 2011	WTP
2.	LKD TAHUN 2012	WDP
3.	LKD TAHUN 2013	WTP
4.	LKD TAHUN 2014	WTP
5.	LKD TAHUN 2015	On progress

Keuangan Republik Indonesia, sedangkan laporan keuangan tahun 2014 yang diperiksa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Surat Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 156/S-HP/XVIII-SBY/05/2015 Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015. Hal ini tentunya merupakan



hasil dari upaya dan kerja keras seluruh komponen dan seluruh pihak sehingga prestasi tersebut dapat diraih kembali setelah pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pacitan sempat mendapatkan catatan khusus yang berakibat pada perolehan opini WDP. Dalam rangka mempertahankan opini WTP tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerbitkan beberapa petunjuk khusus untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Road Map Dan Action Plan Dalam Mewujudkan Dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) serta guna mendukung pencapaian opini WTP BPK Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui inspektorat juga melaksanakan pemeriksaan internal terhadap laporan keuangan SKPD secara berkala untuk pemeriksaan PKPT maupun non PKPT yang pada tahun 2015 dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti secara keseluruhan. Hal ini dapat tercapai karena etos kerja yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari aparatur pengendalian intern pemerintah serta atas kerjasama yang baik dari obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Tenaga pemeriksa / auditor yang ada di inspektorat kabupaten pacitan sampai tahun 2015 sejumlah 17 orang, tentunya hal ini masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan, untuk itu diperlukan diklat teknis khusus bagi auditor / APIP

Tabel Data Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kasus pelanggaran disiplin	Kasus	9	14	18	15	7	-
2	- Temuan Pemeriksaan	Kasus	228	254	391	570	437	671
	- Tindak Lanjut	Kasus	228	254	290	671	437	671



3	- Jumlah obyek pemeriksaan	Buah	155	180	167	99	55	110
	- Pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan	Buah	155	179	167	99	55	110
4	- Jumlah tenaga pemeriksa	Orang	21	21	14	19	19	19
	- Tenaga pemeriksa yang mengikuti Diklat	Orang	2	5	6	10	15	17
5	- Jumlah sisdur yang diperlukan	Sisdur	1	1	2	2	1	1
	- Jumlah sisdur yang disusun	Sisdur	0	1	2	2	1	1
6	- Jumlah aduan masyarakat	Aduan	48	10	20	15	10	3
	- Jumlah aduan yang ditindak lanjuti	Aduan	38	10	20	15	10	3

- Sedangkan dalam bidang akuntabilitas kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 60,48 atau predikat predikat “B” (BAIK) sesuai dengan Surat

Menteri PAN&RB Nomor B/585/D.I.PANRB/02/2016

Tanggal 1 Februari 2016. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan

No.	TAHUN	PREDIKAT	NILAI
1.	2011	CC	50,42
2.	2012	CC	54,35
3.	2013	CC	55,62
4.	2014	CC	56,18
5.	2015	B	60,48

untuk manajemen kinerja meskipun memerlukan sedikit perbaikan. Dalam pencapaian ini memang sangat diperlukan komitmen bersama dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan yaitu dengan melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri PAN dan RB, juga dikarenakan pada sebagian besar indikator kinerja capaian kinerjanya telah melebihi target yang telah ditetapkan dan memasukkan indikator SPM yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan perubahan RPJMD tersebut secara otomatis rencana strategis SKPD juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan RPJMD perubahan. Selain



melaksanakan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan juga melaksanakan reviu dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 21 (duapuluh satu) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 4 :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	4.392.834.158	3.818.939.191	96,12	573.894.968
2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	103.199.000	97.751.300	94,72	5.447.700
3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.545.819.354	5.003.235.745	90,22	542.583.609
4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.612.252.000	2.533.196.022	96,97	79.055.978
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	825.000.000	819.537.600	99,34	5.462.400
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.367.379.000	10.853.100.935	70,62	4.514.278.065
7	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.565.507.900	11.340.757.283	98,06	224.750.617
8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35.000.000	34.808.200	99,45	191.800
9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	425.000.000	423.186.450	99,57	1.813.550
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur	439.051.000	314.407.425	71,61	124.643.575



11	Program perencanaan pembangunan daerah	1.600.000.000	1.590.223.700	99,39	9.776.300
12	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.348.540.000	1.340.003.600	99,37	8.536.400
13	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	1.480.000.000	1.444.367.900	97,59	35.632.100
14	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.165.000.000	1.156.158.850	99,24	8.841.150
15	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	724.137.500	722.570.554	99,78	1.566.946
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	815.000.000	737.836.750	90,53	77.163.250
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.056.100.008	1.015.118.464	96,12	40.981.545
18	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	572.250.000	539.159.700	94,22	33.090.300
19	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	65.000.000	64.854.500	99,78	145.500
20	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	60.000.000	59.999.800	100,00	200
21	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	70.000.000	69.830.450	99,76	169.550
JUMLAH		50.267.069.920	43.979.044.419	87,49	6.288.025.503

Dari tabel capaian kinerja sasaran 4 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 4 tahun 2015 belum dapat diketahui hasilnya, akan tetapi jika dilihat dari capaian tahun 2014 opini WTP dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga capaian kerjanya dapat tercapai 100% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 4 yang pada tahun 2015 mencapai 87,49%. Dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.288.025.503,00



TUJUAN 3:

“MEWUJUDKAN PERILAKU DAN LINGKUNGAN SEHAT”

SASARAN STRATEGIS 5

Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat

Sasaran “Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat” diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan perilaku hidup sehat. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “*Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat*” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	79,47	83,02	100	100	89,20	100,00	112,11
2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	58,1	52,83	55,16	60,26	64,00	61,03	95,36
Rata-rata capaian indikator sasaran 5								103,73

Capaian indikator yang mendukung sasaran terwujudnya perilaku hidup sehat pada tahun 2015 mengalami progres yang menggembirakan, capaian dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting perilaku hidup sehat, berikut adalah uraian mengenai perkembangan yang telah dicapai:

Seiring dengan meningkatnya capaian indikator desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka jumlah penduduk yang menggunakan jamban juga meningkat. Pada tahun 2015 prosentase penduduk memakai jamban keluarga di Kabupaten Pacitan sudah 100% dari seluruh jumlah penduduk yaitu sebanyak 550.986 jiwa, karena sudah seluruh desa dan seluruh kecamatan di



Kabupaten Pacitan dinyatakan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Hal ini didorong oleh program ODF atau STBM di wilayah Kabupaten Pacitan serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. Meski sudah dinyatakan Kabupaten ODF, perlu terus ditingkatkan lagi kesadaran dan pemahaman masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat agar kesehatan lingkungan lebih meningkat.

Sedangkan untuk Rumah berjamban adalah jumlah rumah yang memiliki jamban sehat sesuai standar kesehatan. Jumlah rumah berjamban di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sebanyak 124.986 rumah dari target 122.383 rumah berjamban sehingga capaian kinerjanya 101,38%. Indikator ini dapat tercapai karena program yang mendukung ODF (*Open Defecation Free*) tengah digalakkan di Kabupaten Pacitan dalam rangka menuju Pacitan Bebas ODF Tahun 2012. Sedangkan Kecamatan yang sudah ODF sampai tahun 2015 ada 12 Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan ODF sebanyak 171 desa/kelurahan. Artinya Kabupaten Pacitan sudah dinyatakan Bebas ODF pada tahun 2015. Kegiatan Deklarasi ODF dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50 pada 12 November 2014 oleh Bupati Pacitan, jajaran insan kesehatan dan masyarakat serta anak sekolah dan dihadiri oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

Upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan meliputi kepemilikan jamban, pembuangan air limbah dan sampah yang memenuhi syarat kesehatan dapat meningkatkan kualitas air bersih serta mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemecuan dalam rangka mencapai target MDGs. Di Kabupaten Pacitan telah berjalan kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang terdiri dari 5 pilar, yaitu :



1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau peningkatan akses jamban
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Pengolahan air minum dan makanan skala rumah tangga
4. Pengolahan limbah skala rumah tangga
5. Pengolahan sampah skala rumah tangga

Suatu desa/kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM berdasarkan kondisi :

- 1) Minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
- 2) Adanya masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM baik individu atau dalam bentuk komite dan sebagai respon dari aksi intervensi STBM, atau mempunyai tim kerja STBM.
- 3) Masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan (rencana tindak lanjut) dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan STBM dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pilar ke-1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan adopsi perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan secara bertahap mengembangkan pilar lain dari STBM.

Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sama dengan tahun 2013 dan 2014 sebanyak 171 desa/kelurahan dari 171 desa/kelurahan yang ada atau sebesar 100,00% desa/kelurahan sudah melaksanakan pilar-pilar STBM. Artinya seluruh desa/kelurahan dan seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan sudah melaksanakan kegiatan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Di Kabupaten Pacitan juga mendapatkan anggaran Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) dari anggaran Tugas Pembantuan. Angka Nasional jumlah desa melaksanakan STBM sampai tahun 2014 sebesar 55,74%, berarti capaian Kabupaten Pacitan jauh lebih tinggi dibanding nasional.



Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator. Persentase rumah tangga ber-PHBS didapatkan dari jumlah rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dipantau. Sepuluh indikator tersebut antara lain :

- 1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,
- 2) Bayi diberi ASI eksklusif,
- 3) Balita ditimbang setiap bulan,
- 4) Menggunakan air bersih,
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun,
- 6) Menggunakan jamban sehat,
- 7) Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu,
- 8) Makan buah dan sayur tiap hari,
- 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah.

Sedangkan rumah tangga yang dikaji minimal 1% dari seluruh rumah tangga yang ada. Hasil kegiatan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui hasil survei PHBS tatanan Rumah Tangga pada tahun 2015 dari target 64% terealisasi sebesar 61,03% dengan capaian kinerja 95,36%. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 37.816 dan yang sudah PHBS sebanyak 23.080 rumah tangga. Tahun 2014 dari target 62% terealisasi sebesar 60,26% dengan capaian kinerja 97,19%. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 35.754 dan yang sudah PHBS sebanyak 21.547 rumah tangga.

Rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 sebesar 55,16%, tahun 2012 sebesar 52,83%, tahun 2011 yaitu sebesar 58,10%.

Capaian rumah tangga ber-PHBS merupakan hasil survei yang dilakukan petugas



puskesmas dimana sasaran survei berbeda setiap tahunnya sehingga dimungkinkan hasil yang berbeda atau naik-turun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kinerja Rumah Tangga yang ber-PHBS belum bisa memenuhi target dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang memenuhi standar kesehatan seperti perilaku pemberian ASI eksklusif kepada bayi capaiannya masih rendah serta perilaku merokok di dalam rumah masih sangat tinggi. Ke depan kegiatan promosi kesehatan harus lebih ditingkatkan agar pembangunan kesehatan lebih berhasil dalam upaya promotif dan preventif bukan lagi pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Juga diperlukan adanya intervensi dari berbagai komponen baik lintas program maupun lintas sektor, LSM, swasta, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Juga terus dilakukan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS di tingkat desa/kelurahan serta mengikuti event lomba PHBS baik tingkat kabupaten maupun propinsi untuk mengungkit capaiannya. Hasil kegiatan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui hasil survei PHBS tatanan Rumah Tangga Tahun 2014 di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa rumah tangga ber-PHBS sebesar 48,25%. Sedangkan secara nasional rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2014 mencapai 56,586%. Berarti capaian Kabupaten Pacitan lebih baik dibanding Propinsi Jawa Timur dan capaian nasional.

Dalam kaitannya dengan PHBS, Jumlah Pelaksanaan Tatanan Kabupaten Sehat di Kabupaten Pacitan Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 atau 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, yang dimaksud Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan pendekatan terpadu, menyeluruh, lintas sektor berbasis masyarakat, masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu juga merupakan operasionalisasi pembangunan berkelanjutan, berbasis



pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mengutamakan pada terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/kota tersebut, secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik.

Penghargaan Swasti Saba adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pendekatan kabupaten/kota sehat. Penghargaan Swasti Saba meliputi :

- a. Padapa, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 2 tatanan
- b. Wiwerda, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 3-4 tatanan
- c. Wistara, bagi kabupaten/kota yang memilih dan melaksanakan 5 tatanan atau lebih.

Penilaian kabupaten/kota sehat dilakukan pada proses kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dilaksanakan oleh pemerintah dan yang bersifat berkelanjutan jadi bukan bersifat kompetisi/lomba. Tatanan dalam penilaian penghargaan swasti saba adalah sasaran kabupaten/kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten/kota. Tatanan kabupaten/kota dikelompokkan berdasar kawasan dan permasalahan khusus terdiri dari 9 tatanan, yaitu :

- a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
- b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
- c. Kawasan Pertambangan Sehat
- d. Kawasan Hutan Sehat
- e. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- f. Kawasan Pariwisata Sehat
- g. Ketahanan Pangan dan Gizi
- h. Kehidupan Masyarakat Yang Mandiri



i. Kehidupan Sosial Yang Sehat

Untuk pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 4 tatanan dari 9 tatanan yang ada. Pada tahun 2011 dari 4 tatanan yang diajukan dan dinilai di tingkat nasional, ada 2 tatanan yang lolos oleh tim verifikasi dan berhak menerima Penghargaan “Swasti Saba Padapa” Program Kabupaten Sehat kualifikasi pemantapan. Penyerahan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia diterima pada tanggal 14 Nopember 2011 oleh Bupati Pacitan di Istana Negara. Tatanan Kabupaten Sehat yang diverifikasi tingkat nasional adalah :

1. Tatanan Masyarakat Sehat dan Mandiri, titik Pantau di Desa Poko
2. Tatanan Pariwisata Sehat, titik pantau di Pantai Teleng Ria
3. Tatanan Pemukiman dan Sarana Prasarana Sehat, titik pantau di Perumnas Bangunsari
4. Tatanan Hutan Sehat, dengan titik pantau di Desa Donorojo

Capaian tatanan Kabupaten Sehat tahun 2012 sudah memenuhi 6 tatanan adalah:

1. Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
2. Tatanan Hutan Sehat
3. Tatanan Pariwisata Sehat
4. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri
5. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
6. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Berarti ada 2 tatanan baru yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi dan Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi. Dari 6 tatanan yang diadopsi pada tahun 2012 diajukan untuk verifikasi tingkat propinsi dan lolos untuk dievaluasi tingkat nasional pada tahun 2013, dengan 6 tatanan sebagai berikut :

1. Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum, dengan titik pantau Desa Bangunsari dan Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan
2. Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, dengan titik pantau di Terminal Bus Pacitan di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan, dan di sepanjang jalur Jalan Tentara Pelajar sampai dengan Jalan



WR. Supratman Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan

3. Tatanan Hutan Sehat, dengan titik pantau Kawasan Hutan Desa Donorojo Kecamatan Donorojo dan Kawasan Hutan Desa Karanganyar Kecamatan Kebonagung
4. Tatanan Pariwisata Sehat, dengan titik pantau Kawasan Wisata Teleng Ria Kecamatan Pacitan dan Kawasan Wisata Goa Gong Kecamatan Punung
5. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan titik pantau Desa Kledung Kecamatan Bandar
6. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri, dengan titik pantau Desa Poko Kecamatan Pringkuku dan Desa Bangunsari Kecamatan Bandar.

Capaian kegiatan Kabupaten Sehat pada tahun 2013 sudah mencapai 6 tatanan dan pada tanggal 14 November 2013 Kabupaten Pacitan berhasil mendapatkan “Piala Swasti Saba Wiwerda” yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati Pacitan di Hotel Merlynn Park Jakarta.

Sedangkan pada tahun 2015 sudah berhasil mendapatkan “Piala Swasti Saba Wistara” untuk penilaian 6 tatanan yang diajukan. Piala diserahkan Menteri Kesehatan kepada Bupati Pacitan pada tanggal 30 November 2015 di Jakarta. Sedangkan sampai tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, bimtek dan monev Kabupaten Sehat pada 9 tatanan.

Guna mendukung pencapaian PHBS pemerintah kabupaten pacitan melalui dinas kesehatan mencanangkan desa dan kelurahan siaga untuk bisa menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif jika memenuhi 8 (delapan) kriteria berdasarkan Pedoman Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/Menkes/SK/X/2010. Desa Siaga Aktif merupakan desa/kelurahan yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki



kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Untuk mengembangkan Desa Siaga minimal harus memenuhi 9 syarat yaitu :

- 1) Ada Forum Masyarakat Desa (FMD) = Peran aktif masyarakat dan ormas dalam meningkatkan kesejahteraan warga/perbaikan desanya.
- 2) Adanya pelayanan kesehatan dasar = Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan seperti polindes, pustu, bidan, dokter/perawat/ bidan praktek swasta, klinik.
- 3) Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) = Posyandu, Poskesdes, Kader Pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan aktif, ambulans desa.
- 4) Adanya pengamatan kesehatan terus-menerus dilakukan masyarakat serta melaporkan kepada petugas kesehatan.
- 5) Ada pembinaan dari puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi ibu dan bayi.
- 6) Ada sistem siaga terhadap bencana oleh masyarakat seperti ancaman dan kejadian yang dapat membahayakan jiwa.
- 7) Ada pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat = Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan seperti dana sehat, jimpitan, tabungan ibu bersalin.
- 8) Mempunyai lingkungan yang sehat, mencakup kebersihan, kenyamanan, kebutuhan dasar.
- 9) Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Ada 4 tahapan/tingkatan Desa Siaga yaitu :
 - a. Desa Siaga BINA = memenuhi kriteria 1-3
 - b. Desa Siaga TUMBUH = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 2 kriteria lainnya (5 kriteria)
 - c. Desa Siaga KEMBANG = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 4 kriteria lainnya (7 kriteria)
 - d. Desa Siaga PARIPURNA = memenuhi seluruh kriteria (9 kriteria)

Target Cakupan Desa Siaga Aktif tahun 2015 sebesar 81,87% dari seluruh desa/kelurahan terealisasi sebesar 171 desa/kelurahan dari 171 desa/kelurahan



yang ada yang ada di Kabupaten Pacitan atau 100%. Sama dengan capaian tahun 2013 dan 2014 sebesar 100%. Sedangkan capaian tahun 2012 sebesar 79,53% dan tahun 2011 sebesar 75,44%. Desa/Kelurahan Siaga Aktif di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 95,72%. Sedangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif secara nasional pada tahun 2014 sebanyak 69,51% sehingga capaian Kabupaten Pacitan lebih baik dari Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 1 (satu) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.140.191.500	1.104.794.750	96,90	35.396.750

Dari tabel capaian kinerja sasaran 5 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 5 tahun 2015 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 5 yang pada tahun 2015 mencapai 96,90% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 35.396.750,00.



SASARAN STRATEGIS 6

Terciptanya Lingkungan Sehat

Sasaran “Terciptanya Lingkungan Sehat” diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “**Terciptanya Lingkungan Sehat**” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut :

Tabel Target Indikator Kinerja Sasaran 6

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	38,68	39,73	40	40,61	40,92	41,22	100,73
2.	Skor Evaluasi Adipura	74,46	76,68	76,68	74,22	78,46	74,70	95,21
Rata-rata capaian indikator sasaran 6								97,97

Keberhasilan pencapaian sasaran cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang antara lain meliputi jalan, drainase, pengelolaan persampahan, sanitasi, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai dengan uraian pencapaian sebagai berikut:

- Indikator kinerja Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2015 sebesar 41.22% atau mencapai 0.3% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 40.92% dan capaian tahun 2015 sebesar 41.22%.

Indikator kinerja Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2015 sebesar 44.11% atau mencapai 2.82% dari target RPJMD tahun



2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 41.29% dan capaian tahun 2015 sebesar 44.11%.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Meningkatnya rumah layak huni

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 44.11% dan mengalami peningkatan sebesar 3.12% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator kinerja rumah layak huni pada tahun 2015 sebesar 98.70% atau mencapai 5% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 93.70% dan capaian tahun 2015 sebesar 98.70%.

capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 98.70% atau 134.250 unit dan mengalami peningkatan sebesar 0.08% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator kinerja Permukiman layak huni (%) pada tahun 2015 sebesar 99.98% atau mencapai 2.42% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 97.56% dan capaian tahun 2015 sebesar 99.98%.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Peningkatan jalan lingkungan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 99.98% atau 13.665 unit dan mengalami peningkatan sebesar 0.92% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



Database Capaian Kinerja Bidang Perumahan Tahun 2015

.NO	DATA BASE DATA BIDANG PERUMAHAN	SAT.	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Layak Huni	Unit	122.340	124.070	129.750	135.326	136.914	137.020
2	Rumah Bersanitasi	Unit	106.280	109.000	110.590	112.130	119.765	121.555
3	Jalan Lingkungan yang dibangun	Meter	1.368.885	1.375.885	1.383.200	1.739.276,94	1.919.700,51	2.102.550
4	Luasan lingkungan permukiman kumuh	Ha	102,24	97,24	93,50	85,24	81,39	79,25

Database Capaian Kinerja Bidang PU Cipta Karya Tahun 2015

NO	DATA BASE BIDANG PEKERJAAN UMUM	SAT.	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk Terlayani Air Bersih	Jiwa	59.120	61.514	66.350	70.970	72.150	80.830
2	Desa Terlayani Air Bersih	Desa	109	119	158	158	160	162
3	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	RT	105.360	105.540	107.650	109.000	109.650	111.480
4	Perpipaan	Meter	628.022,3	650.733	672.423	685.717	709.565	733.413
5	Intake	Unit	18	19	24	27	33	35
6	Pompa	Unit	28	32	35	35	40	45
7	Saringan Pasir Lambat	SPL	12	12	12	14	15	15
8	Sumur Bor	Unit	25	25	25	25	25	25
9	Ground Reservoir	Unit	39	47	52	54	64	68
10	Hidran Umum	Unit	168	119	139	149	169	173
11	Kran Umum	Unit	75	75	83	83	88	95
12	Genset	Unit	8	12	13	17	17	17
13	MCK	Unit	39	71	93	101	110	114
14	Drainase Kota	Meter	92.635	100.741	100.841	101.231	110.359	119.487
19	TPA	Buah	1	1	1	1	1	1
20	Tempat Sampah Permanent	Buah	5	6	7	4	4	4
21	Armroll Truck	Buah	3	3	3	3	3	4
22	Truck Sampah	Buah	2	2	2	5	5	5
23	Container	Buah	15	21	21	22	31	28
24	Gerobak Sampah	Buah	126	126	126	136	136	140
25	Mobil Tangga	Unit	1	1	1	1	1	1
26	Kendaraan Roda Tiga	Unit	6	9	9	9	11	11
27	Truck Tangki	Unit	2	2	4	4	5	4
28	Mobil Pick Up	Unit	3	2	2	2	3	4
29	Diesel Air	Unit	2	5	5	5	5	7



30	Mesin Pemotong Rumput Dorong	Unit	8	8	8	8	13	15
31	Mesin Pemotong Rumput Gendong	Unit	9	9	9	9	14	15
32	Jalur Hijau Yang Tertata	m ³	20.586	21.286	21.491	22.985	24.283,91	24.503,27
33	Luas Taman	m ²	35.420	35.920	36.022	79,231	24.161,17	25.250,20
34	Penanganan Sampah	m ³	127,62	129,30	130,22	131,12	131,75	132,79
35	Pengangkutan Sampah	m ³	90,10	120,5	11,09	111,09	113,03	114,06
36	Daya Tampung TPS	m ³	130,68	132,2	132,2	154,85	169,65	171,54
37	Jumlah PJU	titik	5.367	5.399	5.728	2.466	2.821	3.449

- Indikator kinerja Lingkungan pemukiman kumuh (%) pada tahun 2015 sebesar 25,39% atau mencapai 1,34% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 24,05% dan capaian tahun 2015 sebesar 25,39%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 25,39% atau 137.350 unit dan mengalami peningkatan sebesar 0,08% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Persentase Rumah bersanitasi pada tahun 2015 sebesar 87.56% atau mencapai 3.86% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 83.7% dan capaian tahun 2015 sebesar 87.56%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 87.56% atau 121.550 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.29% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Persentase Penanganan sampah (%) pada tahun 2015 sebesar 90.35% atau mencapai 0.03% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 90.32% dan capaian tahun 2015 sebesar 90.35%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 90.35% atau 132,79 m³ dan mengalami peningkatan sebesar 0.71% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Dengan kerja sama yang baik antar stakeholder terkait, skor/nilai Program Adipura dapat dipertahankan sehingga dalam rentang waktu tahun 2008-2015 Pacitan mendapatkan anugerah Piala Adipura secara berturut-turut dari Presiden RI. Seiring dengan peningkatan passing grade bagi skor penerima Adipura di waktu yang akan datang, perlu segera dirumuskan strategi kebijakan dan kegiatan inovatif dalam bidang pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup yang diharapkan dapat meningkatkan capaian nilai/skor Adipura sehingga Pacitan akan tetap mendapatkan anugerah Piala Adipura dari Presiden RI. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan, lembaga legislatif, LSM hingga warga masyarakat Pacitan pada umumnya. Target capaian skor Adipura 2014 adalah 74,70. Capaian skor adipura ini mengantarkan Pacitan sebagai peraih Adipura untuk Kota Kecil yang diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Nopember 2015. Skor adipura 2015 tidak tercapai karena adanya perubahan dalam system penilaian adipura 2015. Penurunan nilai skor dan ketidaktercapaian target pada tahun 2014 ini merupakan pengaruh dari berubahnya bobot penilaian terhadap beberapa titik pantau yang dijadikan indikator penentu, dari 14 titik pantau diantaranya seperti bank sampah, TPA, perumahan, jalan, pasar, serta pertokoan, mayoritas mengalami kenaikan bobot penilaian. Meski beberapa diantaranya juga ada yang menurun. Dari beberapa titik pantau tersebut, seperti bank sampah yang semula 0, sekarang bobotnya naik menjadi 7. Demikian juga dengan TPA, yang semula 9 sekarang ditingkatkan menjadi 11. Meskipun demikian dari beberapa komponen penilaian tersebut, beberapa diantaranya juga mengalami penurunan, misalnya jalan yang semula 9 turun menjadi 5, pasar yang semula 9 turun menjadi 8, dan pertokoan yang semula 5 sekarang turun menjadi 4. Adapun skala prioritas yang perlu diperhatikan, terkait pengelolaan Bank Sampah, Pace Sewu. Pada pantau satu lalu, memang terdapat sedikit kendala, akan tetapi persoalan kecil tersebut sudah bisa teratasi dengan keberadaan TPA yang dinilai sudah memenuhi standar spesifikasi yang ditentukan, misalnya seperti pengelolaan air lindi (limbah cair hasil degradasi dari sampah yang terpapar air hujan), dimana sudah tersedia IPAL sangat memadai. Selain itu, keberadaan rumah kompos, juga sangat



membantu mengolah sampah menjadi bahan penyubur tanaman, serta memanfaatkan lahan-lahan pasif menjadi lahan-lahan aktif sebagai lokasi penampungan sampah.

Dalam upaya pencapaian piala adipura selain pemerintah, peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan. Sebab selama ini, penghargaan Adipura, seakan-akan hanya milik pemerintah. Padahal sejatinya, peran aktif masyarakat sangat menentukan, khususnya pada fase pengelolaan sampah skala kota.

Beberapa langkah telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya mempertahankan dan meraih kembali piala adipura antara lain melalui:

- Sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah adalah potensi sumber daya yang dapat dikelola menjadi hasil positif. Pembangunan TPA Sanitary Landfill disertai prasarana pendukungnya.
- Optimalisas sosialisasi, asistensi, pemberdayaan masyarakat dan pemberian stimulan sarana pengelolaan persampahan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle).
- Menggerakkan semua potensi dan sumber daya terkait untuk bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan skor Adipura.
- Sosialisasi, asistensi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Sosialisasi, penyuluhan dan kerja sama lintas sektor untuk penegakan peraturan wajib memiliki dokumen lingkungan berikut pelaksanaan dan pengawasannya bagi sektor usaha/industri.

Selain penghargaan adipura, pada tahun 2015 SMP Negeri 1 Pacitan mewakili Kabupaten Pacitan menerima penghargaan adiwiyata mandiri pada tanggal 03 juni 2015 dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2015

Indikator Kinerja Pengolahan sampah mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami perubahan pada tahun 2011 hingga 2012 pengolahan sampah menggunakan model *open dumping* sehingga tidak perlu diadakan pengolahan sampah 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) sehingga pada tahun 2011 dan 2012



persentase capaian sampah kita cukup tinggi karena hanya diukur dari penampungan sampah yang masuk ke TPA. Sejak tahun 2013 hingga 2015 pola pengolahan sampah menggunakan sistem 3R sehingga sampah – sampah yang masuk ke TPA mengalami pengolahan sejak dari rumah tangga, kontainer/ TPA 3R, bank - bank sampah /pengepul sampah sehingga hasil evaluasi ditemukan hampir 30% sampah – sampah yang berasal dari rumah tangga dan sampah – sampah sejenis rumah tangga berkurang masuk ke TPA. Hal ini dilihat dari capaian sejak tahun 2013 hingga akhir 2015 indikator pengolahan sampah cukup meningkat/tercapai dibandingkan target yang tercantum di RPJMD

Indikator Kinerja Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada awal periode tahun 2011 mencapai 50% dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 100%, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karena Cakupan pengawasan AMDAL ini akan terus dilaksanakan karena disinilah fungsi esensi KLH sebagai pengawas institusi pengawas lingkungan. Dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diharapkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan akan dapat dieliminasi.

a. AMDAL

Secara umum pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang wajib AMDAL di Kabupaten Pacitan sudah terlaksana dengan baik (100%). Pengawasan yang dilakukan adalah terhadap :

- Pembangunan Jalur Lintas Selatan ruas Pacitan
- Pabrik Pengolahan Hasil Tambang Cu dan Zn PT. Dragon Fly Mineral Industry (PT. DFMI),
- IUP PT. Gemilang Limbah Internusa (PT. GLI) di Desa Kluwih Kecamatan Tulakan
- IUP PT. Gemilang Limbah Internusa (PT. GLI) di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo
- PLTU Sudimoro
- Waduk Tukul Desa Karanggede Kecamatan Arjosari.



b. UKL-UPL

Pengawasan sudah dilaksanakan baik secara rutin/periodik, spot check/sampling/sidak maupun karena aduan masyarakat

Berikut Disajikan Database Kinerja Bidang Lingkungan Hidup

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas daerah layanan kebersihan	Ha	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65	3.159,65
2	Luas Hutan Kota	Ha	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Sampah terangkut ke TPA	m ³ /hari	90,5	115	137	137	131,7	159,3
4	Individual septic tank	KK	99.751	109.726	179.116	179.116	179.116	179.116
5	Luas tutupan terumbu karang	Ha	10,97	10,97	10,05	10,05	11	11

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 6 (enam) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 6

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	355.000.000	348.351.500	98,13	6.648.500
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.466.500.000	2.406.580.550	97,57	59.919.450
3	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	850.000.000	800.176.400	94,14	49.823.600
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	50.000.000	49.517.000	99,03	483.000
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.213.312.550	1.148.665.400	94,67	64.647.150
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	175.000.000	162.605.100	92,92	12.394.900
Jumlah		5.109.812.550	4.915.895.950	96,21	193.916.600

Dari tabel capaian kinerja sasaran 6 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 6 tahun 2015 mencapai 97,97% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran



6 yang pada tahun 2015 mencapai 96,21% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 193.916.600,00.

TUJUAN 4:
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan” diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan” capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Kinerja Sasaran 7

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Angka Usia Harapan Hidup	71,48	71,69	71,71	71,80	72,00	70,75	98,26

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja utama adalah tercapainya angka usia harapan hidup dengan beberapa indikator pendukung sebagai berikut uraiannya:

Kesejahteraan penduduk selalu menjadi prioritas setiap negara ataupun daerah-daerah. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai kesejahteraan penduduk, bisa dari dimensi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia untuk melihat perkembangan dari ketiga dimensi tersebut. Ukuran standar tersebut dikenal dengan sebutan Indeks Pembangunan



Manusia (IPM). Di dalam IPM terdapat komponen Angka Lahir Hidup (AHH) sebagai indikator dari dimensi kesehatan.

Angka Lahir Hidup (AHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya. Semakin tinggi AHH yang diperoleh saat baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik. AHH sangat berhubungan erat dengan tingkat kesehatan bayi dan ibu, otomatis berkaitan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Seperti yang kita ketahui, Angka kematian dipengaruhi berbagai hal yang bisa menunjukkan keadaan suatu daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan

- **Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari target <math><10/1.00</math> kelahiran hidup terealisasi 8,41 per 1.000 kelahiran hidup, dengan angka riil bayi mati sebanyak 55 bayi dari 6.543 kelahiran hidup, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 118,40%.

Tahun 2014 Angka Kematian Bayi terealisasi 8.86/1000 KH, tahun 2013 sebesar 9,98/1.000 KH, tahun 2012 sebesar 11,40/1.000 KH, tahun 2011 mencapai angka 11,56/1.000 KH. Sedangkan Angka Kematian Bayi Tahun 2010 sebesar 12,38/1.000 kelahiran hidup. Ada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

AKB Propinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 27,23/1.000 kelahiran hidup, dan angka nasional AKB tahun 2015 sebesar 14/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding propinsi, nasional maupun target MDGs.

Meskipun dikatakan aman namun terjadinya kematian bayi menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi ibu. Peningkatan kematian bayi terjadi karena BBLR (berat bayi lahir rendah). Penanganan kasus BBLR oleh



tenaga kesehatan/bidan kurang maksimal karena bidan yang dilatih manajemen BBLR baru 10% dari jumlah bidan yang ada.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu tahun 2015 mencapai 76,42/100.000 Kelahiran Hidup. Angka riil kematian ibu tahun 2015 adalah 5 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.543 kelahiran. AKI tahun 2014 mencapai 118,17/100.000 KH, tahun 2013 mencapai 133,03/100.000 KH, tahun 2012 mencapai 95,01/100.000 KH, AKI tahun 2011 mencapai 105,17/100.000 KH, sedangkan tahun 2010 yang mencapai 128,38/100.000 KH. Ada penurunan AKI dari tahun 2013-2015.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding Angka Propinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 97,39/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) nasional hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup dan target RPJMN tahun 2015 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup.

Permasalahan dalam menurunkan AKI di Kabupaten Pacitan adalah belum semua tenaga bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN), tingkat pengetahuan dan ekonomi ibu hamil relatif rendah terutama di daerah pedesaan sehingga pengetahuan tentang bahaya kehamilan dan risiko tinggi pada kehamilan masih rendah, masih ada persalinan ditolong oleh dukun, minimnya sarana transportasi dari rumah ibu ke sarana pelayanan kesehatan sehingga sering terlambat mendapat pertolongan. Penanganan kasus kematian ibu dan bayi memerlukan upaya komprehensif yang memerlukan partisipasi dukungan dan kerjasama lintas sektor. Kematian ibu banyak juga dipengaruhi oleh faktor non kesehatan, dan penyakit yang diidap oleh ibu yang tidak berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Upaya penurunan AKI terus dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan



prasarana serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga. Salah satu kegiatan Desa Siaga sebagai upaya penurunan AKI AKB adalah melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dengan kegiatan penempelan stiker di rumah ibu hamil agar apabila ada kelainan pada ibu hamil/ibu risiko tinggi dapat segera diketahui. Diharapkan anggota keluarga, masyarakat, petugas kesehatan dapat mengetahui risiko ibu hamil sehingga selalu dalam kondisi SIAGA dalam ikut berperan menolong persalinan.

1. Angka Kematian Anak Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

AKABA Kabupaten Pacitan tahun 2015 sebesar 0,92/1.000 kelahiran hidup dari target 0,5/1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah riil 6 balita per 6.543 kelahiran hidup.

AKABA Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebesar 0,74/1.000 kelahiran hidup, tahun 2013 sebesar 1,20/1.000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebesar 0,68/1.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 0,26/1.000 kelahiran hidup, tahun 2010 sebesar 0,64/1.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 9,47/1.000 kelahiran hidup, dan angka nasional AKABA sebesar 40/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target nasional dan target MDGs untuk AKABA pada tahun 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding angka propinsi dan nasional serta sudah memenuhi target MDGs.

Upaya yang dilakukan dalam menekan AKABA di Kabupaten Pacitan adalah peningkatan penanganan penyakit penyerta anak balita, terbentuknya kelas ibu balita sehingga meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang kasus penyakit pada balita sehingga ibu cepat mencari pertolongan/pencegahan, peningkatan peran aktif kader posyandu posyandu dalam kegiatan pelayanan anak balita.



2. Usia Harapan Hidup

Target AHH Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 71,8 tahun dan dapat terealisasi 71,8 tahun. Sedangkan AHH tahun 2013 adalah 71,71 tahun, tahun 2012 adalah 71,69 tahun, tahun 2011 adalah 71,48 tahun, sedangkan AHH Kabupaten Pacitan Tahun 2010 yaitu 71,26 tahun. Sedangkan pada tahun 2015 dari target AHH 72 tahun terealisasi 70,75 tahun. Hal ini terjadi karena perubahan metode perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga secara menyeluruh ada penurunan level angka harapan hidup serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan metoda baru dibandingkan metoda lama.

Angka Harapan Hidup Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 70,37 tahun sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia pada tahun 2013 adalah 70,07 tahun. AHH Kabupaten Pacitan sudah lebih tinggi dibandingkan AHH Propinsi Jawa Timur dan Nasional.

Angka ini diharapkan dapat mencerminkan derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan orang yang derajat kesehatannya buruk. Usia Harapan Hidup tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan namun kesehatan mempunyai peranan penting terhadap panjang pendek umur seseorang.

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari target <1% jumlah balita, realisasinya 0,25% sehingga capaian kinerjanya 180%. Jumlah riil balita gizi buruk ada 67 anak dari 27.267 anak balita yang ditimbang. Pada tahun 2014 realisasinya 0,31%, tahun 2013 realisasi 0,03%, tahun 2012 realisasi 0,14%, tahun 2011 realisasi 0,14%. Sedangkan jumlah



balita gizi buruk tahun 2010 ada 34 anak atau prevalensinya 0,13%. Partisipasi masyarakat yang memiliki balita untuk datang dan menimbang balitanya ke posyandu (D/S) masih dibawah target 80% yaitu baru mencapai 78,53% dari jumlah balita yang ada, sedangkan angka D/S Jawa Timur tahun 2014 adalah 80,32%. Meski prevalensi gizi buruk pada posisi aman tetapi perlu diwaspadai karenanya penemuan kasus balita gizi buruk masih perlu dimaksimalkan, karena memungkinkan adanya balita gizi buruk yang belum tercover pelayanan kesehatan karena tidak pernah datang ke posyandu.

Kasus gizi buruk di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,4%. Prevalensi gizi buruk secara nasional pada tahun 2014 sebesar 5,3% sedangkan standar WHO (World Health Organization) adalah $\leq 5\%$, berarti kondisi di Kabupaten Pacitan masih dibawah angka propinsi dan nasional serta sesuai dengan standar WHO

- **Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan**

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk.

Target cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2015 adalah 100% realisasinya juga mencapai 100% karena dari 67 balita gizi buruk yang ditemukan seluruhnya mendapat penanganan sesuai standar. Semua balita gizi buruk (berat badan sangat kurus) sudah mendapat perawatan sesuai standar dari tenaga kesehatan. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena semakin gencarnya kegiatan penemuan dari petugas gizi dan kader posyandu untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk. Kegiatan pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas gizi Puskesmas, peningkatan surveilans dan kegiatan bulan timbang merupakan upaya penemuan kasus gizi buruk secara dini yang cukup efektif. Meski penanganan sudah 100% kasus tetapi masih terjadi permasalahan dalam penanganan balita gizi buruk sebagai berikut : Belum maksimalnya penanganan gizi buruk karena tidak semua balita gizi buruk mendapatkan pelayanan rawat inap baik di puskesmas maupun di rumah sakit sesuai dengan tatalaksana yang



ditentukan. Belum maksimalnya peran petugas dalam melaksanakan surveilans epidemiologi pelacakan gizi buruk.

Upaya pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan adalah optimalisasi kerjasama program penanganan gizi buruk melalui pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, memaksimalkan penganggaran dana puskesmas untuk penanganan balita gizi buruk dan bumil KEK.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan perawatan pada balita gizi buruk antara lain Pemberian Makanan Tambahan (MP-ASI), pengobatan penyakit penyerta, melakukan rujukan keluar daerah, pemantauan perkembangan BB rutin setiap bulan, pengembangan Program Orang Tua Asuh Gizi Buruk, pengembangan Panti Pemulihan Gizi Buruk, Penyuluhan dan KIE, Pemberdayaan masyarakat serta kerjasama sektor terkait dan swasta. Kegiatan Panti Pemulihan Gizi Buruk/CFC (*Community Feeding Centre*) merupakan pengembangan program gizi inovatif untuk mengatasi masalah gizi buruk balita dengan memanfaatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Diluncurkan pertama kali di Desa Ledok Lor Puskesmas Sukorejo. Kegiatan ini sudah dikembangkan dan diduplikasi di Puskesmas Gemaharjo pada tahun 2011 dan di Puskesmas Kalak pada tahun 2012. Ke depan kegiatan ini perlu diterapkan di seluruh puskesmas Kabupaten Pacitan.

- **Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) baik rawat inap maupun rawat jalan.

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin tahun 2015 sebanyak 93.720 kunjungan dibandingkan jumlah seluruh masyarakat miskin sebanyak 201.976 jiwa atau sebesar 46,40%. Pada tahun 2014 realisasinya 39,05%, tahun 2013 realisasi cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin sebesar 50,07%, tahun 2012 sebesar 38,17%, tahun 2011 sebesar 34,65%.

Angka cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 41,99% dan angka nasional



sebesar 40,26% sehingga capaian di Kabupaten Pacitan lebih tinggi daripada capaian propinsi dan nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 (rumah sakit) baik rawat inap maupun rawat jalan.

Tahun 2015 target jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit adalah 2,4% dari seluruh maskin di Kabupaten Pacitan sedangkan jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit adalah yang berasal dari jumlah rujukan yang dilakukan puskesmas ke rumah sakit sebesar 10.386 kunjungan atau 5,14% dari seluruh maskin peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pacitan yaitu 201.976.

Capaian tahun 2014 sebesar 2,02%, tahun 2013 adalah 1,07%, tahun 2012 sebesar 2,08% dan tahun 2011 sebesar 0,98% maskin yang berobat ke rumah sakit.

Berarti ada peningkatan jumlah maskin Peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Dengan meningkatnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan maka pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan semakin meningkat.

Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 4,06% dari total maskin dan angka nasional sebesar 4,64% sehingga capaian Kabupaten Pacitan masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan nasional.



- Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari target 97% terealisasi sebesar 83,83% sehingga capaian kinerjanya 86,42%. Ini karena adanya pendataan ulang peserta KB Aktif di Kabupaten Pacitan. Perbedaan jumlah sasaran proyeksi pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan data capaian KB Aktif yang sekarang lebih rendah. Capaian indikator ini sudah melampaui target SPM, namun belum memenuhi target Renstra dan RPJMD Kabupaten Pacitan.

Cakupan peserta KB aktif tahun 2014 di Propinsi Jawa Timur sebesar 75,85% sedangkan angka nasional sebesar 74,87%. Berarti capaian di Kabupaten Pacitan lebih tinggi dibandingkan angka propinsi dan nasional.

Data keikutsertaan PUS sebagai peserta KB aktif semakin lama ada kecenderungan semakin meningkat karena PUS yang memilih menggunakan metode non MPKJ seperti pil, kondom, pantang berkala semakin banyak yang tercatat di petugas kesehatan melalui kader kesehatan di desa. Ini berarti peran serta masyarakat di bidang kesehatan semakin meningkat.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut adalah jumlah penduduk usia lanjut (>55 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia lanjut.

Capaian tahun 2015 sebesar 55,11% dari target RPJMD 21%. Angka riil lansia yang mendapat pelayanan kesehatan adalah 66.832 orang dibandingkan proyeksi jumlah lansia sebanyak 121.281 orang. Sedangkan capaian tahun 2014 adalah 37,72% dari target 20% sehingga capaian kinerjanya 188,60%.

Cakupan pelayanan kesehatan lansia di Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 45,32% sehingga capaian Kabupaten Pacitan sudah lebih baik dibanding capaian propinsi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu membuat program inovatif agar lansia aktif dalam kegiatan posyandu lansia. Meningkatnya capaian indikator ini didukung semakin aktif dan berkembangnya posyandu lansia di Kabupaten Pacitan



Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 13 (tiga belas) program, antara lain:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 7

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000	24.730.000	98,92	270.000
2	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000	24.497.650	97,99	502.350
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	37.475.650.000	41.196.491.983	109,93	(3.720.841.983)
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.929.747.200	1.919.004.798	99,44	10.742.402
5	Program Keluarga Berencana	1.522.042.848	1.492.968.025	98,09	29.074.823
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000	54.162.000	98,48	838.000
7	Program pelayanan kontrasepsi	235.000.000	235.000.000	100,00	-
8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.896.400.000	1.784.764.500	94,11	111.635.500
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	600.000.000	597.070.100	99,51	2.929.900
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	500.000.000	493.175.250	98,64	6.824.750
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28.728.897.135	24.917.058.860	86,73	3.811.838.275
12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	300.000.000	278.667.175	92,89	21.332.825
13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	286.500.000	266.177.000	92,91	20.323.000
Jumlah		73.579.237.183	73.283.767.341	99,60	295.469.842

Dari tabel capaian kinerja sasaran 7 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 7 tahun 2015 mencapai 97,97% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 7 yang pada tahun 2015 mencapai 99,60% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 295.469.842,00.



SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Sasaran “Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan” diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,38	0,41	0,41	0,53	0,43	0,41	95,35

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dengan indikator utama yaitu rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (%)

Rasio ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes, rumah bersalin dan balai pengobatan serta klinik swasta per jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Diharapkan sarana pelayanan kesehatan yang ada dapat terjangkau oleh masyarakat terutama di pedesaan.

Target tahun 2015 sebesar 0,43 terealisasi 0,42 per 1000 penduduk dengan capaian kinerja 97,67%. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pacitan adalah 227 unit sedangkan jumlah penduduk 550.986 jiwa. Terdiri 24 puskesmas, 54 puskesmas pembantu, 58 polindes, 77 poskesdes, 1 rumah sakit umum, 2 rumah sakit ibu dan anak, 2 balai pengobatan dan 9 klinik



swasta. Sehingga rasionya 1 sarana kesehatan melayani 2.427 penduduk. Semakin bertambahnya sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Pacitan menjadikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan

- **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Target nasional tahun 2014, rasio dokter spesialis adalah 10 per 100.000 penduduk, dokter umum 40 per 100.000 penduduk. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2015 masih sangat kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2015 jumlah dokter baik pemerintah maupun swasta sebanyak 135 orang, sedangkan jumlah penduduk 550.986 jiwa. Rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,25 dari target 0,2 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,00%. Terdiri dari 17 dokter spesialis, 99 dokter umum dan 19 dokter gigi. Rasio dokter spesialis per penduduk di Kabupaten Pacitan 1 dokter spesialis melayani 32.411 jiwa atau rasio 3,08 per 100.000 penduduk, 1 dokter umum melayani 5.565 jiwa atau rasio 17,97 per 100.000 penduduk dan 1 dokter gigi melayani 28.999 jiwa atau rasionya 3,45 per 100.000 penduduk.

Rasio dokter spesialis di Jawa Timur adalah 15,48 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 11,95 per 100.000 penduduk. Sedangkan jumlah tenaga medis di Indonesia yang memiliki STR tahun 2014 sebanyak 157.393 orang, dengan rincian 102.180 dokter umum, dan 26.896 dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 2.436 orang serta 25.881 dokter gigi. Rasio dokter sebesar 51,19 per 100.000 penduduk, dan rasio dokter gigi sebesar 11,23 per 100.000 penduduk.



Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kepada Badan Kepegawaian Daerah, tetapi sampai saat ini belum ada rekrutmen CPNS Daerah. Usulan penambahan tenaga dokter di puskesmas sebanyak 24 orang dokter umum, tiap puskesmas mendapat tambahan 1 orang dokter umum, sedangkan usulan untuk dokter gigi adalah 17 orang, masing-masing puskesmas memiliki 1 orang dokter gigi. Dasar usulan penambahan tenaga medis tersebut adalah : Dengan adanya penambahan puskesmas rawat inap menjadi 13 di tahun 2015 diperlukan dokter di puskesmas rawat inap minimal 3 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Untuk mendukung Program Puskesmas Siaga dengan UGD 24 jam diperlukan tenaga dokter umum minimal sejumlah 2 orang dan 1 orang dokter gigi untuk tiap Puskesmas Rawat Jalan

- **Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk.**

Standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang perawat melayani 850 penduduk, 1 orang bidan melayani 1.000 penduduk dan 1 orang perawat gigi melayani 3.300 penduduk. Target nasional 2014 rasio perawat sebesar 158 per 100.000 penduduk dan rasio bidan 100 per 100.000 penduduk.

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2015 dari target 1,36 terealisasi 1,36 per 1.000 penduduk dengan capaian kinerja 100%. Jumlah riil tenaga paramedis baik pemerintah maupun swasta sebanyak 749 orang bidan dan perawat. Rasio paramedis terhadap penduduk pada tahun 2015 adalah 1 orang paramedis melayani 736 penduduk.

Rasio tenaga bidan di Propinsi Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 36,08 orang per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat 65,73 per 100.000 penduduk. Sedangkan secara nasional pada tahun 2014 rasio perawat terhadap penduduk sebesar 94,07 per 100.000 penduduk dan rasio bidan sebesar 49,56 per 100.000 penduduk



- **Cakupan Puskesmas**

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai di tingkat kecamatan. Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan. Dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas yang ada dibandingkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pacitan target dan capaian pada tahun 2011-2015 sama yaitu 200% sehingga capaian kinerjanya 100%. Sampai saat ini jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan adalah 24 unit yang terdapat di 12 kecamatan sehingga di setiap kecamatan ada 2 puskesmas. Merujuk pada standar nasional Permenkes setiap puskesmas idealnya melayani 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan telah memadai, yaitu setiap puskesmas melayani 22.958 jiwa penduduk sehingga tidak ada penambahan puskesmas baru. Tahun 2014 jumlah puskesmas di Propinsi Jawa Timur sebanyak 960 unit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 38.529.481 jiwa maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 40.135, artinya setiap puskesmas melayani 40.135 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas di Indonesia tahun 2014 sebanyak 9.731 unit, dengan jumlah penduduk 252.124.458 jiwa maka rasio 1 : 25.909 yaitu setiap puskesmas melayani 25.909 penduduk

- **Cakupan Puskesmas Pembantu**

Cakupan Puskesmas Pembantu mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah perbandingan jumlah puskesmas pembantu yang ada dibagi jumlah desa/kelurahan se kabupaten. Target Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 adalah 32,16% terealisasi 31,58% sehingga capaian kinerjanya 98,20%. Sedangkan pada tahun 2015 ada perubahan status 1 unit bangunan Puskesmas Pembantu dialihfungsikan menjadi Poskesdes sehingga jumlah bangunan puskesmas pembantu berkurang menjadi 54 unit. Jumlah Puskesmas Pembantu saat ini adalah 54



unit tersebar di 12 kecamatan atau di 171 desa/kelurahan. Rasio Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan adalah 1 unit Pustu melayani 10.108 jiwa penduduk

- **Kunjungan Puskesmas/Visit Rate**

Visit rate (kunjungan puskesmas) di Kabupaten Pacitan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 target kunjungan puskesmas sebesar 70,19% terealisasi 85,75% dengan capaian kinerja 122,17%. Artinya sebanyak 85,75% penduduk di Kabupaten Pacitan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya selama tahun 2015, dengan angka riil 472.463 orang dari 550.986 jumlah penduduk. Visit Rate tahun 2014 target kunjungan puskesmas sebesar 70,19% terealisasi 76,25%. Tahun 2013 kunjungan puskesmas adalah 77,52%, tahun 2012 sebesar 70,19%, tahun 2011 sebesar 65,69%, sedangkan tahun 2010 sebesar 58,59%.

Kunjungan Puskesmas di Propinsi Jawa Timur tahun 2013 mencapai 65,55%, sehingga dapat dikatakan capaian Kabupaten Pacitan diatas angka propinsi.

Meningkatnya kunjungan puskesmas menandakan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan baik gedung puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan serta sarana transportasi puskesmas keliling. Semakin bertambah jumlah tenaga kesehatan bidan dan perawat yang menjangkau polindes dan poskesdes juga memberi andil terhadap peningkatan kunjungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

- **Prosentase puskesmas bersertifikat ISO**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yaitu melalui Puskesmas yang pelayanannya bersertifikasi ISO. Prosentase puskesmas berstandar ISO adalah jumlah puskesmas yang telah lolos standarisasi internasional (ISO) dibagi jumlah seluruh puskesmas. Sampai akhir tahun 2015 di Kabupaten Pacitan sudah ada 7 puskesmas yang bersertifikat ISO dari 24 puskesmas



yang ada sehingga realisasi kinerjanya adalah 29,17% dari target 20,83%. Capaian kinerja indikator ini adalah 140,04%. Sampai akhir tahun 2015 Puskesmas ISO adalah Puskesmas Punung, Ngadirojo, Kebonagung, Tulakan, Arjosari, Tegalombo dan Tanjungsari.

- **Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Tahun 2015 target rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan adalah 21,76‰ terelisasi sebesar 23,17‰ sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,48%. Jumlah posyandu tahun 2015 sebanyak 821 posyandu dan proyeksi jumlah balita ada 35.432 jiwa. Dengan rasio 1 : 43 artinya 1 posyandu melayani 43 balita.

Tahun 2014 target rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan adalah 21,76‰ terelisasi sebesar 21,79‰ sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,14. Jumlah posyandu tahun 2014 sebanyak 812 posyandu dan proyeksi jumlah balita ada 37.265 jiwa. Berarti rasio jumlah Posyandu dengan jumlah balita adalah 1 : 46 yang artinya 1 posyandu dimanfaatkan 46 balita.

Tahun 2013 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pacitan terelisasi sebesar 21,25‰, tahun 2012 sebesar 21,76‰, tahun 2011 sebesar 21,61‰.

Jumlah posyandu di Propinsi Jawa Timur sampai tahun 2014 adalah 46.179 unit dengan rasio posyandu per satuan balita di Propinsi Jawa Timur adalah 15,42 per 1.000 balita. Berarti rasio jumlah Posyandu dengan jumlah balita adalah 1 : 64 yang artinya 1 posyandu dimanfaatkan 64 balita. Sedangkan standar nasional untuk 1 posyandu melayani 80 balita, berarti angka di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi standar yang ditetapkan, lebih baik dari angka propinsi dan nasional.

Rasio Posyandu di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi target karena meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan posyandu serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak, sehingga jumlah Posyandu bertambah di lokasi yang belum ada. Harapannya agar masyarakat mudah menjangkau sarana pelayanan tersebut. Peningkatan kualitas Posyandu sebagai UKBM harus terus dijaga dan dilestarikan dengan penguatan kelembagaan posyandu melalui peningkatan



kinerja Pokjanal Posyandu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Selain itu adanya peningkatan kinerja dari para pengelola posyandu seperti kader posyandu melalui beberapa kegiatan antara lain mengikuti pelatihan peningkatan kinerja dan magang kader. Keberadaan petugas kesehatan di posyandu tidak dapat optimal tanpa peran aktif dari kader posyandu

- **Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit (%)**

Indikator Kinerja Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit pada awal periode tahun 2011 mencapai 8,45% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 10,44% dan diproyeksikan pada akhir tahun 2015 mencapai 9,30 % atau naik dan mencapai target RPJMD. Capaian kinerja ini pada tahun 2015 mencapai 112,26% dari target RPJMD tahun 2015 dengan dukungan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Maka capaian kinerja selama tahun 2015 jumlah pengunjung rumah sakit sebanyak 57.970 orang dengan proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan 555.970 orang hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit

- **Ambulan/mobil jenazah**

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (Ambulan / mobil jenazah pada awal periode tahun 2011 mencapai 37,50% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 66,67% dan diproyeksikan pada akhir tahun 2015 mencapai 75% Capaian kinerja tahun 2015 mencapai 88,89% dan diproyeksikan mencapai 75% dari target RPJMD tahun 2015 dengan dukungan kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara berkala terhadap mobil ambulance/ mobil jenazah.

Jumlah ambulance/Jenazah yang ada di RSUD Kabupaten Pacitan sebanyak 9 kendaraan, 6 kendaraan diantaranya dalam keondisi baik dan 3 kendaraan dengan kondisi rusak.

Pada indicator ini mengalami penurunan sebesar 11,11%. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan dengan kondisi rusak bertambah sedangkan jumlah keseluruhan dari kendaraan yang ada tidak bertambah.



- **Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor**

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor) pada awal periode tahun 2011 mencapai 26,32% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 69,57% dan diproyeksikan pada akhir tahun 2015 mencapai 68,42% atau naik dan mencapai target RPJMD. Capaian kinerja ini pada tahun 2015 mencapai 101,68% dan diproyeksikan mencapai 68,42% dari target RPJMD tahun 2015 dengan dukungan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan kegiatan dan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Kegiatan Penambahan rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas 1, II, dan III) dengan output tersedianya ruang rawat inap VIP dan perlengkapannya (AC, genset, lift, water heater, MATV, sound system, CCTV, dan alat komunikasi)
- Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dengan output tersedianya ruang rawat inap kelas III

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 26,32% sampai dengan tahun 2015 mencapai 69,57% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 68,42 % sehingga indicator ini tercapai 101, 68 %. Kondisi ruangan yang ada di rumah sakit sebanyak 23 ruang, 7 ruangan diantaranya dalam kondisi rusak.

- **Peralatan pelayanan kesehatan**

Indikator Kinerja Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (Peralatan pelayanan kesehatan) pada awal periode tahun 2011 mencapai 80,19% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 85,33% atau naik dan mencapai target RPJMD. Capaian kinerja ini pada tahun 2015 mencapai 100,75% dan diproyeksikan mencapai 85,33% dari target RPJMD tahun 2015 dengan dukungan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan Kegiatan dan output



yang dihasilkan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (BK), dengan output tersedianya Alat Kesehatan / Kedokteran Rumah Sakit.
- Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, Pengadaan Alat Kesehatan dan/atau Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien, dengan output tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 80,19% sampai dengan tahun 2015 mencapai 85,97% sedangkan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 85,33 %, sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 100,75 %.

Jumlah peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis pada tahun 2015 sebanyak 770 unit, 662 unit diantaranya dalam kondisi baik.

- **Karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun**
Indikator karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun dengan realisasi sebesar 44,42 % dari target 2015 sebesar 25%. Capaian kinerja ini pada tahun 2015 mencapai 44,42 dan diproyeksikan mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015 dengan dukungan program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis serta pendidikan dan pelatihan sumber daya rumah sakit dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :
 - Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan
 - Terlaksananya kegiatan outbond team work akreditasi Rumah SakitMaka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 21,31% sampai dengan tahun 2015 mencapai 44,42% dari target 25 % sehingga indikator ini telah tercapai sebesar 177,68 %. Jumlah karyawan yang ada di rumah sakit pada tahun 2015 sebanyak 493 orang sedangkan karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun sebanyak 219 orang.



Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, antara lain:

Tabel III.18.

Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 8

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	230.000.000	229.501.760	99,78	498.240
2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16.571.446.250	16.393.595.898	98,93	177.850.352
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	16.124.420.150	15.630.686.418	96,94	493.733.732
Jumlah		32.925.866.400	32.253.784.076	97,96	672.082.324

Dari tabel capaian kinerja sasaran 8 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 8 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 8 tahun 2015 mencapai 95,35% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 8 yang pada tahun 2015 mencapai 97,96% akan tetapi masih terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 672.082.324,00.



TUJUAN 5:

“MEMPERMUDAH AKSES PENDIDIKAN”

SASARAN STRATEGIS 9

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sasaran “Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan” diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan guna pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat. Pencapaian sasaran “Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil							
	SD/MI	100	100	100	100	100	100	100,00
	SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100,00
Rata-rata capaian indikator sasaran 9								100,00

Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan dengan indikator utama yaitu tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km



untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil telah tercapai 100% sehingga penduduk di seluruh wilayah dapat mengakses pendidikan setingkat SD/MI maupun SMP/MTs tanpa harus ke kota, capaian ini juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- **Fasilitas Pendidikan**

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 95,98%, 94,71%, dan 92,81% atau mencapai 100,23% untuk SD/MI, 100,64% untuk SMP/MTs, 100,23 untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 95,76% untuk SD/MI, 94,11% untuk SMP/MTs, dan 92,6% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 95,98% untuk SD/MI, 94,71% untuk SMP/MTs, dan 92,81% untuk SMA/SMK/MA atau 2.978 ruang kelas SD/MI, 904 ruang kelas SMP/MTs, 543 ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik dan mengalami kenaikan sebesar 4,61% untuk SD/MI, 1,37% untuk SMP/MTs, dan 1,6% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan ruang kelas**

Indikator ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs adalah 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pembangunan ruang kelas baru dan sehab sedang/berang ruang kelas.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% untuk SD/MI dan SMP/MTs atau 420 SD/MI, 123 SMP/MTs sudah memenuhi indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 5,58% untuk SD/MI dan 6,56% untuk SMP/MTs apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan Alat praktek IPA**

Indikator ketersediaan alat praktek IPA adalah 78,86% atau mencapai 78,86% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan alat praktek dan peraga siswa.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 78,86% atau 97 SMP/MTs



mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 11,65% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan Mebelair ruang guru**

Indikator ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs adalah 100% dan 97,56% atau mencapai 100% dan 97,56% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD untuk jenjang SD/MI dan hampir mencapai target untuk jenjang SMP/MTs. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan meubelair sekolah.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% untuk SD/MI dan 97,56% SMP/MTs atau 520 SD/MI, 120 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 28,46% untuk SD/MI dan 10,87% untuk SMP/MTs apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

- **Ketersediaan Ruang Kepala Sekolah**

Indikator ketersediaan ruang kepala sekolah adalah 86,99% atau mencapai 86,99% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pembangunan ruang guru.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 86,99% atau 107 SMP/MTs mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 5,84% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan Laboratorium**

Indikator ketersediaan laboratorium SMP/MTs adalah 80,49% atau mencapai 80,49% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pembangunan ruang laboratorium dan pengadaan meubelair.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 80,49% atau 99 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 19,83% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

- **Ketersedian buku SD/MI**

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 91,54% atau mencapai 91,54% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 91,54% atau 476 SD/MI sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 7,5% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya,

- **Ketersediaan buku SMP/MTs**

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 87,80% atau mencapai 87,80% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 87,80% atau 108 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 7,37% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan alat peraga IPA SD/MI**

Indikator rencana pengembangan kurikulum adalah 94,81% atau mencapai 94,81% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan alat peraga oleh sekolah melalui dana BOS.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 94,81% atau 493 SD/MI sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 14,43% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan buku pengayaan dan referensi**

Indikator ketersediaan buku pengayaan dan referensi SD/MI dan SMP/MTs adalah 86,92% dan 87,80% atau mencapai 86,92% untuk SD/MI dan 87,80% untuk SMP/MTs dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengadaan buku oleh sekolah melalui dana BOS

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 86,92% untuk SD/MI dan 87,80% untuk SMP/MTs atau 452 SD/MI, 108 SMP/MTs sudah mencapai indikator ini dan mengalami kenaikan sebesar 5,77% untuk SD/MI dan 17,21% untuk SMP/MTs jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat**

Indikator jumlah kunjungan taman bacaan masyarakat adalah 104.232 atau mencapai 101,01% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah



mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 103.187. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi budaya baca. Selain itu kenaikan ini didukung dengan semakin banyaknya kunjungan ke Rumah Pintar dan terkelolanya rumah pintar mini yang dikelola swadaya oleh masyarakat.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 104.232 dan mengalami kenaikan sebesar 4.986 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 9

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.988.904.893	20.624.854.774	98,27	364.050.119
2	Program Pendidikan Menengah	12.008.159.438	11.930.335.848	99,35	77.823.590
3	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	180.660.000	174.582.000	96,64	6.078.000
Jumlah		33.177.724.331	32.729.772.622	98,65	447.951.709

Dari tabel capaian kinerja sasaran 9 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 9 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 9 tahun 2015 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 9 yang pada tahun 2015 mencapai 98,65% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 447.951.709,00.



SASARAN STRATEGIS 10

**Penyelenggaraan Pendidikan
Yang Terjangkau**

Sasaran “Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau” diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan guna pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran **“Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau”** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 10 :

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Angka rata-rata lama sekolah	6,94	6,99	6,95	7,06	7,08	7,27	102,68

Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya pendidikan yang terjangkau dengan indikator utama angka rata-rata lama sekolah dapat tercapai 7,27 tahun dengan angka capaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. capaian ini juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Angka Rata-rata lama sekolah

Indikator ini mengindikasikan lama penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun ,2015 adalah 727 tahun atau mencapai 102,68% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 7,08%. Hal ini dapat diartikan rata-rata agregat penduduk Kabupaten Pacitan adalah hanya mengenyam pendidikan formal hingga lulus SMP kelas 1. Meskipun sudah banyak penduduk yang sudah bersekolah hingga jenjang pendidikan menengah bahkan Perguruan Tinggi tapi proporsinya lebih kecil bila dibandingkan dengan mereka yang lulus sekolah dasar. Hal ini tak lepas dari peran serta Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui beberapa kegiatannya antara lain pelatihan kecakapan hidup, penyelenggaraan



kegiatan kejar paket B dan C, serta rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun. Selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa timur juga ikut berperan dalam peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan melalui dana dekonsentrasi ataupun dana blockgrant.

- **Angka Partisipasi Kasar**

Capaian kinerja program ini dapat dilihat dari APK SD/MI/Paket A, APM SD/MI/ Paket A, APK SMP/MTs/Paket B dan APK SMA/MA/SMK.

Realisasi APK SD/MI/Paket A pada tahun 2015 adalah 101,12% atau mencapai 100,02% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 103,10%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dapat terealisasi sebesar 97,91% dari target yang ditetapkan sebesar 97,83% dan mengalami kenaikan sebesar 0,46% dari tahun lalu yaitu 97,45%.

Untuk indikator APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2015 adalah 98,62% atau mencapai 100,63% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 98%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 98,62% atau 24.920 siswa SMP/MTs/paket B dibagi 25.269 penduduk usia 13-15 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,71% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Ketercapaian target tahun 2015 ini didukung dengan adanya penambahan lembaga baru SMK dan penambahan ruang kelas pada lembaga SMA/SMK. Dengan adanya pengembangan lembaga SMK dan penambahan ruang kelas tersebut secara langsung dapat meningkatkan daya tampung peserta didik di jenjang pendidikan menengah sehingga penduduk usia sekolah (16 s.d 18 tahun) dapat mengenyam pendidikan menengah. Peningkatan daya tampung secara langsung akan mengakibatkan APK dan APM Pendidikan Menengah meningkat. Peningkatan APK dan APM Pendidikan Menengah juga menunjukkan bahwa rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun



telah mendapat respon positif dari masyarakat yaitu masyarakat yang telah menyadari pentingnya pendidikan lanjutan (Pendidikan Menengah) setelah pendidikan dasar bagi masa depan anak mereka terutama jenjang pendidikan kejuruan.

Kenaikan APK Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan terbukti telah berperan aktif dalam pemantapan program penuntasan wajar dikdas 9 tahun yang bermutu dan dapat menjangkau semua penduduk usia sekolah (7 s.d 15 th) dan mulai merintis pendidikan menengah 12 tahun. Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran serta masyarakat terhadap program penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan rintisan pendidikan menengah 12 tahun yang secara tidak langsung menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi untuk kepentingan jangka panjang anak – anak mereka.

Indikator APK SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2015 adalah 71,54% atau mencapai 102,04% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 70,11%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah, bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan meningkatnya daya tampung pendidikan menengah.

- **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi anak sekolah usia sekolah yang menempuh pendidikan baik itu jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK.

Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2015 adalah 99,03% atau mencapai 100,07% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 98,96%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 99,03% atau 44.175 siswa SD/MI/Paket A berusia 7-12 tahun dibagi dengan 44.608 penduduk usia 7-12 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2015 adalah 85,14% atau mencapai



100,83% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 84,44%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah dan bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 85,14% atau 21.514 siswa SMP/MTs/paket B berusia 13-15 tahun dibagi dengan 25.269 penduduk usia 13-15 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,91% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2015 adalah 60,44% atau mencapai 102,72% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 58,84%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah, bertambahnya kuota untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan meningkatnya daya tampung pendidikan menengah.

- **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Indikator APK PAUD pada tahun 2015 adalah 63,02% atau mencapai 115,95% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 54,35%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan beberapa bantuan sosial/ hibah/ bantuan keuangan antara lain pembangunan gedung, pengadaan peralatan edukatif (APE dalam dan luar), serta sarana dan prasarana lainnya. Pemerintah Kabupaten Pacitan secara konsisten telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dengan memberikan bantuan insentif terhadap tenaga pendidik PAUD setiap bulannya.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 63,02% atau 32.499 siswa PAUD dibagi dengan 51.569 penduduk usia 0-6 tahun dan mengalami kenaikan sebesar 5,17% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan, khususnya akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui APBD Kabupaten cukup memberikan kontribusi terhadap perkembangan Pendidikan Anak usia Dini yaitu melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan beberapa bantuan sosial/ hibah/ bantuan keuangan antara lain pembangunan gedung, pengadaan



peralatan edukatif (APE dalam dan luar), serta sarana dan prasarana lainnya. Pemerintah Kabupaten Pacitan secara konsisten telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dengan memberikan bantuan insentif terhadap tenaga pendidik PAUD setiap bulannya.

Selain itu Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan melalui dana dekonsentrasi yang cukup besar terhadap peningkatan mutu peserta didik di lembaga PAUD antara lain berupa Unit Gedung Baru PAUD Terpadu, Pusat Kegiatan Guru PAUD, bantuan motivasi penyelenggaraan PAUD, Bantuan PAUD Berbasis Parenting, BOP PAUD, Bantuan organisasi mitra PAUD, Rintisan kelompok Bermain dan Pengadaan APE. Dengan adanya peningkatan sarana prasarana di lembaga PAUD dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD maka secara tidak langsung dapat meningkatkan ketercapaian APK PAUD di Kabupaten Pacitan. Peningkatan capaian APK PAUD tidak terlepas dari telah meratanya akses PAUD di Kabupaten Pacitan yaitu tersebarnya lembaga Kelompok Bermain (397 lembaga), Tempat Penitipan Anak (12 lembaga), Satuan PAUD Sejenis (216 lembaga) dan Taman Kanak-Kanak (295 lembaga) di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama tentang pentingnya penanganan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan periode emas dalam kehidupan mereka mendapat dukungan positif dari masyarakat baik berupa pendirian lembaga PAUD secara swadaya ataupun dengan menyekolahkan anak mereka usia 0-6 tahun di lembaga PAUD. Pada tahun berikutnya capaian APK PAUD dan mutu PAUD di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat meningkat melalui Pendirian PAUD Holistik Terintegratif serta peningkatan kompetensi pendidik PAUD di Kabupaten Pacitan melalui pelatihan-pelatihan, workshop baik yang diselenggarakan di Kabupaten Pacitan ataupun di Propinsi Jawa Timur.



- Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator aspek pelayanan pendidikan yang lain adalah angka putus sekolah. Indikator angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 0%, 0,19%, dan 0,22% atau mencapai 100% untuk SD/MI, 99,99% untuk SMP/MTs, 99,88 untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 0% untuk SD/MI, 0,09% untuk SMP/MTs, dan 0,1% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah (Rp.800.000,00/siswa/tahun untuk SD/SDLB, Rp.1.000.000,00/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/ SMPT, Rp. 1.200.000/siswa/tahun untuk SMA/SMK/MA), bantuan Gerakan Orang Tua Asuh, Beasiswa Siswa Miskin SD (Rp.450.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMP (Rp.750.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (Rp.1.000.000,00/siswa/tahun) bantuan pendidikan program grindulu mapan.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 5 (lima) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 10

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.430.000.000	1.422.285.550	99,46	7.714.450
2	Program Pendidikan Non Formal	484.493.900	470.545.500	97,12	13.948.400
3	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000	90.351.000	90,35	9.649.000
Jumlah		2.014.493.900	1.983.182.050	98,45	31.311.850

Dari tabel capaian kinerja sasaran 10 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 10 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 10 tahun 2015 mencapai 102,68% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 10 yang pada tahun 2015 mencapai 98,65% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 31.311.850,00.



TUJUAN 6:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN”

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Sasaran “**Meningkatnya Pelayanan Pendidikan**” diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas hasil anak didik. Pencapaian kinerja sasaran “Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 11

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Angka Melek Huruf	91,6	91,62	92,44	92,69	91,65	92,83	101,29
2.	Angka kelulusan							
	SD/MI	100	100	99,4	100	100	100	100,00
	SMP/MTs	100,09	99,46	99,83	99,34	99,92	100	100,08
	SMA/SMK/MA	99,78	99,87	99,87	99,99	99,9	99,99	100,09
Rata-rata capaian indikator sasaran 6								100,36

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dengan indikator utama angka melek huruf dan angka kelulusan siswa yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Angka melek huruf

Indikator ini dapat mengindikasikan kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau yang lainnya yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Indikator angka melek huruf pada



tahun 2015 adalah 92.83% atau mencapai 101,29% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 91,65%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Pacitan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 92,83% atau 424.343 dari 457.118 penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf dan mengalami kenaikan sebesar 0,14% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis masyarakat Pacitan baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, sehingga diharapkan yaitu beberapa beberapa kegiatannya yaitu penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Pacitan. Selain Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga berperan terhadap peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Pacitan yaitu melalui dana dekonsentrasi/ blockgrant dan dana bantuan keuangan khususnya.

- **Angka Kelulusan**

Indikator angka kelulusan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 100%, 100%, dan 99,99% atau mencapai 100% untuk SD/MI, 100,08% untuk SMP/MTs, 100,09% untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 100% untuk SD/MI, 99,92% untuk SMP/MTs, dan 99,9% untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah (Rp.800.000,00/siswa/tahun untuk SD/SDLB, Rp.1.000.000,00/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/ SMPT, Rp. 1.200.000/siswa/tahun untuk SMA/SMK/MA), bantuan Gerakan Orang Tua Asuh, Beasiswa Siswa Miskin SD (Rp.450.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMP (Rp.750.000,00/siswa/tahun), Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK (Rp.1.000.000,00/siswa/tahun) bantuan pendidikan program grindulu mapan.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% untuk SD/MI, 100% untuk SMP/MTs, dan 99,99% untuk SMA/SMK/MA atau 8.127 siswa SD/MI, 7.447 siswa SMP/MTs, 5.247 siswa SMA/SMK/MA lulus dan mengalami kenaikan sebesar 0% untuk SD/MI, 0,66% untuk SMP/MTs, dan 0% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

- **Nilai rata-rata ujian nasional**

Indikator nilai rata-rata ujian nasional untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 7,52, 7,36, dan 7,78 atau mencapai 103,01% untuk SD/MI, 101,09% untuk SMP/MTs, dan 106,86% untuk SMA/SMK/MA dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 7,3 untuk SD/MI, 7,28 untuk SMP/MTs, dan 7,28 untuk SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pemberian hadiah untuk semua juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih giat. Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 7,52 untuk SD/MI, 7,36 untuk SMP/MTs, dan 7,28 untuk SMA/SMK/MA dan mengalami kenaikan sebesar 0,06% untuk SD/MI, 0,15% untuk SMP/MTs, dan 0,17% untuk SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Angka Melanjutkan**

Indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2015 adalah 100,27% dan 80,22% atau mencapai 100,33% dan 104,67% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 99,94% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 76,64% untuk SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pemberian bantuan pendidikan untuk siswa miskin baik dari dana APBD, APBD propinsi, dan APBN.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100,27% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 80,22% SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dan mengalami kenaikan sebesar 0,04% untuk SD/MI ke SMP/MTs dan 0,65% untuk SMP/MTs ke SMA/SMK/MA apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selain indikator APK dan APM peningkatan respon masyarakat terhadap pendidikan menengah dapat dilihat dari angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK yang telah mencapai angka capaian 79,57%. Capaian ini sudah mencapai target RPJMD yaitu 75,13% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 1,3%. Pada tahun ini minat peserta didik lulusan SMP/MTs untuk



melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMK semakin meningkat, karena peserta didik selain diberikan wawasan pendidikan umum seperti di SMA, di SMK juga dibekali dengan program keahlian khusus yang nantinya akan bermanfaat sebagai bekal hidup di dunia kerja sehingga lulusan SMK langsung bisa bekerja di dunia usaha/wiraswasta. Selain itu peningkatan angka melanjutkan juga didukung dengan adanya Program Bantuan Khusus Siswa Miskin di tingkat pendidikan menengah yang ternyata terbukti dapat meningkatkan minat masyarakat miskin untuk tetap menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan menengah (biaya sekolah relatif lebih terjangkau).

Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen untuk lebih meningkatkan upaya rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun melalui penambahan lembaga SMK baru sehingga diharapkan di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan minimal memiliki 1 lembaga SMK. Dengan tersebarnya lembaga SMK di 12 Kecamatan dan dengan konsistennya bantuan khusus siswa miskin di SMA/MA/SMK diharapkan APK, APM dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dapat meningkat.

- **Cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup**

Indikator cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup adalah 0,462% atau mencapai 106,45% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 0,434%. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 0,462% untuk dan mengalami kenaikan sebesar 0,019% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

- **Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan**

Indikator cakupan masyarakat terlayani pendidikan kecakapan hidup adalah 47,24% atau mencapai 104,97% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 45%.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 47,24% untuk dan mengalami kenaikan sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



- Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat

Indikator jumlah kunjungan taman bacaan masyarakat adalah 104.232 atau mencapai 101,01% dari target RPJMD tahun 2015. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 103.187. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi budaya baca. Selain itu kenaikan ini didukung dengan semakin banyaknya kunjungan ke Rumah Pintar dan terkelolanya rumah pintar mini yang dikelola swadaya oleh masyarakat.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 104.232 dan mengalami kenaikan sebesar 4.986 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 2 (dua) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 11

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.450.000.100	1.438.725.000	99,22	11.275.100
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.745.000.000	1.713.600.225	98,20	31.399.775
Jumlah		3.195.000.100	3.152.325.225	98,66	42.674.875

Dari tabel capaian kinerja sasaran 11 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 11 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 11 tahun 2015 mencapai 100,36% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 11 yang pada tahun 2015 mencapai 98,66 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 42.674.875,00.



TUJUAN 7:

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN OPTIMALISASI POTENSI WILAYAH

SASARAN STRATEGIS 12

Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah

Sasaran “Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah” diarahkan untuk meningkatkan mewujudkan pusat-pusat ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pencapaian kinerja sasaran “**Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	1	1	1	2	2	4	200,00

Tercapainya sasaran terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah dengan indikator utama Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif

Indikator Kinerja Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif sebesar 200% atau mencapai 4 Unit dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 4 unit dan mengalami peningkatan sebesar 2 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) pada tahun 2015 sebesar 12.5% atau mencapai 125% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 12.5% atau 10 Kelompok dan mengalami peningkatan sebesar 2.5% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun

Capaian Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun dihasilkan dari jumlah pameran/ expo produk unggulan yang diikuti pada tahun 2015 sebanyak 8 kali dibandingkan dengan target jumlah pameran /expo produk unggulan dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 8 kali . Capaian kinerja Jumlah pameran/expo produk unggulan dilaksanakan pada tahun 2015 mencapai 8 kali pelaksanaan sama dengan target RPJM 2015 sebesar 8 kali

Jumlah pameran/ ekspo produk unggulan yang dilaksanakan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan pada tahun 2015 yaitu:

1. Pameran Produk Unggulan Daerah DI Alun – Alun Kab.Pacitan Alun – Alun Kab.Pacitan Tgl 16 s/d 20 Agustus 2015
2. GKPD (Gelar produk Khas daerah) EXPO 2015 Batam Tgl 13 s/d 16 Mei 2015
3. Semarang Tourism and Craft Expo 2015 Semarang Jawa Tengah Tgl 5 s/d 7 Nopember 2015
4. Pameran produk unggulan pada Hari Koperasi ke 68 Tahun 2015 Tuban Jawa Timur 15 – 17 Juni 201
5. Pameran Batik, Bordir dan Asesoris Fair 2015 Grand city Surabaya Tgl 13 s/d 17 Mei 2015
6. Pameran Pesta Rakyat dan Pentas Seni Tahun 2015 madiun Tgl 29 Oktobet s/d 1 Nopember 2015



7. Pameran SMESCO Festival 2015 Jakarta Convention Center (JCC) Tgl 3 September s/d 04 Oktober 2015
8. Expo Koperasi dan UMKM ke 3 Grand City Surabaya Tgl 12 Nopember 2015

Selain pameran tyersebut ada juga bebertapa pameran yang diikuti oleh unit kerja antara lain:

1. Pameran APKASI Jakarta Tanggal 11s/d17 Mei 2015
2. Pameran BALI TOURIST,TRADE,and INVESTMENT EXPO Bali, TTI Expo 30 September s/d 04 November 2015
3. Pameran INVESTASI & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) "INAVES 2015" Mall The Park SOLO 12 s/d 15 November 2015
4. Pameran Inovasi Pelayanan Publik Gelora Delta Sidoarjo 14 s.d 16 Juni 2015
5. Pameran Produk Unggulan Daerah Pasuruan, Jawa Timur Puncak BBGRM dan HKG PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur 04 – 06 Mei 2015

- Pasar daerah dalam kondisi baik (%)

Sampai dengan akhir Tahun 2015 Pasar Daerah dalam kondisi baik mencapai 80.25% hal ini karena komitmen dari pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi dalam pembenahan secara bertahap tentang kondisi pasar daerah.

Database Pasar Daerah dan UMKM di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	19	20	20	19
2	Jumlah pasar tradisional	Unit	21	21	21	37	37	32
3	Jumlah pedagang yang mempunyai SIUP/ TPD/ SITU							
	• Pedagang Kecil	Orang	4.120	4.797	5.661	6.319	7.163	7.463
	• Pedagang Menengah	Orang	416	442	487	541	604	675
	• Pedagang Besar	Orang	69	63	64	64	65	65



- Pertumbuhan Industri (%)

Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri (%) pada tahun 2015 sebesar 3.95% atau mencapai 195% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui peningkatan SDM bagi pelaku industri Kecil Menengah
- Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi Industri Kecil Menengah
- Monitoring Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 3.95% dan mengalami peningkatan sebesar 145% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Cakupan bina kelompok pengrajin (%)

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pengrajin (%) atau mencapai 81.27% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan adanya persyaratan bahwa kelompok IKM yang difasilitasi sarana Produksi harus mempunyai Akta Badan Hukum dari Kemenkum HAM

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui peningkatan SDM bagi pelaku industri Kecil Menengah
- Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan,



mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi Industri Kecil Menengah

- Monitoring Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 3.95% dan mengalami penurunan sebesar 1.65% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)

Indikator Kinerja Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit) mencapai 11.347 Unit dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan pengembangan industri kecil menengah dan Program pengembangan sentra sentra industri potensial dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui peningkatan SDM bagi pelaku industri Kecil Menengah
- Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi Industri Kecil Menengah
- Monitoring Industri Kecil Menengah

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 11.347 unit dan mengalami peningkatan sebesar 430 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Indikator Kinerja Jumlah Investor berskala nasional (PMDN / PMA) pada tahun 2015 sebanyak 129 investor Dalam Negeri (PMDN) dari target RPJMD tahun 2015 sebanyak 114 investor, atau mencapai 113,15 %, capaian tersebut melampaui target RPJMD tahun 2015. Kegiatan ini dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terhadap Penanam Modal yang



mengajukan izin Usaha dengan nilai investasi minimal Rp 200.000.000,00 untuk diinvestasikan di Kabupaten Pacitan,

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Fasilitasi dan koordinasi di bidang Investasi* dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terfasilitasinya Investor yang berminat melakukan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Pacitan;
- Terfasilitasinya Pelayanan nonperizinan berupa informasi potensi dan peluang investasi,
- Terfasilitasinya pelayanan perizinan yang diajukan investor ;

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 113,15 % atau 129 investor (PMDN) yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Pacitan , dan mengalami peningkatan sebesar 13,15 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Nilai Realisasi Investasi (trilyun)

Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2015 sebesar Rp 0,693 trilyun dari target RPJMD tahun 2015 sebesar Rp. 2,60 trilyun, atau mencapai 26,65 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut tidak mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan menurunnya realisasi investasi pemerintah pusat untuk pembangunan PLTU dan JLS pada 3 tahun terakhir.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Manajemen Investasi Daerah* dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terealisasinya nilai investasi swasta yang melakukan kegiatan Penanaman Modal;
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan; dan
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Pacitan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 26,65 % atau 0,693 trilyun, dan mengalami peningkatan sebesar 26,69 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



Data Nilai Investasi Kabupaten Pacitan s/d tahun 2015

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nilai Investasi	Rp. 000	3.156.867.868	3.500.576.666	2.442.591.046	82.911.267	547.920.113.026	693.846.020.000
2	Kegiatan Promosi Investasi	Kali	4	4	5	5	4	3
3	Jumlah Investor/ Unit Usaha	Unit	243	774	549	559	583	574
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1.169	3.684	1.998	1972	1.986	2.936

- Daya Serap Tenaga Kerja

daya serap tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 2.936 tenaga kerja meningkat sebanyak 950 tenaga kerja dibanding dengan tahun 2014. Peningkatan ini merupakan kontribusi dari pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang rata – rata menyerap jumlah tenaga kerja yang relatif kecil menunjukkan peningkatan yang signifikan. Disamping itu menurunnya daya serap tenaga kerja dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah bahwa Perusahaan / pemberi kerja wajib mendaftarkan dan menanggung sebagian premi pekerja sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal* dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal

- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)

Indikator Kinerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi pada tahun 2015 sebesar 26,69 % dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 6,9 % atau mencapai 386,81 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .Pencapaian ini dikarenakan adanya peningkatan nilai realisasi investasi swasta yang melakukan kegiatan penanaman Modal di Kabupaten Pacitan.



Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Peningkatan manajemen Investasi Daerah* dengan output yang dihasilkan adalah adanya kenaikan prosentase nilai realisasi PMDN.

Maka capaian kinerja kenaikan / penurunan nilai realisasi akhir tahun 2015 mencapai 26,69% atau mengalami kenaikan 26,79 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Indikator Kinerja Penyediaan Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2015 tersedia 2 informasi peluang usaha, atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .Pencapaian ini dilakukan melalui penyusunan profil potensi dan peluang investasi dengan peluang usaha unggulan yang di informasikan kepada masyarakat dunia usaha adalah Industri pengolahan kayu dan jasa pariwisata dan Perhotelan. Industri pengolahan kayu diinformasikan sebagai peluang usaha karena Pacitan memiliki potensi bahan baku yang cukup, sara prasarana yang memadai serta cukup tersedia tenaga kerja lokal. Sedang informasi peluang Usaha Pariwisata dan Perhotelan karena Pacitan memiliki destinasi wisata yang menjanjikan dan berpotensi terjadi peningkatan kunjungan baik wisata domestik luar kota maupun mancanegara.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi* dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya fasilitasi masyarakat dunia usaha untuk mendapatkan informasi peluang usaha
- Terlaksananya koordinasi kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal

Maka capaian kinerja tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau tersedia 2 informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



- Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional

Fasilitasi investasi dilakukan Untuk mendorong investasi, daerah dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan keputusan investasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 4 kali sedangkan realisasinya mencapai 5 kali

- Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten

Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional

Indikator Kinerja Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional pada tahun 2015 dilakukan 2 kali atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .Pencapaian ini dilakukan melalui fasilitasi antar pengusaha lokal terhadap kebutuhan bahan baku dan pengusaha besar dengan pengusaha lokal.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi* dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya fasilitasi antar pengusaha lokal
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal

Maka capaian kinerja Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau fasilitasi telah dilaksanakan 4 kali , dan capaiannya sama apabila



dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA**

Indikator Kinerja Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA pada tahun 2015 sebesar 100 %, dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .Pencapaian ini dilakukan melalui Penerbitan izin prinsip atas pengajuan permohonan PT Putra Tunas Subur dengan bidang usaha Industri Pengolahan Kayu.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Penatalaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu* dengan output yang dihasilkan adalah Ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai Standar Layanan Perizinan

Maka capaian kinerja Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau 1 dokumen izin prinsip atas pengajuan permohonan 1 Perusahaan, dan capaiannya sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Lama Proses Perizinan**

Indikator Kinerja lama proses perizinan pada tahun 2015 selama 5,20 hari kerja, dari target RPJMD tahun 2015 selama 5,23 hari atau mencapai 100,57% dari target RPJMD, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015. Kegiatan ini dicapai melalui peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan, dan meningkatkan koordinasi dengan tim teknis

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Penatalaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu* dengan output yang dihasilkan adalah ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standart pelayanan.

Maka capaian kinerja lama proses perizinan akhir tahun 2015 mencapai 100,57% atau 5,20 hari kerja, dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha (dokumen)**

Indikator Kinerja Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha



(dokumen) pada tahun 2015 sebanyak 5 dokumen, dari target RPJMD tahun 2015 sebanyak 4 dokumen atau mencapai 125 % dari target RPJMD, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015. Kegiatan ini dicapai melalui ketersediaan Regulasi yang masih relevan untuk mendukung iklim investasi yaitu:

- Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Perbup. Nomor 13 A Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- Peraturan Bupati No 9 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Publik Bidang perizinan;
- Perbup No . 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pacitan No 7 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insebtif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal,

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program / kegiatan *Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran* dengan output yang dihasilkan adalah terpenuhinya regulasi pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pacitan,

Maka capaian kinerja Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha akhir tahun 2015 mencapai 125 % atau 5 dokumen, dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 13 (tiga belas) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 12

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	20.000.000	19.605.000	98,03	395.000



2	Program Pengembangan data/informasi	150.000.000	148.852.550	99,24	1.147.450
3	Program Pengembangan Data/Informasi	200.000.000	199.535.300	99,77	464.700
4	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	50.000.000	48.465.250	96,93	1.534.750
5	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	605.000.000	252.415.000	41,72	352.585.000
6	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2.020.345.560	957.834.971	47,41	1.062.510.589
7	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	450.000.000	260.849.000	57,97	189.151.000
8	Program Kelitbangan	1.048.380.000	917.369.100	87,50	131.010.900
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	200.000.000	199.146.000	99,57	854.000
10	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	622.600.000	614.559.350	98,71	8.040.650
11	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.097.623.440	2.072.433.050	98,80	25.190.390
12	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	470.000.000	465.148.000	98,97	4.852.000
13	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	215.000.000	212.298.900	98,74	2.701.100
Jumlah		8.148.949.000	6.368.511.471	78,15	1.780.437.529

Dari tabel capaian kinerja sasaran 12 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 12 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 12 tahun 2015 mencapai 200,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 12 yang pada tahun 2015 mencapai 78,15% sehingga masih terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.780.437.529,00.



SASARAN STRATEGIS 13

Ketersediaan Pangan Daerah

Sasaran “**Ketersediaan Pangan Daerah**” diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pencapaian kinerja sasaran “**Ketersediaan Pangan Daerah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penguatan cadangan pangan (%)	15	25	45,13	64,3	100	144,44	144,44

Tercapainya sasaran ketersediaan pangan daerah dengan indikator utama penguatan cadangan pangan yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Penguatan Cadangan Pangan

Indikator kinerja penguatan cadangan pangan pada tahun 2015 sebesar 144,44 ton atau mencapai 144,44% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui penyediaan cadangan beras pemerintah kabupaten sebesar 100 ton dan ditambah 44,44 ton dari bansos APBD Provinsi. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah dan penyediaan sarana pendukung dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Terbangunnya satu gudang cadangan pangan pemerintah daerah dan 16 unit lantai jemur yang berasal dari dana APBD Kabupaten
- Pembangunan 4 lumbung pangan dan pengisian 10 lumbung APBD



Propinsi

- **Regulasi ketahanan pangan**

Indikator Kinerja regulasi ketahanan pangan pada tahun 2015 sebesar 20 regulasi atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/409/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pemberdayaan 12 desa KRPL Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% atau 20 regulasi (akumulasi total sejak tahun 2011) dan mengalami peningkatan sebesar 5,26% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama pada tahun 2015 sebesar 333,65 ton.

- **Ketersediaan energi dan protein perkapita**

Indikator kinerja ketersediaan energi dan protein per kapita pada tahun 2015 sebesar 7.171,76 kkal/kapita/hari untuk kalori atau 326% dari standar ketersediaan kalori sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan 136,43 gram/kapita/hari atau 239% dari standar ketersediaan protein sebesar 57 gram/kapita/hari dengan rata-rata 282,67% atau mencapai 161,47% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui peningkatan kalori dan protein dari kegiatan produksi perikanan darat dan laut serta bahan pangan nabati yang berasal dari kelompok padi-padian terutama beras dan jagung dan makanan berpati seperti ubi kayu.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dapat menyumbang ketersediaan protein nabati dan hewani bagi penduduk dan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan untuk mengolah data produksi menjadi ketersediaan beserta



analisisnya, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Peningkatan produksi beras sebesar 200.168,96 ton dan ketersediaan beras sebesar 116.717,49 ton
- Jumlah dokumen data pangan yang dihasilkan meliputi data produksi, data ketersediaan, informasi harga, informasi pasokan dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 282,67% dan mengalami peningkatan sebesar 58,71% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Indikator kinerja ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada tahun 2015 sebesar 91,45% atau mencapai 100,10% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui survei dan olah data pasokan, harga dan akses pangan.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Data pasokan, harga dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100,10% dan mengalami penurunan sebesar 10,87% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Stabilitas harga dan pasokan pangan

Indikator kinerja stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2015 sebesar 101,5% atau mencapai 109,75% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui survei dan olah data pasokan, harga dan akses pangan.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Data pasokan, harga dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 101,5% atau 99,47% (dengan target sebesar 98%) dan mengalami penurunan sebesar 0,79% apabila



dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Indikator kinerja pencapaian skor pola pangan harapan pada tahun 2015 sebesar 98,78% atau mencapai 126,82% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui pengumpulan dan pengolahan data produksi bahan pangan nabati dan hewani.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Data pasokan, harga dan akses pangan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 98,78% atau 88,9 (dengan target 90) dan mengalami penurunan sebesar 2,26% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**

Indikator kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada tahun 2015 sebesar 89% atau mencapai 107,56% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui kegiatan pengambilan sampel makanan dan minuman secara acak di pasar tradisional, pedagang makanan minuman, warung dan toko sembako. Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 104,71%

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan output yang dihasilkannya yaitu persentase sampel pangan yang aman

- **Penanganan daerah rawan pangan**

Indikator kinerja penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 80% atau mencapai 152,78% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 melalui pendampingan desa P2KP tahun 2015 dan 2016 sejumlah 22 desa.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan kegiatan Penanganan Daerah



Rawan pangan, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Jumlah desa P2KP (desa rawan pangan) yang diberdayakan sebanyak 22 desa

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 91,67% atau 22 desa (dengan target 24 desa) dan mengalami penurunan sebesar 0,47% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

NO	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Beras	Ton	96.710	98.658	100.031	111.241	112.930	116.717
2	Jagung	Ton	108.761	94.353	121.550	145.370	85.201	102.256
3	Ubi Jalar	Ton	704	706	1.015	449	465	224
4	Ubi Kayu	Ton	434.975	479.771	533.202	598.437	338.672	381.531
5	Gula Merah	Ton	11.441	10.165	10.167	10.276		20.765
6	Kacang Tanah	Ton	8.720	8.582	8.533	10.309	8.130	6.381
7	Kedelai	Ton	3.160	3.760	3.621	3.463	49.140	6.026
8	Daging	Ton	1.905	1.959	1.940	1.902	1.956	2.4667
9	Telur	Ton	289	293	295	581	311	373
10	Ikan	Ton	4.828	5.467	5.956	5.956	5.132	8.521
B	KONSUMSI RIL							
1	Beras	Ton	52.708	38.478	67.447	45.402	45.565	58.878
2	Jagung	Ton	3.598	151	1.904	1.985	2.354	2.408
3	Ubi Jalar	Ton	1.195	292	615	676	691	698
4	Ubi Kayu	Ton	6.681	1.509	19.059	2.260	3.369	3.431
5	Gula Merah	Ton	173	1.157	1.164	63	65	66
6	Kacang Tanah	Ton	391	595	598	211	216	219
7	Kedelai	Ton	5.883	2.753	2.769	11.699	11.965	33.575
8	Daging	Ton	2.721	346	1.670	2.914	2.980	2.941
9	Telur	Ton	3.028	1.725	2.502	3.463	2.980	3.503
10	Ikan	Ton	7.944	9.135	6.277	7.243	3.542	8.818

- Produksi perikanan (ton)

Pada tahun 2014 produksi perikanan tercapai 124,71% dari target. Produksi perikanan berasal dari produksi perikanan tangkap sebesar 7.999,50 ton, budidaya kolam 693,34 ton dan perairan umum 419,50 ton, budidaya laut 18,420 ton dan tambak 207,80 ton. Pencapaian atas target tersebut didukung melalui 3 program dan 14 kegiatan. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 pencapaian terhadap target mengalami kenaikan sebesar 19,38%. Pencapaian



atas target didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.035.210.000,- terealisasi Rp. 6.892.573.200,- atau 97,8%. Perkembangan produksi perikanan selama 3 (tiga) tahun sebesar 33,28%. Sedangkan perkembangan produksi dibanding pada awal RPJM 5 tahun lalu sebesar 77,29%

- **Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)**

Target produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2014 sebesar 6.632,93 ton dengan realisasi 8.419,00 ton atau 126,93% dari target. Produksi ini merupakan produksi kelompok nelayan laut dan perairan umum. Produksi kelompok nelayan laut sebesar Rp. 7.999,5 ton sedangkan produksi kelompok perairan umum sebesar 419,5 ton. Komoditas unggulan perikanan laut terdiri dari layur, tuna, cakalang, tongkol dan layang. Sedangkan komoditas perairan umum diantaranya rebon atau udang kecil dan ikan-ikan darat seperti nila dan tawes. Indikator ini ditunjang melalui 1 program dan 6 kegiatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.732.735.000,- dengan realisasi Rp. 3.700.263.200,- atau 99,13%. Dibandingkan dengan tahun 2013 produksi ini mengalami peningkatan sebesar 40,32%. Perkembangan selama 5 tahun sebesar 79,44%.

- **Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi) (Kg)**

Prosentase produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2014 ditargetkan sebesar 581.210 kg dan tercapai sebesar 693.346 kg atau 119,29% dari target. Perkembangan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2014 sebesar 133,96%. Pemerintah memprogramkan berbagai kegiatan unggulan untuk menunjang peningkatan produksi tersebut. Antara lain upaya penyediaan benih dan pakan secara lebih murah dan mudah, penyediaan sarana dan prasarana budidaya serta pembinaan dan pelatihan pembudidaya ikan. Selain untuk memenuhi target program minapolitan, peningkatan produksi kolam juga akan berpengaruh pada peningkatan konsumsi ikan dan penganekaragaman pangan.

Secara kualitas, pembudidaya ikan Kabupaten Pacitan semakin terampil dalam berbudidaya dengan telah dilaksanakannya berbagai pelatihan budidaya ikan, pembenihan dan pembuatan pakan. Pengembangan sektor perikanan juga ditunjang dengan semakin berkembangnya Balai Benih Ikan (BBI) sebagai



penyedia benih.

- **Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri (orang)**

Pada tahun 2014 cakupan masyarakat pesisir yang mandiri ditargetkan sebanyak 3.417 orang dan pencapaian tahun 2014 sebanyak 3.928 orang atau sebesar 114,95%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD, perkembangan sampai dengan tahun 2014 sebesar 229,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dengan jumlah pemanfaat 3.650 orang, pencapaian tahun 2014 meningkat sebesar 7,61%.

Pertumbuhan bidang perikanan di Kabupaten Pacitan tidak lepas dari semakin mudahnya masyarakat mengakses dana penguatan modal. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat mengakses dana penguatan modal seperti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, serta semakin berkembangnya Koperasi Swa Mitra Mina / Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3).

- **jumlah pelanggaran yang tertangani (%)**

Pada tahun 2014 Pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin berkurang dan dapat tertangani seluruhnya sehingga pencapaian indikator jumlah pelanggaran yang tertangani tahun 2014 sebesar 100% . Pencapaian ini didukung dengan adanya patroli laut yang dilakukan oleh TNI AL, Pol air, kamladu dan pokmaswas.

- **Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/ pengolahan dan pemasaran (%)**

Sampai dengan tahun 2014 pencapaian jumlah kelompok sebanyak 294 kelompok terdiri dari 58 kelompok nelayan, 16 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), 12 kelompok nelayan perairan umum, 153 kelompok pembudidaya ikan dan 55 kelompok pengolah pemasar hasil perikanan. Dari kelompok tersebut sebanyak 86,40% atau 254 kelompok mendapat pembinaan baik oleh penyuluh lapangan maupun melalui pelatihan-pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan kelompok dan selebihnya mendapat pembinaan meskipun belum intensif dikarenakan adanya perubahan kelompok.

- **Cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten (%)**



Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan tahun 2014 sebanyak 48 orang terdiri dari Penyuluh PNS 17 orang, PPTK 4 orang dan penyuluh swadaya 27 orang. Sebagai media transformasi teknologi dan informasi diharapkan penyuluh mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang kelautan dan perikanan. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas penyuluh diantaranya pelatihan, magang dan studi banding yang diikuti oleh 48 penyuluh. Sehingga Cakupan penyuluh kelautan dan perikanan yang kompeten tahun 2014 terdapai 100%.

- Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)

Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran serta produksi hasil perikanan mendorong peningkatan hasil olahan produk perikanan. Tahun 2014 produk olahan perikanan Kabupaten Pacitan sebanyak 1.058,52 ton atau 761,53% dari target sebanyak 139 ton. Peningkatan ini cukup besar dikarenakan adanya penambahan jumlah poklaksar yang cukup signifikan. Jumlah poklaksar dari 47 kelompok menjadi 55 kelompok pada tahun 2014. Selain peningkatan jumlah kelompok, jumlah produksi dari masing-masing kelompok juga meningkat sangat pesat karena adanya permintaan yang cukup banyak baik dari dalam maupun luar kabupaten.

- Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)

Target luas areal budidaya tahun 2014 adalah 128,15 Ha. Dalam realisasinya luas areal perikanan budidaya pada Tahun 2014 seluas 129,43 Ha. Dengan demikian pencapaian Peningkatan luas areal perikanan budidaya dari target sebesar 101%. Dibandingkan dengan tahun 2013 luas areal budidaya mengalami peningkatan 1,37%.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 16 (enam belas) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 13

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	3.040.800.000	3.000.171.775	98,66	40.628.225
2	Program peningkatan	135.000.000	129.631.450	96,02	5.368.550



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
	pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan				
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	19.507.798.306	19.168.599.457	98,26	339.198.849
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	135.000.000	131.675.650	97,54	3.324.350
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	700.000.000	673.884.450	96,27	26.115.550
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	200.000.000	198.912.650	99,46	1.087.350
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.215.000.000	1.208.240.179	99,44	6.759.821
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	95.000.000	93.758.450	98,69	1.241.550
9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1.819.700.000	1.758.587.470	96,64	61.112.530
10	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	584.773.000	415.824.500	71,11	168.948.500
11	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	473.005.000	468.008.500	98,94	4.996.500
12	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	385.141.000	379.303.000	98,48	5.838.000
13	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	560.843.524	531.463.584	94,76	29.379.940
14	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	675.363.000	653.968.791	96,83	21.394.209
15	Program pengembangan budidaya perikanan	1.230.133.000	1.152.912.500	93,72	77.220.500
16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.774.979.100	2.610.383.805	94,07	164.595.295
Jumlah		33.532.535.930	32.575.326.211	97,15	957.209.719

Dari tabel capaian kinerja sasaran 13 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 13 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 13 tahun 2015 mencapai 144,44% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 13 yang pada tahun 2015 mencapai 97,15% sehingga masih terdapat efisiensi



anggaran sebesar Rp. 957.209.719,00.

SASARAN STRATEGIS 14

**Lembaga UMKM Dan Koperasi
Sehat Dan Berdaya Saing**

Sasaran “Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing” diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2013	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Prosentase Koperasi Aktif	85,51	87,13	87,30	87,42	90,72	90,1	99,32
2	Jumlah UMKM	20.843	21.114	21.326	21.671	21.977	22013	100,16
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14								99,74

Tercapainya sasaran Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing dengan indikator utama koperasi aktif dan jumlah UMKM yang ada dan terbina di Kabupaten Pacitan yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:



- **Koperasi aktif (%)**

Indikator Kinerja Prosentase Koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 90.10% atau mencapai 99.29% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut hampir mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- Diklat teknis perkoperasian
- Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 99.29% atau 399 unit dan mengalami peningkatan sebesar 2.68% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Jumlah UMKM (unit)**

Indikator Kinerja Jumlah UMKM (unit) pada tahun 2015 sebesar 22.013 unit atau mencapai 100.16% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi dana bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100.16% atau 22.013 unit dan mengalami peningkatan sebesar 342 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Jumlah BPR/LKM (unit)**

Indikator Kinerja Jumlah BPR/LKM (unit) pada tahun 2015 sebesar 5.534 unit atau mencapai 102.91% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015



Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi dana bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 102.91% atau 5.534 unit dan mengalami peningkatan sebesar 91 Unit apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Cakupan bina UMKM**

Indikator Kinerja Cakupan bina UMKM pada tahun 2015 sebesar 3.47% atau mencapai 190.65% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi Dana Bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 3.47% atau 724 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.29% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%)**

Indikator Kinerja Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%) pada tahun 2015 sebesar 1.43% atau mencapai 84.11% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 belum tercapainya target disebabkan karena antara jumlah UMKM yang mengajukan pinjaman dan ketersediaan dana belum mencukupi.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Fasilitasi Dana Bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 1.43% atau 279 unit dan mengalami penurunan sebesar 0.39% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)**

Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%) pada tahun 2015 sebesar 3.07% atau mencapai 204.66% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi Dana Bergulir

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 3.07% atau 342 unit capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015.

- **Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)**

Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) pada tahun 2015 sebesar 12.5% atau mencapai 125% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut

- Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 12.5% atau 10 Kelompok dan mengalami peningkatan sebesar 2.5% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 8 (delapan) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 14

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	281.843.000	281.593.000	99,91	250.000
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	180.000.000	179.522.900	99,73	477.100
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	340.000.000	284.534.450	83,69	55.465.550
4	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20.000.000	18.630.000	93,15	1.370.000
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	150.000.000	142.211.750	94,81	7.788.250
6	Program Pengembangan Kemitraan	504.000.000	492.783.100	97,77	11.216.900
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20.000.000	19.500.000	97,50	500.000
8	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.815.000.000	1.539.561.500	84,82	275.438.500
Jumlah		3.310.843.000	2.958.336.700	89,35	352.506.300

Dari tabel capaian kinerja sasaran 14 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 14 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 14 tahun 2015 mencapai 99,74% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 14 yang pada tahun 2015 mencapai 89,35% sehingga masih terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 352.506.300,00.



SASARAN STRATEGIS 15

Pemasaran Komoditas Daerah

Sasaran “**Pemasaran Komoditas Daerah**” diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “**Pemasaran Komoditas Daerah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	564	582,9	637.576	688	605	711	117,52

Tercapainya sasaran Pemasaran Komoditas Daerah dengan indikator utama omset penjualan komoditas unggulan (milyar) yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun

Capaian Jumlah pameran/ expo produk unggulan dilaksanakan per tahun dihasilkan dari jumlah pameran/ expo produk unggulan yang diikuti pada tahun 2015 sebanyak 8 kali dibandingkan dengan target jumlah pameran /expo produk unggulan dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 8 kali . Capaian ini merupakan dampak dari :

- a) Kegiatan Pameran produk unggulan
- b) Kegiatan Pengembangan Produk unggulan
- c) Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Industri Kreatif Kab.pacitan
- d) Pengembangan Pasar dan distribusi barang / produk

Capaian kinerja Jumlah pameran/expo produk unggulan dilaksanakan pada tahun 2015 mencapai 8 kali pelaksanaan sama dengan target RPJM 2015 sebesar 8 kali



Jumlah pameran/ ekspo produk unggulan yang dilaksanakan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan pada tahun 2015 yaitu:

1. Pameran Produk Unggulan Daerah DI Alun – Alun Kab.Pacitan Alun – Alun Kab.Pacitan Tgl 16 s/d 20 Agustus 2015
2. GKPD (Gelar produk Khas daerah) EXPO 2015 Batam Tgl 13 s/d 16 Mei 2015
3. Semarang Tourism and Craft Expo 2015 Semarang Jawa Tengah Tgl 5 s/d 7 Nopember 2015
4. Pameran produk unggulan pada Hari Koperasi ke 68 Tahun 2015 Tuban Jawa Timur 15 – 17 Juni 2015
5. Pameran Batik, Bordir dan Asesoris Fair 2015 Grand city Surabaya Tgl 13 s/d 17 Mei 2015
6. Pameran Pesta Rakyat dan Pentas Seni Tahun 2015 madiun Tgl 29 Oktobet s/d 1 Nopember 2015
7. Pameran SMESCO Festival 2015 Jakarta Convention Center (JCC) Tgl 3 September s/d 04 Oktober 2015
8. Expo Koperasi dan UMKM ke 3 Grand City Surabaya Tgl 12 Nopember 2015

Selain itu untuk mengangkat produk daerah sebagai alat promosi beberapa saruan kerja juga mengikuti pameran antara lain:

1. Pameran APKASI Jakarta Tanggal 11s/d17 Mei 2015
2. Pameran BALI TOURIST,TRADE,and INVESTMENT EXPO Bali, TTI Expo 30 September s/d 04 November 2015
3. Pameran INVESTASI & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) "INAVES 2015" Mall The Park SOLO 12 s/d 15 November 2015
4. Pameran Inovasi Pelayanan Publik Gelora Delta Sidoarjo 14 s.d 16 Juni 2015
5. Pameran Produk Unggulan Daerah Pasuruan, Jawa Timur Puncak BBGRM dan HKG PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur 04 – 06 Mei 2015

- Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)

Indikator Kinerja Omset penjualan komoditas unggulan (milyar) pada tahun



2015 sebesar 711 M atau mencapai 117.52% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Revitalisasi pasar daerah (DAK)

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 711 M dan mengalami peningkatan sebesar 23M apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

Omzet penjualan komoditas unggulan tahun 2015 berasal dari komoditas unggulan antara lain:

- 1 Olahan Kayu
- 2 Gula Kelapa
- 3 Batik
- 4 Batu Mulia
- 5 Olahan ikan
- 6 Olahan Ketela
- 7 Ind. Pengolahan lain (olahan tanah, olahan kedelai, anyaman makanan lainnya, industri kreatif

- Peningkatan promosi produk unggulan daerah (%)

Indikator Kinerja Peningkatan promosi produk unggulan daerah (%) pada tahun 2015 sebesar 114.28 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Pameran produk unggulan



- Jumlah PKL dan asongan yang mendapat modal usaha (%)

Jumlah PKL dan asongan yang mendapat modal usaha (%) pada tahun 2015 sebesar 50% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut Sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan didukung oleh Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 50% dan sama apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 6 (enam) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 15

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	305.000.000	260.295.726	85,34	44.704.274
2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	14.482.000.000	14.004.112.900	96,70	477.887.100
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.790.819.020	2.545.393.200	91,21	245.425.820
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	375.000.000	369.424.580	98,51	5.575.420
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.125.000.000	1.111.264.400	98,78	13.735.600
6	Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	875.000.000	871.845.900	99,64	3.154.100
Jumlah		19.952.819.020	19.162.336.706	96,04	790.482.314

Dari tabel capaian kinerja sasaran 15 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 15 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 15 tahun 2015 mencapai 117,52% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 15 yang pada tahun 2015 mencapai 96,04 sehingga masih terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 790.482.314,00.



TUJUAN 8

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR

SASARAN STRATEGIS 16

Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian

Sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian”** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik							
	- Jalan	50,23	51,11	52,12	54,61	53,60	56,12	104,70
	- Jembatan	90,91	91,57	92,15	92,45	92,10	92,81	100,77
2.	Jumlah terminal bus/sub terminal	6	6	6	6	6	6	100,00
3.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	84.067	94.050	101.458	107.063	117.054	133.678	114,20
Rata-rata capaian Indikator Kinerja Sasaran 16								104,92

Tercapainya sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian dengan indikator utama jalan dan jembatan dalam kondisi baik, ketersediaan sarana dan prasarana terminal serta rumah tangga yang sudah terlayani kebutuhan listriknya yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:



- Jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)

Capaian prosentase tahun 2015 Jalan dan jembatan dalam kondisi baik dihasilkan dari jumlah jalan kondisi baik sebanyak 448.091 m dan jembatan kondisi baik sebanyak 1.284,73 m (142 unit) dibandingkan dengan jumlah seluruh jalan tahun 2015 sebanyak 798.000 m dan jembatan sebanyak 1.378,83 m (153 unit). Capaian ini merupakan dampak dari :

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada tahun 2015 sebanyak 86.865 m
- Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2015 sebanyak 1.173 m (28 unit)

Capaian kinerja Jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 mencapai 56,152% mengalami peningkatan dengan target RPJM 2015 sebesar 53,60%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 meningkat yaitu sebesar 1,542%

- Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m)

Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m) pada tahun 2015 terealisasi 798,000 km maka indikator capaian kinerja jalan kabupaten (dilalui roda 4) telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 798,000 km. Target ini didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sehingga capaian kinerja sama dengan capaian pada tahun 2014.

- Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m) pada tahun 2015 terealisasi 798,000 km maka indikator capaian kinerja jalan kabupaten (dilalui roda 4) telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 798,000 km. Target ini didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sehingga capaian kinerja sama dengan capaian pada tahun 2014.

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) pada tahun 2015 terealisasi 448.091 m, telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 381.732 m. Indikator ini didukung oleh Kegiatan



Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 12.328 m bila dibandingkan dengan capain kinerja tahun 2014 sebesar 435.763 m

- Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat pada tahun 2015 terealisasi 27, 502%, tidak dapat memenuhi target sebesar 60%. Hal ini dikarenakan sesuai standar SPM Jalan secara Nasional, hanya beberapa ruas jalan di Kabupaten Pacitan yang memenuhi standar keselamatan. Indikator ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Namun demikian Capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,37% dibanding capaian tahun 2014 sebesar 10, 46%

- Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman pada tahun 2015 sebesar 60,802 %, maka telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan mengalami peningkatan sebesar 6,192% dari realisasi tahun 2014 sebesar 54,61%.

- Jalan dan jembatan yang dibangun (%)

Jalan yang dibangun pada tahun 2015 terealisasi 39,80%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39,80%, berdasarkan panjang jalan yang dibangun sebesar 35,41 km dibanding dengan kebutuhan panjang jalan yang dibangun sebesar 88,96 km. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan meningkat sebesar 0,12% dari realisasi tahun 2014 sebesar 39,68%.

Jembatan yang dibangun pada tahun 2015 terealisasi 85,60%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,60%, berdasarkan jembatan yang telah dibangun sebesar 922,10 m dibandingkan kebutuhan jembatan yang dibangun sebesar 1.077 m. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jembatan, kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dan Pembangunan Jalan dan



Jembatan Perdesaan. Realisasi ini meningkat sebesar 0,66% dari realisasi tahun 2014 sebesar 84,94%.

- Cakupan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi

Cakupan panjang jalan yang diinspeksi realisasi tahun 2015 sebesar 100%, telah mencapai target sebesar 100%, berdasarkan panjang jalan yang diinspeksi sebesar 798,00 km dibanding panjang jalan kabupaten sebesar 798,00 km. Capaian ini didukung kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dan tercapai realisasi yang sama sebesar 100% dari realisasi tahun 2014.

Cakupan jumlah jembatan yang diinspeksi realisasi tahun 2015 sebesar 100%, telah mencapai target sebesar 100%, berdasarkan jumlah jembatan yang diinspeksi sebesar 153 unit dibanding panjang jalan kabupaten sebesar 153 unit. Capaian ini didukung kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan dan tercapai realisasi yang sama sebesar 100% dari realisasi tahun 2014.

- Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dg kondisi baik (%)

Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik, meliputi:

- kondisi alat berat pada tahun 2015 terealisasi sebesar 68,57%, telah mencapai dari target sebesar 62,40%. Hal ini berdasarkan jumlah alat berat dalam kondisi baik sebesar 24 unit dibandingkan jumlah keseluruhan alat berat kebinamargaan sebesar 35 unit. Capaian ini didukung kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Alat-alat Berat yang mampu mempertahankan kondisi dari tahun 2014 sehingga capaian tahun 2015 sama dengan capaian tahun 2014 sebesar 68,57%
- kondisi alat laboratorium pada tahun 2015 terealisasi sebesar 93,55%, telah mencapai target sebesar 93,20%. Hal ini berdasarkan jumlah alat laboratorium dalam kondisi baik sebesar 29 unit dibandingkan jumlah keseluruhan alat laboratorium kebinamargaan sebesar 31 unit. Capaian ini didukung kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan kegiatan Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang mampu mempertahankan kondisi dari tahun 2014 sehingga capaian tahun 2015 sama dengan capaian tahun 2014 sebesar. 93,55%.



- **Jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik (%)**

Jalan poros desa dalam kondisi baik pada tahun 2015 terealisasi sebesar 24,75% telah tercapai target sebesar 18,10%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan. Realisasi ini meningkat sebesar 2,74% dari realisasi tahun 2014 sebesar 22,01%.

Jembatan perdesaan dalam kondisi baik pada tahun 2015 terealisasi sebesar 50,10% sesuai dengan target sebesar 50,10%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan dan realisasi ini meningkat sebesar 5,6% dari realisasi tahun 2014 sebesar 44,50%

- **Cakupan layanan infrastruktur perdesaan**

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan sampai dengan tahun 2015 sepanjang 2.102.550, capaian tersebut meningkat sebanyak 1.910.578,49 meter jika dibanding tahun 2014

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya jalan lingkungan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 55.38% atau 2.102.600 km dan mengalami peningkatan sebesar 4.82% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**

Indikator Kinerja Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum baik yang melalui terminal di halte atau tempat-tempat pemberhentian angkutan umum. Pada awal periode tahun 2011 .849.010 mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 10.873.146. Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 11.849.010 sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 10.873.146, telah terjadi penurunan selama 5 tahun sebesar 975.864 pada akhir tahun 2015.

- **Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun**

Indikator Kinerja Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun pada awal periode tahun 2011 mencapai 448.871 mengalami



peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 526.674.

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sebesar 448.871 sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 526.674 telah terjadi penurunan selama 5 tahun sebesar 2.329.352 pada akhir tahun 2015.

- **Jumlah pelabuhan laut/ udara**

Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan laut udara pada tahun 2015 sebesar 3 lokasi atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan dukungan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang didalamnya terdapat kegiatan pengembangan pelayanan perhubungan laut.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan kegiatan pengembangan pelayanan perhubungan laut dengan output yang dihasilkan terlaksananya pelayanan perhubungan laut 1 tahun. Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% atau 3 lokasi dan tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Jumlah Terminal Bis/ sub terminal**

Indikator Kinerja Jumlah Terminal Bis/sub terminal pada tahun 2015 sebesar 6 lokasi atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan melalui APBD dengan output terlaksananya pemeliharaan 6 terminal dalam 1 tahun.

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% atau 6 lokasi dan tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota**

Indikator Kinerja Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 73,40 atau mencapai 97,86% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015. Sampai tahun 2015, dilihat



dari panjang jalan kabupaten di Pacitan secara keseluruhan 1.031 km, jalur yang telah dibuka trayek secara keseluruhan sebesar 910 km.

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 97,86% atau 73,40 dan mengalami peningkatan sebesar 3,40% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota**

Indikator Kinerja Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 62,80 atau mencapai 104% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015, sampai tahun 2015 dilihat dari panjang jalan yang tertinggal di jalan kabupaten Pacitan secara keseluruhan 156 km, kemudian jalur trayek yang akan dibuka trayek menuju daerah terpencil atau terisolasi sepanjang 58 km.

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 104% atau 62,80 dan mengalami peningkatan sebesar 4,45% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek**

Indikator Kinerja Tersedianya halte pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2015 sebesar 108% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dengan output terlaksananya pembangunan halte 2 unit.

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 108% atau 13 lokasi dan mengalami peningkatan sebesar 16% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya



- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Indikator Kinerja Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2015 sebesar 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pemeliharaan 6 terminal dalam 1 tahun
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% atau 6 lokasi dan tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota

Indikator Kinerja Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 60 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas dengan output yang dihasilkan terwujudnya pemasangan dan pengadaan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas (100m guardrail, road barrier 50 buah, traffic cones 200 buah, rambu 133 buah, dan marka jalan 1050m²).

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100% atau 60 dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota

Dari data trayek yang ada sejumlah 639 yang ada di Kabupaten Pacitan terutama angkutan pedesaan, sedangkan jumlah trayek yang masih berlaku sebesar 482 dan angkutan umum yang laik jalan sebesar 625. Dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 100% maka pada akhir tahun 2015 tercapai 97,80%.



- Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%)

Indikator Kinerja Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%) pada tahun 2015 dalam hal ini meliputi terminal, halte dan APILL mencakup pemeliharaan 6 terminal, 13 halte, 11 traffic light dan 21 warning light sebesar 86,82 atau 105,87% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan output yang dihasilkan sebagai berikut

- Terlaksananya pemeliharaan 6 terminal dalam 1 tahun
- Terpeliharanya traffic light 11 unit dan warning light 21 unit

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 105,87% atau 86,82 dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- Angkutan laik jalan (%)

Indikator Kinerja Angkutan laik jalan (%) pada tahun 2015 sebesar 75% atau 100% dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai dengan dukungan Program Program peningkatan pelayanan angkutan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan lalu lintas dalam 1 tahun
- Terlaksananya pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor 1 tahun
- terlaksananya ketertiban angkutan umum selama 1 tahun

Capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 75% dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Walaupun diakhir tahun 2015 mampu memenuhi target RPJMD tahun 2015 namun bila dibandingkan capaian tahun 2011 mengalami penurunan disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraannya. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan pengadaan alat uji portable sehingga kegiatan uji dapat menjangkau daerah – daerah pelosok di Kabupaten Pacitan sehingga angkutan di Kabupaten Pacitan lebih terjamin laik jalannya



Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut didukung melalui 21 (dua puluh satu) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 16

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.852.380.000	15.260.602.422	96,27	591.777.578
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	52.933.427.000	52.567.072.694	99,31	366.354.306
3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	134.554.100	127.971.550	95,11	6.582.550
4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	185.000.000	184.434.800	99,69	565.200
5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10.772.176.000	10.656.795.000	98,93	115.381.000
6	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	50.370.116.348	49.060.312.533	97,40	1.309.803.815
7	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.985.443.952	5.777.448.700	96,52	207.995.252
8	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.425.000.000	6.199.238.400	96,49	225.761.600
9	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	723.150.000	717.982.500	99,29	5.167.500
10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	177.500.000	176.938.180	99,68	561.820
11	Program peningkatan pelayanan angkutan	580.776.600	575.938.000	99,17	4.838.600
12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110.500.000	110.487.000	99,99	13.000
13	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	525.564.400	524.696.100	99,83	868.300
14	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.205.650.000	1.950.941.879	88,45	254.708.121
15	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000	655.619.050	81,95	144.380.950
16	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	190.000.000	188.600.150	99,26	1.399.850



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
17	Program Pemanfaatan Ruang	610.000.000	544.573.750	89,27	65.426.250
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	91.043.000	91,04	8.957.000
19	Program pengendalian banjir	850.000.000	686.414.000	80,75	163.586.000
20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	979.769.566	898.090.107	91,66	81.679.459
21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	4.385.013.250	2.822.635.502	64,37	1.562.377.748
Jumlah		154.896.021.216	149.777.835.317	96,70	5.118.185.899

Dari tabel capaian kinerja sasaran 16 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 16 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 16 tahun 2015 mencapai 104,92% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 16 yang pada tahun 2015 mencapai 96,70% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.118.185.899,00.



SASARAN STRATEGIS 17

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar

Sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar”** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,93	26,52	24,2	28,47	18,77	28,66	152,69

Tercapainya sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar dengan indikator utama peran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD)

Capaian prosentase Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) dihasilkan dari jumlah kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) tahun 2015 sebanyak 2.074 kelompok dibandingkan dengan jumlah kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) yang mendapatkan pembinaan tahun 2015 sebanyak 342 kelompok. Capaian ini merupakan dampak dari :

- Binaan LPM yaitu Jumlah UPKu 71, BUMDes/LKD 166 dan SPP 1.837 kelompok



- Jumlah LPM (PKK 171 dan LPMD 171)

Capaian kinerja jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) pada tahun 2015 mencapai 6,06 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 5,08 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (meningkat) yaitu sebesar 0,98%.

- **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**

Capaian prosentase Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dihasilkan dari jumlah kelompok binaan PKK tahun 2015 sebanyak 15.934 kelompok dibandingkan dengan jumlah PKK tahun 2015 sebanyak 183 kelompok. Capaian ini merupakan dampak dari :

- Jumlah Kelompok Binaan PKK (PKK Dusun 1.123, PKK RW 1.865, PKK RT 4.976 dan Dasa Wisma 7.970
- Jumlah PKK (TP-PKK desa dan kelurahan 171, TP-PKK kec. 12

Capaian kinerja jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2015 mencapai 87,07 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 85,52 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (menurun) yaitu sebesar 0,9 %.

- **LPM Berprestasi (%)**

Capaian prosentase LPM Berprestasi dihasilkan dari jumlah LPM Berprestasi tahun 2015 sebanyak 6 kelompok dibandingkan dengan jumlah LPM tahun 2015 sebanyak 2.074 kelompok. Capaian ini merupakan dampak dari :

Adanya LPM berprestasi Tahun 2015 :

1. Juara I Lomba 10 Program Pokok PKK terbaik UP2KPKK oleh desa Nogosari Kec. Ngadirojo
2. Juara II Lomba PHBS tingkat Provinsi Jawa Timur
3. Juara II Lomba Penyuluhan AKI dan AKB dalam rangka Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Jawa Timur
4. Juara I Lomba KRPL tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Desa Hadi Luwih Kec. Ngadirojo
5. Juara I Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Desa Purworejo Kec. Pacitan



6. Juara I Lomba Kinerja LPMD tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Desa Cokrokembang Kec. Ngadirojo

Capaian kinerja jumlah LPM Berprestasi pada tahun 2015 mencapai 0,29 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 0,16 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (meningkat) yaitu sebesar 0,14%.

- **PKK aktif (%)**

Capaian PKK Aktif% dihasilkan dari jumlah PKK Aktif tahun 2015 sebanyak 184 kelompok dibandingkan dengan jumlah PKK tahun 2015 sebanyak 184 kelompok. Capaian ini merupakan dampak dari semua TP-PKK Desa/Kel., Kecamatan dan Kabupaten semua aktif.

Capaian kinerja PKK Aktif% pada tahun 2015 mencapai 100 % mengalami (sama) dengan target RPJM 2015 sebesar 100 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (sama) yaitu sebesar 100%.

- **Posyandu aktif(%)**

Capaian Posyandu Aktif% dihasilkan dari Jumlah Posyandu Aktif tahun 2015 sebanyak 816 kelompok dibandingkan dengan Jumlah Posyandu tahun 2015 sebanyak 816 kelompok. Capaian ini merupakan dampak dari 816 posyandu semua aktif. :

Capaian kinerja PKK Aktif% pada tahun 2015 mencapai 100 % mengalami (sama) dengan target RPJM 2015 sebesar 100 %.

- **Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)**

Capaian Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat% dihasilkan dari Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 sebanyak Rp 221.051.634,00 dibandingkan dengan Total Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 sebanyak Rp 77.120.053.330,00 .

Capaian kinerja Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat% pada tahun 2015 mencapai 28,66 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 18,77 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (meningkat) yaitu sebesar 0,19%.



- **Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)**

Capaian Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat% dihasilkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat tahun 2015 sebanyak 5 kegiatan dibandingkan dengan Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 sebanyak 5 kegiatan . Capaian ini merupakan dampak adanya Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu PNPM-MPd, ADD, BBGRM, Bantuan Keuangan dan Bantuan TTG.

Capaian kinerja Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat% pada tahun 2015 mencapai 100 % mengalami (sama) dengan target RPJM 2015 sebesar 100 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (sama) yaitu sebesar 100%.

- **Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%)**

Capaian Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan% dihasilkan dari Jumlah TTG Yang Diterapkan tahun 2015 sebanyak 9 alat dibandingkan dengan Jumlah TTG Yang Dibutuhkan tahun 2015 sebanyak 171 alat . Capaian ini merupakan dampak dari TTG yang diterapkan pada tahun 2015 :

1. Alat Pembuat Susu Kedelai (1 unit / Desa Sumberharjo)
2. Alat Pembuat Parut (2 unit / Desa Bolosingo)
3. Alat Pembuat Kerupuk (1 unit / Desa Mentoro, 2 unit / Desa Tambakrejo)
4. Alat Pemotong Pisang (1 unit/ Desa Sumberharjo, 1 unit / desa Arjowinangun)
5. Alat Perangkat TI (1 unit/Posyantek Kec. Pacitan)

Capaian kinerja Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan% pada tahun 2015 mencapai 5,26 % mengalami (penurunan) dengan target RPJM 2015 sebesar 7,03 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (sama) yaitu sebesar 5,26%.

- **Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%)**

Capaian Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan% dihasilkan dari Jumlah Sarana Prasarana Pedesaan Yang Dibangun tahun 2015 sebanyak 245 sarana prasarana desa dibandingkan dengan Jumlah Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan tahun 2015 sebanyak 332 sarana prasarana desa . Capaian ini



merupakan dampak dari kegiatan sarana prasarana pada APBDes Tahun 2015 yang meliputi sarana Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Perhubungan..

Capaian kinerja Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan% pada tahun 2015 mencapai 73,79 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 57,59 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (menurun) yaitu sebesar 1,51%.

- Lembaga ekonomi perdesaan (%)

Capaian Lembaga Ekonomi Perdesaan% dihasilkan dari Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Baru tahun 2015 sebanyak 82 lembaga dibandingkan dengan Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Tahun Dasar tahun 2015 sebanyak 3.765 lembaga . Capaian ini merupakan dampak dari :

- Lembaga Ekonomi Dasar yaitu UPKu 71, Pokmas PPKM 1.574, SPP 1.837, BUMDes/LKD 166 dan PWTAD 117
- Lembaga Ekonomi Baru Tahun 2015 yaitu BUMDes 46, SPP 4, UPKu 14, PUEM, 10 dan TTG 8

Capaian kinerja Lembaga Perdesaan% pada tahun 2015 mencapai 2,17 % mengalami (peningkatan) dengan target RPJM 2015 sebesar 1,61 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (menurun) yaitu sebesar 0,41%

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung melalui 1 (satu) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 17

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	922.450.000	601.293.775	65,18	321.156.225

Dari tabel capaian kinerja sasaran 17 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 17 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 17 tahun 2015 mencapai 152,69% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 17 yang pada tahun 2015 mencapai 65,18 sehingga masih terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 321.156.225,00.



Tujuan 9:
**MENINGKATKAN TATANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
YANG BERBUDAYA, BERBUDI LUHUR DAN DAMAI**

SASARAN STRATEGIS 18

*Terwujudnya Kehidupan
Bermasyarakat Yang Rukun Dan
Damai*

Sasaran “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “*Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai*” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kriminalitas	18,93	26,52	24,2	28,47	1,6	1,9	84,21
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,48	72,91	73,25	73,27	73,36	74,08	100,98
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18								92,60

Tercapainya sasaran Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai dengan indikator utama penurunan angka kriminalitas dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Kasus tindak kriminal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sebanyak 183 kasus. Dengan demikian angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 mengalami penurunan 79% dibanding tahun 2014, yaitu tahun 2014 angka kriminalitas 2,4 dan tahun 2015 ada 1,9. Capaian kinerja indikator



Angka Kriminalitas tahun 2015 mencapai 118% dari target 1,6.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh :

- a) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

- **Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pacitan tahun 2015 ada 62 orang. Jika dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sejumlah 599.476 jiwa, maka rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 1,03. Dengan demikian dari target 0,99 yang ditetapkan tahun 2015 sudah lebih 0,04 dari target

- **Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (%)**

Jumlah Petugas LINMAS di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ada 5.402 orang, Jika dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sejumlah 599.476 jiwa, maka rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 90. Dengan demikian dari target 99 yang ditetapkan tahun 2015 masih belum tercapai, namun jika dibanding capaian Tahun 2014 mengalami perkembangan 7%

- **Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan**

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2015 ada 3884 pos siskamling. Dari data tersebut Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2015 mencapai 22,71 sehingga capaian kinerja Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan tidak tercapai target yang ditetapkan pada tahun 2015

- **Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Kabupaten Pacitan**

Capaian target cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2015 mencapai 104%, yaitu dari target 90% yang ditetapkan daerah di Tahun 2015 terealisasi 94%.



Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran PERDA di Tahun 2015 sebanyak 242 pelanggaran dan terselesaikan 229. Dan jika disesuaikan target secara nasional yaitu 100% di Tahun 2016, di Kabupaten Pacitan telah mencapai 94%. Capaian target tersebut didukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2015 yaitu :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan :
 - Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
 - Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda.
 - Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda

- **Cakupan patroli petugas Satpol PP**

Capaian cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 100%. yaitu dari 12 jumlah kelompok patroli yang ada di Kabupaten Pacitan dalam sehari telah melaksanakan 2 kali patroli, sehingga jika dibanding dengan jumlah kecamatan yang ada yaitu 12 Kecamatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2015.

- Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2015 ada 284 pelanggaran. Dari jumlah pelanggaran tersebut yang dapat terselesaikan ada 256 pelanggaran, sehingga realisasi dari indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2015 adalah 90%, dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2015 adalah 101% dari target 89% yang ditetapkan Tahun 2015.

- **Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**

Indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota pada tahun 2015 sebesar 0.001 atau mencapai -0.001 dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dicapai



melalui perbandingan target tahun 2015 sebesar 0.002 dan capaian tahun 2015 sebesar 0.001.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/kegiatan Operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran (PMK) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas PMK

Maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 0.001 dan mengalami peningkatan sebesar 0 apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)

Capaian prosentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) tahun 2015 mencapai 7 menit. Capaian kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) pada tahun 2015 mencapai 7 menit sesuai dengan target RPJM 2015 sebesar 7 menit, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 7 menit.

- Indek Pembangunan Manusia (IPM)

- a) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 mencapai 72,07 dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 74,08 pada akhir tahun 2015. Naiknya IPM ini bersumber dari peningkatan keempat komponen pendukungnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.
- b) Naiknya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) ini bersumber dari peningkatan ke empat komponen pendukungnya yaitu angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), Rata rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM) tersebut secara umum dapat menunjukkan kemajuan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat



Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 15 (limabelas) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 18

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	760.000.000	740.543.650	97,44	19.456.350
2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	40.000.000	40.000.000	100,00	-
3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.047.630.000	1.034.064.200	98,71	13.565.800
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	600.000.000	563.940.000	93,99	36.060.000
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	189.450.000	188.502.000	99,50	948.000
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	330.000.000	330.000.000	100,00	-
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	505.200.000	503.308.000	99,63	1.892.000
8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	675.000.000	167.966.500	24,88	507.033.500
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	245.000.000	244.999.850	100,00	150
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	362.000.000	356.629.700	98,52	5.370.300
11	Program Pengembangan Nilai Budaya	283.000.000	280.733.500	99,20	2.266.500
12	Program pendidikan politik masyarakat	915.000.000	912.875.235	99,77	2.124.765
13	Program pengembangan wawasan kebangsaan	308.675.000	303.092.575	98,19	5.582.425
14	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.947.800.000	1.940.665.010	99,63	7.134.990
15	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	425.000.000	412.554.000	97,07	12.446.000
Jumlah		8.633.755.000	8.019.874.220	92,89	613.880.780

Dari tabel capaian kinerja sasaran 18 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 18 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 18 tahun 2015 mencapai 92,60% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 18 yang pada tahun 2015 mencapai 92,89% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 613.880.780,00.



SASARAN STRATEGIS 19

Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat**” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19

NO	INDIKATOR	REALISASI				2015		
		2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3,60	3,60	40,76	60	60	72	120,00
2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	62,61	62,61	76,22	77,4	83,00	87,00	104,82
Rata-rata capaian indikator kinerja 19								112,41

Tercapainya sasaran Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat dengan indikator utama Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Prosentase kader bina ketahanan keluarga yang juga didukung oleh beberapa indikator pendukung dengan uraian sebagai berikut:

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial

Indikator capaian kinerja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2015 terealisasi sebesar



sejumlah 27.104 orang atau 116%. Capaian ini meningkat 8.556 orang jika dibanding dengan tahun 2014 Target kinerja ini dapat mencapai target yang ditetapkan dengan dukungan kegiatan Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pembangunan Pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT2), Gerakan terpadu mensejahterakan masyarakat pacitan, dan Pemberdayaan dan bantuan stimulan bagi keluarga rentan masyarakat di sekitar daerah industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri tembakau

- **PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)**

Capaian PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE dihasilkan dari tahun 2015 sebanyak 24.973 orang atau 100,20% jika dibanding tahun 2014 meningkat sebesar 1,94% atau sejumlah 483 orang Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

- **Panti sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)**

Capaian Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dihasilkan 14 unit pada tahun 2015 dibandingkan dengan target tahun 2015 sebanyak 15 unit atau baru tercapai sebesar 93,33%. Capaian ini merupakan dampak dari Kegiatan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial meningkat karena adanya bantuan dari Pusat dan propinsi

- **Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan target 76 WKSBM, tahun 2011 realisasi 19 unit (25 %), tahun 2012 realisasi 24 unit (31,57 %), tahun 2013 realisasi 36 unit (47,36 %), tahun 2014 realisasi 63 unit (82,8 %) ,tahun 2015 realisasi 63 Unit (82,8 %) dari jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 76 lembaga yang seharusnya menyediakan sarana prasarana**



pelayanan kesejahteraan sosial

- Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 75 %. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2015 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu adalah sebesar 32 orang sedangkan pelayanan yang masuk kedalam unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- **Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)**

Indikator Kinerja Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah pada tahun 2015 terealisasi sebesar 42,19% atau mencapai 92,60 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 sebesar 45,56 hal tersebut dikarenakan adanya moratorium yang merupakan kebijakan pemerintah pusat Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program Penguatan Kelembagaan dan Pengarus utamaan gender / kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan
- Meningkatnya pemahaman kelembagaan PUG bagi perempuan dan anak.



Pada tahun 2015 jumlah perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah sebesar 4.132 orang sedangkan jumlah pekerja perempuannya adalah 9.809 orang yang tersebar diberbagai sektor antara lain pertanian, perdagangan, industri dan jasa, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 92,60 % atau realisasi 42,19 mengalami penurunan sebesar 0,05 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 42,24%.

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga(%)**

Indikator Kinerja Rasio Kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 terealisasi sebesar 0,014 % atau mencapai 81,07 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 11,35% hal ini dikarenakan semakin menurun angka capaian semakin bagus sehingga semakin sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga disuatu wilayah semakin bagus nilainya Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/kegiatan P2WKSS dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak serta Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau
- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2015 kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Pacitan sebanyak 22 kasus dari 153.554 kepala keluarga, dari jumlah kasus KDRT tersebut sebanyak 22 kasus telah ditangani dengan baik termasuk yang ditangani secara kekeluargaan, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 81,07 % atau realisasi 0,014 mengalami penurunan sebesar 0,01 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,024%.



- **Jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)**

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2015 sebesar 0,01 % atau mencapai 387,50 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 38,75% karena semakin menurun angka capaian semakin bagus

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak

Pada tahun 2015 jumlah pekerja umur 5-14 tahun di Kabupaten Pacitan sebanyak 36 anak sedangkan jumlah pekerja usia 15 tahun keatas sebanyak 333.778 anak, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 387,50 % atau realisasi 0,01 mengalami penurunan sebesar 0,64 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,65%

- **Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)**

Indikator Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2015 sebesar 79,20 % atau mencapai 104,69 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 75,65 %

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pengarus utamaan gender dan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga di lingkungan industri rokok dan perkebunan tembakau serta kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan menguatnya ekonomi keluarga miskin di lingkungan bahan baku industri hasil tembakau (IHT, CUKAI)

Pada tahun 2015 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pacitan sebanyak 169.212 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 212.242 orang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 104,69 % atau realisasi 79,20 mengalami penurunan sebesar 1 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,73%

- **Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)**

Indikator Kinerja Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 132,89 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 75,25%

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan Penyuluh Bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera serta kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya pemahaman kelembagaan PUG bagi perempuan dan anak.
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan
- Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2015 jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari



tindak kekerasan yang terselesaikan sebesar 32 orang sedangkan yang mengajukan pengaduan perlindungan perempuan dan akan sebanyak 32 orang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 132,89 % atau realisasi 100 % mengalami kenaikan sebesar 30 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 70,27%

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)**

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 75 %.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2015 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu adalah sebesar 32 orang sedangkan pelayanan yang masuk kedalam unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- **Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)**

Indikator Kinerja Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban



kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 133,33 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 75%..

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung oleh kegiatan P2TP2A dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatkan Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak

Pada tahun 2015 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 32 korban dan jumlah korban yang membutuhkan layanan bimbingan rohani sebanyak 32 korban, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 133,33 % atau realisasi 100 % mengalami kenaikan sebesar 22 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 78%.

- **Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)**

Indikator Kinerja Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 125 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 80 %.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatkan Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatkan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2015 jumlah korban kekerasan yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 15 perkara sedangkan jumlah



perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 15 perkara. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 125 % atau realisasi 100 % mengalami kenaikan sebesar 19 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 81%.

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)**

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2015 sebesar 90,62 % atau mencapai 112,54 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 80,52 %.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
- Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Pada tahun 2015 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah sebanyak 29 orang sedangkan jumlah seluruh perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebanyak 32 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 112,54 % atau realisasi 90,62 % mengalami kenaikan sebesar 13 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 78%.

- **Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan (%)**

Indikator Kinerja Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan pada tahun 2015 sebesar 36,96 % atau mencapai 101,26 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 36,5%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun



2015 adalah 36,5%

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak

Pada tahun 2015 jumlah advokasi dan fasilitasi PUG adalah sebanyak 86.194 orang sedangkan jumlah seluruh perempuan adalah sebanyak 233.181 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 101,26 % atau realisasi 36,96 % mengalami kenaikan sebesar 2 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 35%.

- **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)**

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 adalah 100%.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan P2TP2A dan Pemberdayaan lembaga berbasis gender dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak

Pada tahun 2015 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus sedangkan pelayanan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 32 kasus. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.



- **Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)**

Indikator Kinerja Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2015 sebesar 0,9 % atau mencapai 194,44 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 1,75 %, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 hal ini dikarenakan semakin kecil rata-rata jumlah anak per keluarganya semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan kegiatan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi dan penyusunan data kependudukan dan keluarga dan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Bagi pasangan usia subur untuk menjadi peserta KB
- Meningkatnya Peserta KB aktif

Pada tahun 2015 jumlah jiwa dalam rumah tangga sebanyak 176.150 jiwa sedangkan jumlah keluarga sebanyak 194.454 KK. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 1,75 % atau realisasi 0.9 % mengalami penurunan 1 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 1,25%.

- **Peserta KB aktif (%)**

Indikator Kinerja Peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 78,40 % atau mencapai 97,95 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 80,04%, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan akseptor banyak yang Drop out dan ingin mempunyai anak lagi.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pelayanan konseling KB dan kegiatan Pembinaan Keluarga dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan PUS yang menjadi peserta KB menggunakan metode efektif
- Meningkatnya sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB



secara efektif

Pada tahun 2015 jumlah akseptor KB sebanyak 94.244 akseptor sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 120.210 orang jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 97,95 % atau realisasi 78,40 % mengalami penurunan 2 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,98%.

- **Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)**

Indikator Kinerja Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015 sebesar 27,85 % atau mencapai 128,19 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 35,7%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan semakin sedikit keluarga pra-sejahtera disuatu wilayah maka semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan KBPP yaitu Kegiatan pembinaan ketahanan keluarga terpadu bersumberdaya masyarakat dan kegiatan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kualisi kependudukan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya komitmen steac holders dalam pemenuhan peserta KB aktif
- Memperkuat dukungan masyarakat dalam penggarapan program KB

Pada tahun 2015 jumlah Pra-sejahtera dan KS-I sebanyak 50.063 KK sedangkan jumlah keluarga sebanyak 179.754 KK. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 128,19 % atau realisasi 27,85 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 27,85%.

- **Kader bina ketahanan keluarga (%)**

Indikator Kinerja Kader bina ketahanan keluarga pada tahun 2015 sebesar 87,99 % atau mencapai 101,14 % dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 87%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Kegiatan



Peningkatan kapasitas kader dan lomba posdaya serta pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan (BKB, BKR, BKL) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan anggota Tri Bina (BKB, BKR, BKL, BKL, Keluarga Harmonis, UPPKS)
- Meningkatnya cakupan anggota Tri Bina (BKB, BKR, BKL) ber KB

Pada tahun 2015 jumlah kader bina ketahanan keluarga yang telah dilatih ketrampilan sebagai kader tribina sebanyak 4.307 orang sedangkan jumlah kader tibina di kabupatenpacitan adalah 4.805 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 101,14 % atau realisasi 87,99 % mengalami kenaikan sebanyak 11 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 77,4%.

- **Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)**

Indikator Kinerja Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2015 sebesar 1,47 % atau mencapai 238,09 % dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 3,5, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan semakin sedikitPUS dibawah usia 20 tahun disuatu wilayah maka capaiannya semakin baik.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan KIE tentang pendewasaan usia perkawinan (KRR), Pengadaan sarana prasarana pengelolaan program KB, Pembinaan keluarga berencana dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
- Meningkatnya sarana prasarana pengelolaan program KB
- Meningkatnya sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB secara aktif

Pada tahun 2015 jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun adalah 117.520 orang sedangkan jumlah PUS seluruhnya adalah 120.210 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015



mencapai 238,09 % atau realisasi 1,47 % mengalami kenaikan sebanyak 0 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 1,43%.

- **Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)**

Indikator Kinerja Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 78,40 % atau mencapai 120,61 % dari target RPJMD tahun 2015 adalah 65%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pelayanan KB dan pelayanan Konseling KB dan Kegiatan Penunjang Harganas dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB dengan kontrasepsi mantap
- Meningkatnya cakupan PUS yang menjadi peserta KB menggunakan metode efektif
- Meningkatnya komitmen penggarapan program KB dan PP di Kabupaten Pacitan

Pada tahun 2015 jumlah Peserta KB aktif adalah sebanyak 94.244 orang sedangkan jumlah PUS sebanyak 120.210 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 120,61 % atau realisasi 78,40 % mengalami penurunan sebanyak 2 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,98%.

- **Cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)**

Indikator Kinerja Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) pada tahun 2015 sebesar 9,98 % atau mencapai 50,10 % dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 5%, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan tingginya drop aut kesertaan ber KB sebesar 9,98 % dan angka kehamilan sebesar 2,20% serta PUS yang benar-benar ingin punya anak tidak menggunakan kontrasepsi karena factor lain yang mempengaruhinya, misalnya karena disebabkan



alasan kesehatan ibu dan lain sebagainya. Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Meningkatnya peserta KB aktif

Pada tahun 2015 jumlah Pasangan Usia Subur yang belum terlayani alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin anak lagi dan ingin anak tapi ditunda sebanyak 11.996 akseptor sedangkan PUS yang ada sebesar 120.210 akseptor. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 50,10 % atau realisasi 9,98 % mengalami penurunan sebanyak 2 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 79,98%.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)

Indikator Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB pada tahun 2015 sebesar 79,61 % atau mencapai 113,73 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 70%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan PPKBD / Sub PPKBD untuk mensukseskan program KB

Pada tahun 2015 jumlah anggota BKB ber KB sebanyak 95.706 orang sedangkan jumlah anggota BKB seluruhnya sebanyak 120.210 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 113,73 % atau realisasi 79,61 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 80,5%.

- **Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB (%)**

Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB pada tahun 2015 sebesar 87,76 % atau mencapai 100,87 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 87%,



capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, kegiatan penguatan ekonomi masyarakat anggota kelompok UPPKS lingkungan industri tembakau dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya anggota UPPKS ber KB mandiri
- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan menguatnya ekonomi keluarga miskin di lingkungan bahan baku industri hasil tembakau (IHT, CUKAI)

Pada tahun 2015 jumlah Anggota UPPKS ber KB adalah sebanyak 2.369 orang sedangkan jumlah anggota UPPKS setatus PUS sebanyak 2.730 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100,87 % atau realisasi 87,76 % mengalami penurunan sebanyak 2 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 89,72%.

- **Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel**

Indikator Kinerja Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel pada tahun 2015 sebesar 0,22 % atau mencapai 11 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 2, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan adanya moratorium sebagai kebijakan pemerintah pusat

Pada tahun 2015 jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana adalah sebanyak 39 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan sebanyak 171 Desa/Kelurahan. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 11 % atau realisasi 0,22 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,23%.

- **Petugas PPKBD per desa (%)**

Indikator Kinerja Petugas PPKBD per desa pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 100, capaian



tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Operasional PPKBD dan sub PPKBD dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya pengetahuan PPKBD / Sub PPKBD untuk mensukseskan program KB.

Pada tahun 2015 jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan adalah sebanyak 171 Desa/Kelurahan sedangkan jumlah PKBD sebanyak 171 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- **Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)**

Indikator Kinerja Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 2,68 % atau mencapai 8,93 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 30 %, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2015 yang dikarenakan terbatasnya penyediaan dana APBD dalam belanja pengadaan alat dan obat kontrasepsi sebagai kewajiban pemenuhan SPM 30% tiap tahunnya.

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan pengadaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya pelayanan program dan kesertaan KB aktif

Pada tahun 2015 jumlah Pemasangan kontrasepsi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sebanyak 270 akseptor sedangkan jumlah pasangan suami istri (peserta KB baru) di Kabupaten Pacitan sebanyak 10.045 pasang, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 8,93 % atau realisasi 2,68 % mengalami penurunan sebanyak 1 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 3,36%.



- **Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel setiap tahun**

Indikator Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel setiap tahun pada tahun 2015 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 100%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengelolaan data dan informasi program KB dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Tersedianya data mikro di Desa / Kelurahan tiap-tiap keluarga

Pada tahun 2015 jumlah seluruh data mikro yang ada di desa/kelurahan adalah sebanyak 171 buku/set sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan sebanyak 171 Desa/Kelurahan, jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 100 % atau realisasi 100 % mengalami kesamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 100%.

- **Sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja (%)**

Indikator Kinerja Sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja pada tahun 2015 sebesar 35,05 % atau mencapai 166,83 % dari target RPJMD tahun 2015 yaitu 30%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya cakupan sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada tahun 2015 jumlah sekolah yang diberikan KIE tentang reproduksi remaja adalah sebanyak 60 sekolah sedangkan jumlah sekolah dan organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran KIE reproduksi remaja adalah sebanyak 123 sekolah dan organisasi kepemudaan. jika memperhatikan hal



tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 166,83 % atau realisasi 35,05 % mengalami kenaikan sebanyak 0,5 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 35%.

- **Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**

Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri pada tahun 2015 sebesar 73,9 % atau mencapai 105,57 % dari target RPJMD tahun 2015, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015

Capaian kinerja tahun 2015 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Meningkatnya anggota UPPKS ber KB mandiri

Pada tahun 2015 jumlah anggota UPPKS yang ber KB mandiri adalah sebanyak 1.852 akseptor sedangkan jumlah PUS anggota kelompok UPPKS sebanyak 2.503 orang. jika memperhatikan hal tersebut maka capaian kinerja akhir tahun 2015 mencapai 105,57 % atau realisasi 73,9 % mengalami kenaikan sebanyak 3 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 71,6%.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut didukung melalui 14 (empat belas) program, yaitu:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 19

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	508.000.000	407.370.000	80,19	100.630.000
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	105.000.000	105.000.000	100,00	-
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	20.000.000	20.000.000	100,00	-
4	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	911.000.000	899.534.770	98,74	11.465.230
5	Program Pengembangan	150.000.000	146.100.000	97,40	3.900.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
	Wilayah Transmigrasi				
6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	75.000.000	73.760.250	98,35	1.239.750
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.851.975.000	1.808.968.000	97,68	43.007.000
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.646.606.420	1.618.009.200	98,26	28.597.220
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	230.000.000	227.572.680	98,94	2.427.320
10	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	392.800.000	392.689.900	99,97	110.100
11	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	55.000.000	54.720.000	99,49	280.000
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	160.000.000	160.000.000	100,00	-
13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000	44.590.000	99,09	410.000
14	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	150.000.000	149.020.000	99,35	980.000
Jumlah		6.300.381.420	6.107.334.800	96,94	193.046.620

Dari tabel capaian kinerja sasaran 19 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 19 tahun 2015 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 19 tahun 2015 mencapai 112,41% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 19 yang pada tahun 2015 mencapai 96,94 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 193.046.620,00.



3. PERMASALAHAN UMUM DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah:

- 1) Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan; baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- 4) Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 6) Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2015 antara lain :

- 1) Masih kurang optimal koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan). Masih adanya perbedaan persepsi tentang *overlapping* tugas dan fungsi antara SKPD/Unit Kerja bisa menyebabkan adanya kegiatan ganda.
- 2) Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang, masih



adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya sehingga kinerjanya tidak optimal dan mempengaruhi kinerja organisasi, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga kurang maksimal;

- 3) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
- 4) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
- 5) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan, masih banyak SKPD/Unit kerja yang belum memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga sumber data kurang valid dan terukur; Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian, pengembangan dan statistik sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 7) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1) Sudah dimulai kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja untuk memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya.
- 2) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif; Dalam hal ini sudah dirintis dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016

- 3) Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan baik melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai (mutasi) menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Perlu peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui diklat, seminar, studi banding, tugas belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
- 4) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 5) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- 6) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di SKPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik; Hal ini sudah dirintis dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Bupati dengan SKPD, Rapat Kerja Bupati dengan Instansi Vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.
- 8) Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pacitan. Meningkatnya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Grindulu Mapan, Posdaya, Bulan Bhakti Gotong Royong dan lain-lain.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna serta tak kalah pentingnya dana/anggaran yang tersedia. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2015.

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber – sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2015 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta



masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
 - Dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
3. Lain – lain pendapatan daerah yang syah, meliputi :
 - Hibah;
 - Dana Darurat;
 - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

- a Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- b Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber – sumber pendapatan daerah
- c Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
- d Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;



- f Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.423.668.391.048,82 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.426.596.968.332,80 melebihi target sebesar Rp. 2.928.577.283,98 atau mencapai 100,20%.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 126.449.078.416,80;
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 863.523.504.816,00; dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah sebesar Rp. 436.624.385.100,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.



Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, berdasarkan data realisasi pendapatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.426.596.968.332,80 mengalami kenaikan sebesar Rp. 166.091.572.269,21 atau 11,64% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai Rp. 1.260.505.396.063,59. Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.172.133.395,21 atau 24,85 % dibandingkan tahun 2014 karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.271.413.865,00 atau 6,83% dibandingkan tahun 2014 karena adanya tambahan dana dari dana alokasi umum yang dialokasikan untuk kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.648.025.009,00 atau 24,40% dibandingkan tahun 2014 karena adanya tambahan dana dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Secara lengkap perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan 2015, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2014 dan 2015**

NO	Pendapatan	Tahun				Growth (%)
		2014		2015		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	101.276.945.021,59	8,03	126.449.078.416,80	8,86	24,85
	Hasil Pajak Daerah1)	20.684.068.972,69	1,64	21.789.927.221,50	1,52	5,35
	Hasil Retribusi Daerah	20.455.509.921,00	1,62	20.411.292.109,75	1,43	(0,22)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.333.710.205,31	0,19	2.421.047.544,06	0,16	3,74
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.803.655.922,59	4,59	81.826.811.541,49	5,73	41,56



2	Dana Perimbangan	808.252.090.951,00	64,12	863.523.504.816,00	60,53	6,84
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.639.206.951,00	4,41	53.312.201.816,00	3,73	(4,18)
	Dana Alokasi Umum	700.743.024.000,00	55,59	714.847.233.000,00	50,1	2,01
	Dana Alokasi Khusus	51.869.860.000,00	4,12	95.364.070.000,00	6,68	83,85
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	350.976.360.091,00	27,84	436.624.385.100,00	30,6	24,40
	Pendapatan Hibah	2.100.000,00	0,00	1.050.000,00	7,36	(50,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	63.881.618.091,00	5,07	60.742.249.100,00	4,25	(4,91)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182.420.105.000,00	14,47	281.230.973.000,00	19,71	54,17
	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	104.672.537.000,00	8,30	94.650.113.000,00	6,63	(9,58)
JUMLAH		1.260.505.396.063,59	100	1.426.596.968.332,80	100	13,18

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

- % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah

- Growth : Pertumbuhan (persen) tahun 2014 ke tahun 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif cukup besar yaitu sebesar Rp. 863.523.504.816,00 dari seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2015 yang meliputi :

- Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 53.312.201.816,00
- Dana Alokasi Umum Rp. 714.847.233.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 95.364.070.000,00

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 126.449.078.416,80 atau 8,86% dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.

Upaya yang dilakukan dalam memacu peningkatan PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :



- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;
- c. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada masyarakat;
- d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- e. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah.
- f. Pendapatan lain – lain yang syah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan serta meningkatkan perluasan sumber – sumber pendapatan daerah;
- g. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang syah terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK, Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dan Bantuan Keuangan
- h. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.426.596.968.332,80 atau mencapai 100,21 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.423.668.391.048,82 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2015**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	103.417.083.827,82	126.449.078.416,80	122,27
	- Hasil Pajak Daerah	20.936.000.000,00	21.789.927.221,50	104,08
	- Hasil Retribusi Daerah	16.762.044.579,00	20.411.292.109,75	121,77



	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.373.383.538,82	2.421.047.544,06	102,01
	- Lain-lain PAD yang Sah	63.345.655.710,00	81.826.811.541,49	129,18
2	Dana Perimbangan	877.898.076.582,00	863.523.504.816,00	98,36
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.688.373.582,00	53.312.201.816,00	78,76
	- Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	714.847.233.000,00	100,00
	- Dana Alokasi Khusus	95.362.470.000,00	95.364.070.000,00	100,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	442.353.230.639,00	436.624.385.100,00	98,70
	- Pendapatan Hibah	0	1.050.000,00	0,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	67.489.555.639,00	60.742.249.100,00	90,00
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	280.213.562.000,00	281.230.973.000,00	100,36
	- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	94.650.113.000,00	94.650.113.000,00	100,00
JUMLAH		1.423.668.391.048,82	1.426.596.968.332,80	100,21

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 126.449.078.416,80 atau mencapai 122,27 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 103.417.083.827,82. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp. 21.789.927.221,50
- Retribusi daerah sebesar Rp. 20.411.292.109,75
- Pengelolaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.421.047.544,06
- Lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 81.826.811.541,49

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	280.000.000,00	357.973.725,00	127,85
2	Pajak Restoran	985.000.000,00	1.041.207.994,50	105,71
3	Pajak Hiburan	42.000.000,00	48.278.120,00	114,95
4	Pajak Reklame	450.000.000,00	440.595.950,00	97,91
5	Pajak Penerangan Jalan	7.440.000.000,00	7.784.698.642,00	104,63



6	Pajak Parkir	14.000.000,00	15.447.000,00	110,34
7	Pajak Air Tanah	45.000.000,00	54.033.450,00	120,07
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	430.000.000,00	731.661.047,00	170,15
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.500.000.000,00	10.687.348.659,00	101,78
10	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	628.682.634,00	83,82
JUMLAH		20.936.000.000,00	21.789.927.221,50	104,08

Keterangan : Data sebelum audit BPK

**Tabel Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Retribusi Jasa Umum	9.574.911.000,00	10.276.862.140,00	107,33
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.163.178.000,00	6.133.063.140,00	118,78
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.412.000,00	35.412.000,00	100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.581.946.000,00	1.664.380.500,00	105,21
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.942.250.000,00	2.012.546.500,00	103,62
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	429.330.000,00	122,67
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.125.000,00	2.130.000,00	100,24
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	-	0,00
B	Retribusi Jasa Usaha	6.281.438.579,00	8.932.243.191,00	142,20
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	704.395.000,00	1.121.438.924,00	159,21
2	Retribusi Tempat Pelelangan	709.291.579,00	873.931.167,00	123,21
3	Retribusi Terminal	135.715.000,00	142.818.000,00	105,23
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	91.000.000,00	148.798.000,00	163,51
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	16.500.000,00	20.490.000,00	124,18
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.220.000,00	18.120.000,00	105,23
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.607.317.000,00	6.606.647.100,00	143,39
C	Retribusi Perizinan Tertentu	905.695.000,00	1.202.186.778,75	132,74
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	325.000.000,00	622.232.610,00	191,46
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	35.000.000,00	40.000.000,00	114,29
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	510.000.000,00	502.549.168,75	98,54
4	Retribusi Izin Trayek	35.695.000,00	37.405.000,00	104,79
JUMLAH		16.762.044.579,00	20.411.292.109,75	121,77

Keterangan : Data sebelum audit BPK



**Tabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD			
1	Bank Jatim	2.240.358.538,82	2.240.358.544,06	100,00
2	Bank Perkreditan Rakyat	133.025.000,00	180.689.000,00	135,83
	JUMLAH	2.373.383.538,82	2.421.047.544,06	102,01

Keterangan : Data sebelum audit BPK

**Tabel Target dan Realiasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	120.050.000,00	168.700.000,00	140,52
	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	21.400.000,00	22.200.000,00	103,74
	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	1,00	7.500.000,00	750000000,00
	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	98.650.000,00	139.000.000,00	140,90
B	Penerimaan Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.984.412.404,48	165,37
	Jasa Giro Kas Daerah	1.200.000.000,00	1.984.412.404,48	165,37
C	Pendapatan Bunga Deposito	9.675.000.000,00	16.922.958.945,09	174,91
	Rekening Deposito pada BPD	8.100.000.000,00	13.969.143.834,02	172,46
	Rekening Deposito Pada BRI	1.000.000.000,00	1.804.986.335,00	180,50
	Rekening Deposito Pada BNI	500.000.000,00	964.869.872,00	192,97
	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	75.000.000,00	183.958.904,07	245,28
D	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.894.140,00	148.410.925,00	7835,27
	Bidang Pekerjaan Umum	1.894.140,00	148.410.925,00	7835,27
E	Pendapatan dari Pengembalian	30.513.926,00	76.078.584,86	249,32
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.077.474,00	51.242.132,00	724,02



	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	3.730.000,00	5.130.000,00	137,53
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan	19.706.452,00	19.706.452,86	100,00
F	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	487.490.000,00	502.241.763,66	103,03
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	487.490.000,00	502.241.763,66	103,03
G	Pendapatan dari BLUD	36.175.650.000,00	44.921.384.979,34	124,18
	Pedapatan Dari BLUD	36.175.650.000,00	44.921.384.979,34	124,18
H	Pendapatan Lain-lain	1.210.536.144,00	1.549.773.580,20	128,02
	Pendapatan Lain-Lain	1.210.536.144,00	1.549.773.580,20	128,02
I	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	14.444.521.500,00	15.552.850.358,86	107,67
	Dana kapitasi JKN Pada FKTP	14.444.521.500,00	15.552.850.358,86	107,67
JUMLAH		63.345.655.710,00	81.826.811.541,49	129,18

Keterangan : Data sebelum audit BPK

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Adanya Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk di dalamnya juga pelimpahan piutang PBB yang data wajib pajak dan obyek pajaknya tidak jelas;
2. Terbatasnya kemampuan SDM pengelola PBB utamanya terkait penentuan basis data PBB (NJOP tanah dan Bangunan)
3. Tingkat akurasi data pajak PBB dan BPHTB yang berpengaruh terhadap data wajib pajak belum akurat mengingat penetapan NJOP belum sesuai dengan harga pasar.
4. Aturan tentang pengelolaan Dana JKN yang turun terlambat setelah transfer dana JKN melalui Kas Umum Daerah berjalan



selama 5 bulan (Januari s/d Mei), sedangkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, baru ditetapkan tanggal 21 April 2014 yang mengamanatkan bahwa dana JKN harus ditranfer langsung ke rekening masing – masing bendahara FKTP Puskesmas, sehingga daerah kesulitan untuk mengakomodir pendapatannya karena adanya yang ditranfer melalui rekening BUD dan Rekening masing – masing FKTP.

5. Infrastruktur yang ada kurang memadai, khususnya akses jalan yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan.
6. Pengelolaan pariwisata yang belum maksimal dengan belum adanya sistem yang transparansi dan akuntabel terhadap pemungutan retribusi masuk tempat wisata dan promosi wisata, maka pendapatan dari sektor pariwisata masih relatif kecil.

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi/koordinasi yang baik dengan Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa, serta dengan pihak Bank penerima pembayaran PBB dan KPP Pratama Ponorogo dalam rangka sinkronisasi data tunggakan / piutang PBB dan upaya penagihannya serta mengkonsolidasikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemungutan PBB tahun berjalan
2. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat – diklat teknis terkait dengan pengelolaan PBB.
3. Penyusunan regulasi yang terkait dengan penetapan NJOP PBB dan BPHTB melalui pemutakhiran data zona nilai tanah sebagai dasar penetapan besarnya PBB dan BPHTB;



4. Melakukan Konsultasi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan mekanisme pengelolaan JKN.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur, dalam rangka menarik investor agar menanamkan investasinya di Kabupaten Pacitan.
6. Dibentuk manajemen pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Secara definitif belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini demikian penting karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.



Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2015 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.



Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya maupun masyarakat;
4. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2015 lebih menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan



kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2015 dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;



21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7 struktur APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2015 proporsi belanja langsung mendapat alokasi sebesar 32,76% dari total belanja daerah.

**Tabel Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.043.151.586.439,00	67,24
1	Belanja Pegawai	785.576.121.320,00	50,64
2	Belanja Hibah	35.989.451.296,00	2,32
3	Belanja Bantuan Sosial	7.558.843.816,00	0,49
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	4.401.653.442,00	0,28



5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Parpol	205.213.830.065,00	13,23
6	Belanja Tidak Terduga	4.411.686.500,00	0,28
	BELANJA LANGSUNG	508.292.606.313,00	32,76
1	Belanja Pegawai	43.775.679.100,00	2,82
2	Belanja Barang Dan Jasa	188.212.312.146,00	12,13
3	Belanja Modal	276.304.615.067,00	17,81
	JUMLAH BELANJA	1.551.444.192.752,00	100,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

2. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.551.444.192.752,00 realisasinya mencapai Rp. 1.408.458.278.765,44 atau 90,78% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 921.154.743.893,45 dan belanja langsung sebesar Rp. 487.303.534.871,99 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 142.985.913.986,56

Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2015 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
2. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial,



ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.
Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/ RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, PNPM, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;
5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung di alokasikan untuk :

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai



manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
 - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :



Tabel Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

NO	JENIS BELANJA	TARGET		REALISASI	
		JUMLAH	PROPORSI (%)	JUMLAH	PROPORSI (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.043.151.586.439,00	67,24	921.154.743.893,45	65,40
1	Belanja Pegawai	785.576.121.320,00	50,64	675.833.545.402,00	47,98
2	Belanja Hibah	35.989.451.296,00	2,32	31.487.862.975,00	2,24
3	Belanja Bantuan Sosial	7.558.843.816,00	0,49	6.480.899.867,45	0,46
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	4.401.653.442,00	0,28	3.655.296.219,00	0,26
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	205.213.830.065,00	13,23	203.123.076.430,00	14,42
6	Belanja Tidak Terduga	4.411.686.500,00	0,28	574.063.000,00	0,04
	BELANJA LANGSUNG	508.292.606.313,00	32,76	487.303.534.871,99	34,60
1	Belanja Pegawai	43.775.679.100,00	2,82	44.415.456.398,00	3,15
2	Belanja Barang Dan Jasa	188.212.312.146,00	12,13	174.736.431.037,08	12,41
3	Belanja Modal	276.304.615.067,00	17,81	268.151.647.436,91	19,04
	JUMLAH BELANJA	1.551.444.192.752,00	100,00	1.408.458.278.765,44	100,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	1.423.668.391.048,82	1.426.596.968.332,80	100,21
1	Pendapatan Asli Daerah	103.417.083.827,82	126.449.078.416,80	122,27
2	Dana Perimbangan	877.898.076.582,00	863.523.504.816,00	98,36
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	442.353.230.639,00	436.624.385.100,00	98,70
	BELANJA	1.551.444.192.752,00	1.408.458.278.765,44	90,78
1	Belanja tidak langsung	1.043.151.586.439,00	921.154.743.893,45	88,30
2	Belanja langsung	508.292.606.313,00	487.303.534.871,99	95,87
	Surplus/ Defisit	-127.775.801.703,18	18.138.689.567,36	-14,20
	PEMBIAYAAN	127.775.801.703,18	128.275.801.703,18	100,39
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.225.801.703,18	129.225.801.703,18	100,00



2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	146.414.491.270,54	0,00

Keterangan : **Data sebelum audit BPK**

Sesuai Target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat Pacitan.

Sedangkan alokasi pendapatan dan belanja per Satuan kerja menurut urusan wajib dan urusan pilihan dapat disajikan pada tabel berikut



Tabel Rekapitulasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2015

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	URUSAN WAJIB	1.232.385.944.702,67	1.259.279.516.857,59	102,18	849.268.380.403,20	787.356.887.882,84	92,71	391.445.932.118,00	353.541.160.209,00	90,32	1.240.714.312.521,20	1.140.898.048.091,84	91,95
1.01.	PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	547.215.954.495,00	501.241.454.701,80	91,60	45.960.704.750,00	41.092.647.786,00	89,41	593.176.659.245,00	542.334.102.487,80	91,43
1.01.1.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	547.215.954.495,00	501.241.454.701,80	91,60	45.960.704.750,00	41.092.647.786,00	89,41	593.176.659.245,00	542.334.102.487,80	91,43
1.02.	KESEHATAN	48.549.692.769,00	55.898.311.242,97	115,14	53.435.376.472,94	52.427.913.578,94	98,11	77.562.901.509,00	71.828.982.510,00	92,61	130.998.277.981,94	124.256.896.088,94	94,85
1.02.1.02	DINAS KESEHATAN	17.929.390.500,00	19.210.830.850,00	107,15	37.349.165.864,66	36.603.291.163,66	98,00	32.693.855.240,00	26.348.550.319,00	80,59	70.043.021.104,66	62.951.841.482,66	89,88
1.02.1.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.620.302.269,00	36.687.480.392,97	119,81	16.086.210.608,28	15.824.622.415,28	98,37	44.869.046.269,00	45.480.432.191,00	101,36	60.955.256.877,28	61.305.054.606,28	100,57
1.03.	PEKERJAAN UMUM	723.845.500,00	549.601.316,00	75,93	9.558.220.690,64	9.324.445.772,64	97,55	117.388.310.000,00	113.256.305.837,00	96,48	126.946.530.690,64	122.580.751.609,64	96,56
1.03.1.03	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN	80.845.500,00	216.437.500,00	267,72	4.092.638.778,94	4.001.561.791,94	97,77	67.778.125.000,00	66.384.935.550,00	97,94	71.870.763.778,94	70.386.497.341,94	97,93
1.03.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	643.000.000,00	333.163.816,00	51,81	5.465.581.911,70	5.322.883.980,70	97,39	49.610.185.000,00	46.871.370.287,00	94,48	55.075.766.911,70	52.194.254.267,70	94,77
1.04.	PERUMAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.149.000,00	2.788.504.950,00	93,26	2.990.149.000,00	2.788.504.950,00	93,26
1.04.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.149.000,00	2.788.504.950,00	93,26	2.990.149.000,00	2.788.504.950,00	93,26
1.05.	PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	525.780.550,00	95,60	550.000.000,00	525.780.550,00	95,60
1.05.1.03	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	525.780.550,00	95,60	550.000.000,00	525.780.550,00	95,60
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	2.504.454.557,10	2.445.381.505,10	97,64	6.937.967.000,00	6.859.567.544,00	98,87	9.442.421.557,10	9.304.949.049,10	98,54
1.06.1.06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.504.454.557,10	2.445.381.505,10	97,64	6.891.227.000,00	6.812.829.494,00	98,86	9.395.681.557,10	9.258.210.999,10	98,54
1.06.1.20	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740.000,00	46.738.050,00	100,00	46.740.000,00	46.738.050,00	100,00
1.07.	PERHUBUNGAN	2.323.660.000,00	2.786.004.516,00	119,90	2.861.832.114,46	2.801.658.953,46	97,90	3.170.000.000,00	3.060.899.752,00	96,56	6.031.832.114,46	5.862.558.705,46	97,19
1.07.1.07	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.323.660.000,00	2.786.004.516,00	119,90	2.861.832.114,46	2.801.658.953,46	97,90	3.170.000.000,00	3.060.899.752,00	96,56	6.031.832.114,46	5.862.558.705,46	97,19
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	505.000.000,00	546.194.758,00	108,16	1.040.745.956,70	1.023.367.088,70	98,33	2.860.290.425,00	2.766.100.625,00	96,71	3.901.036.381,70	3.789.467.713,70	97,14
1.08.1.08	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	505.000.000,00	546.194.758,00	108,16	1.040.745.956,70	1.023.367.088,70	98,33	2.860.290.425,00	2.766.100.625,00	96,71	3.901.036.381,70	3.789.467.713,70	97,14
1.09.	PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000.000,00	7.659.081.786,00	59,58	12.855.000.000,00	7.659.081.786,00	59,58
1.09.1.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00	1.859.045.500,00	96,32	1.930.000.000,00	1.859.045.500,00	96,32
1.09.1.02	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	468.105.150,00	93,62	500.000.000,00	468.105.150,00	93,62
1.09.1.03	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	4.913.041.916,00	49,13	10.000.000.000,00	4.913.041.916,00	49,13
1.09.1.20	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	418.889.220,00	98,56	425.000.000,00	418.889.220,00	98,56
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	96.420.000,00	107.540.000,00	111,53	1.872.137.140,38	1.662.765.980,38	88,82	1.915.000.000,00	1.839.657.744,00	96,07	3.787.137.140,38	3.502.423.724,38	92,48
1.10.1.10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	96.420.000,00	107.540.000,00	111,53	1.872.137.140,38	1.662.765.980,38	88,82	1.915.000.000,00	1.839.657.744,00	96,07	3.787.137.140,38	3.502.423.724,38	92,48
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	546.412.900,00	99,35	550.000.000,00	546.412.900,00	99,35
1.11.1.12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	546.412.900,00	99,35	550.000.000,00	546.412.900,00	99,35
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN	0,00	0,00	0,00	4.870.678.378,56	4.681.519.342,56	96,12	3.400.239.140,00	3.355.877.417,00	98,70	8.270.917.518,56	8.037.396.759,56	97,18



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja													
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja							
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%					
1.12.1.12	KELUARGA SEJAHTERA																	
1.12.1.12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	4.870.678.378,56	4.681.519.342,56	96,12	3.400.239.140,00	3.355.877.417,00	98,70	8.270.917.518,56	8.037.396.759,56	97,18					
1.13.	SOSIAL	0,00	0,00	0,00	2.579.988.024,62	2.539.574.893,62	98,43	1.075.800.000,00	1.063.796.227,00	98,88	3.655.788.024,62	3.603.371.120,62	98,57					
1.13.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	2.579.988.024,62	2.539.574.893,62	98,43	1.075.800.000,00	1.063.796.227,00	98,88	3.655.788.024,62	3.603.371.120,62	98,57					
1.14.	KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.460.980,00	3.216.905.600,00	98,00	3.282.460.980,00	3.216.905.600,00	98,00					
1.14.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.460.980,00	3.216.905.600,00	98,00	3.282.460.980,00	3.216.905.600,00	98,00					
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	553.500.000,00	660.631.269,09	119,36	2.761.379.347,54	2.646.703.923,54	95,85	1.695.153.750,00	1.677.227.318,00	98,94	4.456.533.097,54	4.323.931.241,54	97,02					
1.15.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	553.500.000,00	660.631.269,09	119,36	2.761.379.347,54	2.646.703.923,54	95,85	1.695.153.750,00	1.677.227.318,00	98,94	4.456.533.097,54	4.323.931.241,54	97,02					
1.16.	PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000.000,00	315.999.585,00	99,37	318.000.000,00	315.999.585,00	99,37					
1.16.1.20	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJINJAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000.000,00	315.999.585,00	99,37	318.000.000,00	315.999.585,00	99,37					
1.17.	KEBUDAYAAN	1.844.250.000,00	2.551.649.550,00	138,36	3.524.095.334,68	3.406.459.173,68	96,66	2.636.000.000,00	2.576.762.106,00	97,75	6.160.095.334,68	5.983.221.279,68	97,13					
1.17.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.844.250.000,00	2.551.649.550,00	138,36	3.524.095.334,68	3.406.459.173,68	96,66	2.636.000.000,00	2.576.762.106,00	97,75	6.160.095.334,68	5.983.221.279,68	97,13					
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.500.000,00	876.648.000,00	99,68	879.500.000,00	876.648.000,00	99,68					
1.18.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.500.000,00	876.648.000,00	99,68	879.500.000,00	876.648.000,00	99,68					
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	4.853.139.286,44	4.718.372.079,44	97,22	7.647.800.000,00	7.365.400.445,00	96,31	12.500.939.286,44	12.083.772.524,44	96,66					
1.19.1.19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	1.551.272.876,36	1.474.308.458,36	95,04	2.837.000.000,00	2.791.761.215,00	98,41	4.388.272.876,36	4.266.069.673,36	97,22					
1.19.1.19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	2.686.875.925,48	2.643.368.069,48	98,38	3.350.800.000,00	3.278.397.526,00	97,84	6.037.675.925,48	5.921.765.595,48	98,08					
1.19.1.19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	614.990.484,60	600.695.551,60	97,68	1.460.000.000,00	1.295.241.704,00	88,72	2.074.990.484,60	1.895.937.255,60	91,37					
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	1.177.789.576.433,67	1.196.179.584.205,53	101,56	207.870.221.125,84	194.199.568.408,68	93,42	91.921.615.215,00	75.111.947.972,00	81,71	299.791.836.340,84	269.311.516.380,68	89,83					
	BUPATI/ WAKIL BUPATI	0,00	0,00	0,00	571.132.286,00	513.294.515,00	89,87			0,00	571.132.286,00	513.294.515,00	89,87					
	DPRD	0,00	0,00	0,00	7.698.716.100,00	7.415.384.960,00	96,32			0,00	7.698.716.100,00	7.415.384.960,00	96,32					
	PPKD	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
1.20.1.20	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	12.704.322.690,22	12.410.691.347,22	97,69	26.254.320.000,00	24.116.577.673,00	91,86	38.958.642.690,22	36.527.269.020,22	93,76					
1.20.1.20	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	2.230.209.822,28	2.159.999.065,28	96,85	18.608.599.000,00	15.536.108.980,00	83,49	20.838.808.822,28	17.696.108.045,28	84,92					
1.20.1.20	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.177.789.576.433,67	1.196.179.584.205,53	101,56	151.154.016.776,98	144.989.086.628,69	95,92	33.687.819.185,00	22.838.708.074,00	67,80	184.841.835.961,98	167.827.794.702,69	90,80					
1.20.1.20	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA	0,00	0,00	0,00	1.522.901.873,54	1.486.255.574,54	97,59	1.069.000.000,00	1.060.773.871,00	99,23	2.591.901.873,54	2.547.029.445,54	98,27					
1.20.1.20	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.966.420.150,80	1.943.647.836,80	98,84	2.580.000.000,00	2.514.522.552,00	97,46	4.546.420.150,80	4.458.170.388,80	98,06					
1.20.1.20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	8.183.424.680,15	1.981.758.681,52	24,22	3.298.400.000,00	2.805.730.596,00	85,06	11.481.824.680,15	4.787.489.277,52	41,70					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.20.1.20	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	707.179.924,88	689.071.906,88	97,44	1.650.000.000,00	1.544.166.373,00	93,59	2.357.179.924,88	2.233.238.279,88	94,74
1.20.1.20	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJINJAN	0,00	0,00	0,00	1.745.958.885,50	1.693.797.996,50	97,01	998.000.000,00	962.775.110,00	96,47	2.743.958.885,50	2.656.573.106,50	96,82
1.20.1.20	KECAMATAN PACITAN	0,00	0,00	0,00	1.849.466.319,98	1.813.435.652,98	98,05	259.328.000,00	258.551.343,00	99,70	2.108.794.319,98	2.071.986.995,98	98,25
1.20.1.20	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	0,00	1.356.806.653,35	1.319.231.429,35	97,23	256.905.000,00	245.290.153,00	95,48	1.613.711.653,35	1.564.521.582,35	96,95
1.20.1.20	KECAMATAN TULAKAN	0,00	0,00	0,00	1.725.468.346,62	1.662.120.508,62	96,33	271.723.030,00	261.247.000,00	96,14	1.997.191.376,62	1.923.367.508,62	96,30
1.20.1.20	KECAMATAN NGADIROJO	0,00	0,00	0,00	1.613.941.783,32	1.584.227.909,32	98,16	253.857.000,00	252.445.996,00	99,44	1.867.798.783,32	1.836.673.905,32	98,33
1.20.1.20	KECAMATAN SUDIMORO	0,00	0,00	0,00	1.087.568.837,26	1.062.545.896,26	97,70	236.446.000,00	236.103.100,00	99,85	1.324.014.837,26	1.298.648.996,26	98,08
1.20.1.20	KECAMATAN ARJOSARI	0,00	0,00	0,00	1.496.881.869,68	1.457.039.036,68	97,34	251.641.000,00	250.107.938,00	99,39	1.748.522.869,68	1.707.146.974,68	97,63
1.20.1.20	KECAMATAN TEGALOMBO	0,00	0,00	0,00	1.271.715.461,98	1.239.580.809,98	97,47	249.342.000,00	245.917.162,00	98,63	1.521.057.461,98	1.485.497.971,98	97,66
1.20.1.20	KECAMATAN NAWANGAN	0,00	0,00	0,00	1.131.081.326,78	1.104.540.755,78	97,65	246.533.000,00	245.401.352,00	99,54	1.377.614.326,78	1.349.942.107,78	97,99
1.20.1.20	KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	1.206.218.067,70	1.178.625.108,70	97,71	240.959.000,00	236.989.200,00	98,35	1.447.177.067,70	1.415.614.308,70	97,82
1.20.1.20	KECAMATAN PRINGKUKU	0,00	0,00	0,00	1.250.548.120,22	1.218.850.950,22	97,47	244.419.000,00	243.706.375,00	99,71	1.494.967.120,22	1.462.557.325,22	97,83
1.20.1.20	KECAMATAN PUNUNG	0,00	0,00	0,00	1.511.444.551,16	1.476.183.663,16	97,67	244.419.000,00	243.402.861,00	99,58	1.755.863.551,16	1.719.586.524,16	97,93
1.20.1.20	KECAMATAN DONOROJO	0,00	0,00	0,00	1.396.473.877,30	1.365.084.118,06	97,75	242.105.000,00	242.085.609,00	99,99	1.638.578.877,30	1.607.169.727,06	98,08
1.20.1.20	KELURAHAN PACITAN	0,00	0,00	0,00	545.452.361,36	531.883.540,36	97,51	149.750.000,00	149.489.022,00	99,83	695.202.361,36	681.372.562,36	98,01
1.20.1.20	KELURAHAN PUCANGSEWU	0,00	0,00	0,00	422.284.862,82	412.164.809,82	97,60	144.500.000,00	143.995.916,00	99,65	566.784.862,82	556.160.725,82	98,13
1.20.1.20	KELURAHAN SIDOHARJO	0,00	0,00	0,00	535.740.392,04	528.661.001,04	98,68	170.925.000,00	166.685.964,00	97,52	706.665.392,04	695.346.965,04	98,40
1.20.1.20	KELURAHAN BALEHARJO	0,00	0,00	0,00	513.605.841,04	504.622.129,04	98,25	145.200.000,00	144.601.263,00	99,59	658.805.841,04	649.223.392,04	98,55
1.20.1.20	KELURAHAN PLOSO	0,00	0,00	0,00	471.239.262,88	457.782.576,88	97,14	167.425.000,00	166.564.489,00	99,49	638.664.262,88	624.347.065,88	97,76
1.21.	KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	1.193.431.131,48	1.178.900.083,48	98,78	303.780.349,00	300.993.816,00	99,08	1.497.211.480,48	1.479.893.899,48	98,84
1.21.1.21	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	1.193.431.131,48	1.178.900.083,48	98,78	303.780.349,00	300.993.816,00	99,08	1.497.211.480,48	1.479.893.899,48	98,84
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0,00	0,00	0,00	2.011.944.672,46	1.963.025.935,46	97,57	4.052.000.000,00	3.998.738.339,00	98,69	6.063.944.672,46	5.961.764.274,46	98,31
1.22.1.22	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	2.011.944.672,46	1.963.025.935,46	97,57	4.052.000.000,00	3.998.738.339,00	98,69	6.063.944.672,46	5.961.764.274,46	98,31
1.23.	STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.260.000,00	136.768.700,00	98,92	138.260.000,00	136.768.700,00	98,92
1.23.1.20	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.260.000,00	136.768.700,00	98,92	138.260.000,00	136.768.700,00	98,92
1.24.	KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	1.114.781.674,36	1.095.776.461,36	98,30	295.000.000,00	283.946.843,00	96,25	1.409.781.674,36	1.379.723.304,36	97,87
1.24.1.26	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	1.114.781.674,36	1.095.776.461,36	98,30	295.000.000,00	283.946.843,00	96,25	1.409.781.674,36	1.379.723.304,36	97,87
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000.000,00	449.986.200,00	96,77	465.000.000,00	449.986.200,00	96,77
1.25.1.07	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000.000,00	449.986.200,00	96,77	465.000.000,00	449.986.200,00	96,77
1.26.	PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00	586.219.657,00	98,52	595.000.000,00	586.219.657,00	98,52
1.26.1.26	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00	586.219.657,00	98,52	595.000.000,00	586.219.657,00	98,52
2.	URUSAN PILIHAN	1.391.987.875,00	1.225.879.206,00	88,07	18.232.185.721,75	17.461.813.566,85	95,77	45.447.616.740,00	44.291.715.107,00	97,46	63.679.802.461,75	61.753.528.673,85	96,98
2.01.	PERTANIAN	39.690.000,00	44.235.000,00	111,45	7.263.035.941,97	6.864.206.469,97	94,51	21.987.667.348,00	21.642.339.654,00	98,43	29.250.703.289,97	28.506.546.123,97	97,46
2.01.1.21	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.219.651,00	1.465.569.600,00	98,94	1.481.219.651,00	1.465.569.600,00	98,94
2.01.2.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	39.690.000,00	44.235.000,00	111,45	7.263.035.941,97	6.864.206.469,97	94,51	12.809.949.851,00	12.575.650.311,00	98,17	20.072.985.792,97	19.439.856.780,97	96,85



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja										
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja				
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
	PETERNAKAN														
2.01.2.02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696.497.846,00	7.601.119.743,00	98,76	7.696.497.846,00	7.601.119.743,00	98,76		
2.02.	KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	6.209.919.022,58	6.011.106.653,58	96,80	3.566.287.607,00	3.498.439.677,00	98,10	9.776.206.629,58	9.509.546.330,58	97,27		
2.02.2.02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN			0,00	6.209.919.022,58	6.011.106.653,58	96,80	3.566.287.607,00	3.498.439.677,00	98,10	9.776.206.629,58	9.509.546.330,58	97,27		
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23.793.000,00	44.369.000,00	186,48	1.895.145.391,00	1.845.712.561,10	97,39	1.980.000.000,00	1.936.654.917,00	97,81	3.875.145.391,00	3.782.367.478,10	97,61		
2.03.2.03	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	23.793.000,00	44.369.000,00	186,48	1.895.145.391,00	1.845.712.561,10	97,39	1.980.000.000,00	1.936.654.917,00	97,81	3.875.145.391,00	3.782.367.478,10	97,61		
2.04.	PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.000.000,00	2.936.793.069,00	98,25	2.989.000.000,00	2.936.793.069,00	98,25		
2.04.1.17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.000.000,00	2.936.793.069,00	98,25	2.989.000.000,00	2.936.793.069,00	98,25		
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.328.504.875,00	1.137.275.206,00	85,61	2.864.085.366,20	2.740.787.882,20	95,70	9.804.474.635,00	9.701.322.090,00	98,95	12.668.560.001,20	12.442.109.972,20	98,21		
2.05.2.05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.328.504.875,00	1.137.275.206,00	85,61	2.864.085.366,20	2.740.787.882,20	95,70	9.804.474.635,00	9.701.322.090,00	98,95	12.668.560.001,20	12.442.109.972,20	98,21		
2.06.	PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.187.150,00	1.877.259.000,00	81,97	2.290.187.150,00	1.877.259.000,00	81,97		
2.06.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.187.150,00	1.877.259.000,00	81,97	2.290.187.150,00	1.877.259.000,00	81,97		
2.07.	INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.472.607.200,00	95,10	2.600.000.000,00	2.472.607.200,00	95,10		
2.07.1.15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.472.607.200,00	95,10	2.600.000.000,00	2.472.607.200,00	95,10		
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	226.299.500,00	98,39	230.000.000,00	226.299.500,00	98,39		
2.08.1.13	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	226.299.500,00	98,39	230.000.000,00	226.299.500,00	98,39		
	JUMLAH	1.233.777.932.577,67	1.260.505.396.063,59	102,17	867.500.566.124,95	804.818.701.449,69	92,77	436.893.548.858,00	397.832.875.316,00	91,06	1.304.394.114.982,95	1.202.651.576.765,69	92,20		

Keterangan : Data sebelum audit BPK



3. Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

1. Aturan tentang pengelolaan Dana JKN yang turun terlambat setelah pengelolaan dana JKN melalui Kas Umum Daerah berjalan selama 5 bulan (Januari s/d Mei), dimana Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah baru ditetapkan tanggal 21 April 2014, sehingga daerah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan pengelolaan belanja, karena pengeluaran belanjanya ada yang melalui Kas Umum daerah dan ada juga yang langsung dari rekening FKTP;
2. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang – undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat;
3. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kementerian Dalam Negeri dan jaringan *on line* antar SKPD mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan serta penatausahaan aset daerah karena belum seluruhnya aplikasi yang ada dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Alokasi Belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
5. Adanya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuannya setelah Perda APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
6. Terbatasnya jumlah personil di Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Solusi

1. Melakukan Konsultasi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan mekanisme pengelolaan JKN dan melakukan penyesuaian sisa dana JKN yang ditranfer melalui rekening Kas Umum Daerah setelah di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja di FKTP sampai dengan bulan April 2015;
2. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan perubahan Peraturan Perundang – undangan pengelolaan keuangan dan solusi dalam upaya mengantisipasi dan menindaklanjuti perubahan Peraturan tersebut;
3. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan optimalisasi modul aplikasi SIPKD dalam rangka peningkatan keakuratan dan kecepatan penyiakan data keuangan;
 - b. Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi SIPKD secara *on line* antar SKPD;
 - c. Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan *on line* antar SKPD baik di server maupun jaringannya;
 - d. Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui Aplikasi SIPKD sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
 - e. Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh



Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi SIPKD sehingga mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;

4. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan penganggaran belanja sesuai dengan keluaran (*out put*) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut dapat segera dilaksanakan;
6. Dalam rangka peningkatan jumlah personil SKPD yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditempuh langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Memberikan Pembinaan dan Bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di SKPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai Pengelolaan Aset Daerah



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan selama Tahun 2015. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2015. Merupakan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016, pada tahun 2014 melaksanakan 19 (sembilan belas) sasaran dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama yang dalam pencapaiannya didukung oleh APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2015 mencakup 154 program dan 892 kegiatan, dengan rincian Urusan Wajib 102 program dan 755 kegiatan sedangkan untuk Urusan Pilihan sebanyak 52 program dan 137 kegiatan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 19 (sembilan belas) sasaran yang akan dicapai, 18 diantaranya capaian indikatornya “SANGAT BAIK” dan sedangkan satu sasaran yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja utama opini audit BPK masih belum diketahui hasilnya karena masih dalam proses audit / pemeriksaan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu



yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu:

1. Alokasi belanja yang tepat sasaran.
2. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial.
3. Efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.551.444.192.752,00 dan Realisasi sebesar Rp. 1.408.458.278.765,44 atau 90,78% dari anggaran.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai

dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA				
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)
		2	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target
		3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Penduduk yang menggunakan jamban (%)
				Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)
		2	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Skor Evaluasi Adipura
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat					
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	
1	Mempermudah akses pendidikan	1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	
			- SD/MI	- SMP/MTs	
		Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah		
2	Meningkatkan kualitas pendidikan	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	
				Angka kelulusan	
				- SD/MI	
				- SMP/MTs	
- SMA/SMK/MA					
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan					
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	
1	Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	
			1	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan (%)
			3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase Koperasi Aktif
					Jumlah UMKM
4	Pemasaran komoditas daerah	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)			

MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
				- Jalan - Jembatan Jumlah terminal bus/sub terminal Jumlah rumah tangga pengguna listrik
		2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan				
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Angka Kriminalitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Prosentase kader bina ketahanan keluarga

**RENCANA KERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik							
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1.1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	6,75	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.773.058.000
					2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.789.334.999
					3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.980.000.000
2	Tercapainya SPM daerah	2.1	Prosentase SPM yang mencapai target	80,00	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SPM	25.000.000,00
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SOP	75.000.000
					2	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	45.000.000
					3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	750.000.000
					4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	922.000.000
					5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.479.162.852
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	4.1	Opini audit BPK	WTP	1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.392.834.158
					2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	103.199.000
					3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.545.819.354
					4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.612.252.000
					5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	825.000.000
					6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.367.379.000
					7	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.565.507.900
					8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35.000.000
					9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	425.000.000
					10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur	439.051.000
					11	Program perencanaan pembangunan daerah	1.600.000.000
					12	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.348.540.000

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
					13	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya	1.480.000.000
					15	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.165.000.000
					16	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	724.137.500
					17	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	815.000.000
					18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.056.100.008
					19	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	572.250.000
					20	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	65.000.000
						Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	60.000.000
					21	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	70.000.000

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	1.1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	89,20	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.140.191.500
		1.2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	64,00			
2	Terciptanya lingkungan sehat	2.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	40,92	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	355.000.000
		2.2	Skor Evaluasi Adipura	78,46	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.466.500.000
					3	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	850.000.000
					4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	50.000.000
					5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.213.312.550
					6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	175.000.000
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan	3.1	Angka Usia Harapan Hidup	72,00	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000
					2	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000
					3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	37.475.650.000
					4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.929.747.200
					5	Program Keluarga Berencana	1.522.042.848
					6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000
					7	Program pelayanan kontrasepsi	235.000.000
					8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.896.400.000
					9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	600.000.000
					10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	500.000.000
					11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28.728.897.135
					12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	300.000.000
					13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	286.500.000

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	4.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	0,43	1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	230.000.000
					2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16.571.446.250
					3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	16.124.420.150

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN	
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat								
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.988.904.893	
			SD/MI	100,00	2	Program Pendidikan Menengah	12.008.159.438	
			SMP/MTs	100,00	3	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	180.660.000	
2	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	2.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,08	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.430.000.000	
					2	Program Pendidikan Non Formal	484.493.900	
					3	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000	
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	3.1	Angka Melek Huruf	91,65	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.450.000.100	
		3.2	Angka kelulusan		2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.745.000.000	
					SD/MI	100,00		
					SMP/MTs	99,92		
					SMA/SMK/MA	99,90		

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan							
1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	1.1.	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	2	1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	20.000.000
					2	Program Pengembangan data/informasi	150.000.000
					3	Program Pengembangan Data/Informasi	200.000.000
					4	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	50.000.000
					5	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	605.000.000
					6	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2.020.345.560
					7	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	450.000.000
					8	Program Kelitbangan	1.048.380.000
					9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	200.000.000
					10	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	622.600.000
					11	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.097.623.440
					12	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	470.000.000
					13	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	215.000.000
2	Ketersediaan pangan daerah	2.1	Penguatan cadangan pangan (%)	100,00	1	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	3.040.800.000
					2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	135.000.000
					3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	19.507.798.306
					4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	135.000.000
					5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	700.000.000
					6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	200.000.000
					7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.215.000.000
					8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	95.000.000
					9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1.819.700.000

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
					10	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	584.773.000
					11	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	473.005.000
					12	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	385.141.000
					13	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	560.843.524
					14	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	675.363.000
					15	Program pengembangan budidaya perikanan	1.230.133.000
					16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.774.979.100
3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	3.1	Prosentase Koperasi Aktif	90,72	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	281.843.000
		3.1	Jumlah UMKM	21977	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	180.000.000
					3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	340.000.000
					4	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20.000.000
					5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	150.000.000
					6	Program Pengembangan Kemitraan	504.000.000
					7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20.000.000
					8	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.815.000.000
4	Pemasaran komoditas daerah	4.1	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	605	1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	305.000.000
					2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	14.482.000.000
					3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.790.819.020
					4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	375.000.000
					5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.125.000.000
					6	Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	875.000.000

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN	
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar								
1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	1.1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.852.380.000	
			- Jalan	53,60	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	52.933.427.000	
			- Jembatan	92,10	3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	134.554.100	
		1.2	Jumlah terminal bus/sub terminal	6	4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	185.000.000	
		1.3	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	117.054		5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10.772.176.000
					6	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	50.370.116.348	
					7	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.985.443.952	
					8	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.425.000.000	
					9	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	723.150.000	
					10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	177.500.000	
					11	Program peningkatan pelayanan angkutan	580.776.600	
					12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110.500.000	
					13	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	525.564.400	
					14	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.205.650.000	
					15	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000	
					16	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	190.000.000	
					17	Program Pemanfaatan Ruang	610.000.000	
					18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	
					19	Program pengendalian banjir	850.000.000	
					20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	979.769.566	
					21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	4.385.013.250	
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar				2.1	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,77	1

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA							
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama							
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	1.1	Angka Kriminalitas	1,6	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	760.000.000
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,08	2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	40.000.000
					3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.047.630.000
					4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	600.000.000
					5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	189.450.000
					6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	330.000.000
					7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	505.200.000
					8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	675.000.000
					9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	245.000.000
					10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	362.000.000
					11	Program Pengembangan Nilai Budaya	283.000.000
					12	Program pendidikan politik masyarakat	915.000.000
					13	Program pengembangan wawasan kebangsaan	308.675.000
					14	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.947.800.000
					15	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	425.000.000
2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	2.1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60,00	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	508.000.000
					2.2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	83,00
		3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	20.000.000			
		4	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	911.000.000			
		5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	150.000.000			
		6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	75.000.000			
		7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.851.975.000			

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2015	NO	PROGRAM	ANGGARAN
					8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.646.606.420
					9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	230.000.000
					10	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	392.800.000
					11	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	55.000.000
					12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	160.000.000
					13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000
					14	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	150.000.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis 2. Tercapainya SPM daerah	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	6,75
		Prosentase SPM yang mencapai target	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100
2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	3. Terselenggaranya Pelayanan Prima 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	WTP

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1. Terwujudnya perilaku hidup sehat 2. Terciptanya lingkungan sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	89,2
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	40,92
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Skor Evaluasi Adipura	78,46
		Angka Usia Harapan Hidup	72
		Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	0,43

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Mempermudah akses pendidikan	1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki		100
				- SD/MI	100	
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan	2.	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah		7,08
		1.	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf		91,65
				Angka Kelulusan:		
				- SD/MI		100
				- SMP/MTs		99,92
				- SMA/SMK/MA		99,9

Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1.	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif		2
		2.	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan		100
		3.	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif		90,74
		4.	Pemasaran komoditas daerah	Jumlah UMKM		21.977
				Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)		605

Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas infrastruktur dasar		1. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian		% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:		
				- jalan	53,6	
				- jembatan	92,1	
				Jumlah Terminal Bis/Sub Terminal	6	
				Jumlah rumah tangga pengguna listrik	71,07	
		2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		18,77

Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudhi luhur dan damai		1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai		Angka kriminalitas		1,6
		2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat		Indek Pembangunan Manusia (IPM)		73,36
				Prosentase Penyanggandng Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		72
				Prosentase kader bina ketahanan keluarga		87

Pacitan, - - 2014





BUPATI PACITAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

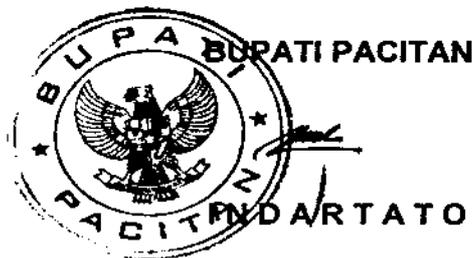
Nama : INDARTATO

Jabatan : BUPATI PACITAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, ~~30~~ 30 Januari 2015



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	6,75
2.	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target	80,00
3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100
4.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	WTP

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	89,2
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
2.	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	40,92
		Skor Evaluasi Adipura	78,46
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,43

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	7,08
3.	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	91,65
		Angka Kelulusan:	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	99,92
		- SMA/SMK/MA	99,90

Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	2
2.	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	100
3.	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif	90,74
		Jumlah UMKM	21.977
4.	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	605

Misi 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	
		- jalan	53,60
		- jembatan	92,10
		Jumlah Terminal Bis/Sub Terminal	6
		Jumlah rumah tangga pengguna listrik	71,07
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,77

Misi 6: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Angka kriminalitas	1,6
		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,36
2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	72
		Prosentase kader bina ketahanan keluarga	87,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.001.578.499,00
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12.755.408.752,00
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.280.000.000,00
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.427.974.897,00
5	Program Pendidikan Menengah	10.417.033.203,00
6	Program Pendidikan Nonformal	459.493.900,00
7	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000,00
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.575.000.000,00
9	Program Pengembangan Budaya Baca, Dan Pembinaan Perpustakaan	180.660.000,00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.300.000.100,00
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00
12	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1.592.967.000,00
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.530.569.000,00
14	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	210.000.000,00
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	300.000.000,00
16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	140.000.000,00
17	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	290.000.000,00
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	490.000.000,00
19	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	5.655.728.000,00
20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	25.000.000,00
21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	25.000.000,00
22	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	150.000.000,00
23	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	1.806.250.000,00
24	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	10.619.752.000,00
25	Program Kemitaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	286.500.000,00
26	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	35.753.000.000,00
27	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	10.693.380.000,00
28	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	13.198.427.000,00
29	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	134.554.100,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
30	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	135.000.000,00
31	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Laringan Irigasi, Rawa, Dan Laringan Pengairan Lainnya	4.442.951.000,00
32	Program Pengendalian Banjir	850.000.000,00
33	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.985.443.952,00
34	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Laringan Irigasi, Rawa Dan Laringan Pengairan Lainnya	400.000.000,00
35	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	4.565.000.000,00
36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	8.404.015.048,00
37	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.972.500.000,00
38	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.125.000.000,00
39	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	425.000.000,00
40	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000,00
41	Program Pemanfaatan Ruang	610.000.000,00
42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00
43	Program Pengembangan Data/Informasi	200.000.000,00
44	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	190.000.000,00
45	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.540.000.000,00
46	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.213.540.000,00
47	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	1.440.000.000,00
48	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	1.145.000.000,00
49	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	1.325.000.000,00
50	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LW	175.000.000,00
51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	549.776.600,00
52	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	110.000.000,00
53	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	525.564.400,00
54	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	963.312.550,00
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	879.769.566,00
56	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00
57	Program Penataan Administrasi Kependudukan	892.000.000,00
58	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	20.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
59	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	70.000.000,00
60	Program Keluarga Berencana	1.492.042.848,00
61	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000,00
62	Program Pelayanan Kontrasepsi	235.000.000,00
63	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.309.850.000,00
64	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender Dan Anak	358.000.000,00
65	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	110.000.000,00
66	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000,00
67	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	300.000.000,00
68	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	55.000.000,00
69	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	130.000.000,00
70	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.133.970.195,00
71	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.075.760.000,00
72	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25.000.000,00
73	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100.000.000,00
74	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	20.000.000,00
75	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	90.000.000,00
76	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	180.000.000,00
77	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	181.843.000,00
78	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	125.000.000,00
79	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.293.243.570,00
80	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	20.000.000,00
81	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	20.000.000,00
82	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.415.000.000,00
83	Program Pengembangan Nilai Budaya	315.000.000,00
84	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	125.000.000,00
85	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	420.000.000,00
86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	500.000.000,00
87	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	280.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
88	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	220.000.000,00
89	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	950.000.000,00
90	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	325.000.000,00
91	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00
92	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.892.800.000,00
93	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	288.675.000,00
94	Program Pendidikan Politik Masyarakat	875.000.000,00
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.532.308.000,00
96	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	475.000.000,00
97	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	647.630.000,00
98	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	40.000.000,00
99	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	760.000.000,00
100	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.593.286.400,00
101	Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	73.250.000,00
102	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.990.472.000,00
103	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.098.142.000,00
104	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	375.000.000,00
105	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	470.000.000,00
106	Program Penetapan Dan Pengendalian Penerapan SPM	25.000.000,00
107	Program Penetapan Dan Pengendalian Penerapan SOP	75.000.000,00
108	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.799.725.000,00
109	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.991.274.500,00
110	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Dan Jasa	12.917.000.000,00
111	Program Kelitbangan	860.000.000,00
112	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	150.000.000,00
113	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	572.250.000,00
114	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	35.000.000,00
115	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	50.000.000,00
116	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1.995.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
117	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	200.000.000,00
118	Program Peningkatan, Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	705.000.000,00
119	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Dan SDM Aparatur	286.881.000,00
120	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.799.700.000,00
121	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	835.000.000,00
122	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	275.000.000,00
123	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	200.000.000,00
124	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	932.137.500,00
125	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	911.000.000,00
126	Program Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran	70.000.000,00
127	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	60.000.000,00
128	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	65.000.000,00
129	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	233.000.000,00
130	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.926.023.440,00
131	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	85.000.000,00
132	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	5.206.765.610,00
133	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80.000.000,00
134	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	250.000.000,00
135	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	150.000.000,00
136	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.165.000.000,00
137	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	135.000.000,00
138	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	20.000.000,00
139	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	50.000.000,00
140	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan	300.000.000,00
141	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan	2.330.000.000,00
142	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	190.000.000,00
143	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	455.000.000,00
144	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	2.020.345.560,00
145	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	350.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
146	Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	50.000.000,00
147	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	345.000.000,00
148	Program Pengawasan Dan Penerbitan Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	205.000.000,00
149	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.385.013.250,00
150	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.047.080.008,00
151	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	461.843.524,00
152	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Lautan	600.363.000,00
153	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.185.133.000,00
154	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.449.979.100,00
155	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	385.141.000,00
156	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	473.005.000,00
157	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	524.773.000,00



Pacitan, 30 Januari 2015

KABUPATEN PACITAN

PACINDARTATO



BUPATI PACITAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDARTATO

Jabatan : BUPATI PACITAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pacitan, 20 - 9 - 2015



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	6,75
2.	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target	80,00
3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100
4.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	WTP

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	89,2
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
2.	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	40,92
		Skor Evaluasi Adipura	78,46
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,00
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,43

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	7,08
3.	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	91,65
		Angka Kelulusan:	
		- SD/MI	100
		- SMP/MTs	99,92
		- SMA/SMK/MA	99,90

Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	2
2.	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	100
3.	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif	90,74
		Jumlah UMKM	21.977
4.	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	605

Misi 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	
		- jalan	53,60
		- jembatan	92,10
		Jumlah Terminal Bis/Sub Terminal	6
		Jumlah rumah tangga pengguna listrik	71,07
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	18,77

Misi 6: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Angka kriminalitas	1,6
		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,36
2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	72
		Prosentase kader bina ketahanan keluarga	87,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
1	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	134.554.100,00	134.554.100,00
2	Program Kelitbangan	860.000.000,00	1.048.380.000,00
3	Program Keluarga Berencana	1.492.042.848,00	1.522.042.848,00
4	Program Kemitaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	286.500.000,00	286.500.000,00
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000,00	55.000.000,00
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.972.500.000,00	2.466.500.000,00
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.300.000.100,00	1.450.000.100,00
8	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	50.000.000,00	45.000.000,00
9	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1.592.967.000,00	1.929.747.200,00
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.098.142.000,00	2.612.252.000,00
11	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	473.005.000,00	473.005.000,00
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.001.578.499,00	49.829.334.999,00
13	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000,00	45.000.000,00
14	Program Pelayanan Kontrasepsi	235.000.000,00	235.000.000,00
15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	455.000.000,00	605.000.000,00
16	Program Pemanfaatan Ruang	610.000.000,00	610.000.000,00
17	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	8.404.015.048,00	43.840.116.348,00
18	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	10.693.380.000,00	15.852.380.000,00
19	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	1.325.000.000,00	723.150.000,00
20	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.985.443.952,00	5.485.443.952,00
21	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	110.000.000,00	110.500.000,00
22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	110.000.000,00	160.000.000,00
23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	130.000.000,00	230.000.000,00
24	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.125.000.000,00	850.000.000,00
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Lautan	600.363.000,00	675.363.000,00
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	647.630.000,00	1.047.630.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
27	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	440.000.000,00	700.000.000,00
28	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	280.000.000,00	330.000.000,00
29	Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	50.000.000,00	50.000.000,00
30	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	345.000.000,00	470.000.000,00
31	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1.995.000.000,00	1.980.000.000,00
32	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.385.013.250,00	4.385.013.250,00
33	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	55.000.000,00	55.000.000,00
34	Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	73.250.000,00	103.199.000,00
35	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	300.000.000,00	392.800.000,00
36	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	20.000.000,00	20.000.000,00
37	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.309.850.000,00	1.896.400.000,00
38	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	475.000.000,00	600.000.000,00
39	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	65.000.000,00	65.000.000,00
40	Program Penataan Administrasi Kependudukan	892.000.000,00	922.000.000,00
41	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00
42	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	1.806.250.000,00	2.205.650.000,00
43	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	470.000.000,00	825.000.000,00
44	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	290.000.000,00	500.000.000,00
45	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Temak	150.000.000,00	200.000.000,00
46	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	760.000.000,00	760.000.000,00
47	Program Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	20.000.000,00	20.000.000,00
48	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.280.000.000,00	1.430.000.000,00
49	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000,00	100.000.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
50	Program Pendidikan Menengah	10.417.033.203,00	12.008.159.438,00
51	Program Pendidikan Nonformal	459.493.900,00	484.493.900,00
52	Program Pendidikan Politik Masyarakat	875.000.000,00	915.000.000,00
53	Program Penetapan Dan Pengendalian Penerapan SOP	75.000.000,00	75.000.000,00
54	Program Penetapan Dan Pengendalian Penerapan SPM	25.000.000,00	25.000.000,00
55	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	5.655.728.000,00	16.571.446.250,00
56	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	10.619.752.000,00	16.124.420.150,00
57	Program Pengawasan Dan Penerbitan Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	205.000.000,00	215.000.000,00
58	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	125.000.000,00	50.000.000,00
59	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	420.000.000,00	362.000.000,00
60	Program Pengembangan Budaya Baca, Dan Pembinaan Perpustakaan	180.660.000,00	180.660.000,00
61	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.185.133.000,00	1.230.133.000,00
62	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Laringan Irigasi, Rawa Dan Laringan Pengairan Lainnya	4.842.951.000,00	8.772.176.000,00
63	Program Pengembangan Data/Informasi	350.000.000,00	350.000.000,00
64	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	325.000.000,00	375.000.000,00
65	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	20.000.000,00	20.000.000,00
66	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	524.773.000,00	584.773.000,00
67	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00	504.000.000,00
68	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	90.000.000,00	340.000.000,00
69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	963.312.550,00	1.213.312.550,00
70	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	275.000.000,00	305.000.000,00
71	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	140.000.000,00	355.000.000,00
72	Program Pengembangan Nilai Budaya	315.000.000,00	283.000.000,00
73	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	950.000.000,00	1.125.000.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
74	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.449.979.100,00	2.774.979.100,00
75	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Dan Jasa	12.917.000.000,00	14.482.000.000,00
76	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.415.000.000,00	1.815.000.000,00
77	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	180.000.000,00	180.000.000,00
78	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	385.141.000,00	385.141.000,00
79	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	288.675.000,00	308.675.000,00
80	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	4.565.000.000,00	6.425.000.000,00
81	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100.000.000,00	150.000.000,00
82	Program Pengendalian Banjir	850.000.000,00	850.000.000,00
83	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	525.564.400,00	525.564.400,00
84	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00
85	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	879.769.566,00	979.769.566,00
86	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender Dan Anak	358.000.000,00	508.000.000,00
87	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	461.843.524,00	560.843.524,00
88	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.293.243.570,00	2.790.819.020,00
89	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	932.137.500,00	724.137.500,00
90	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Dan SDM Aparatur	286.881.000,00	439.051.000,00
91	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.799.725.000,00	15.367.379.000,00
92	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.532.308.000,00	2.673.058.000,00
93	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.892.800.000,00	1.947.800.000,00
94	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	835.000.000,00	922.450.000,00
95	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	375.000.000,00	425.000.000,00
96	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.926.023.440,00	2.097.623.440,00
97	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	150.000.000,00	300.000.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
98	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.075.760.000,00	1.851.975.000,00
99	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	425.000.000,00	425.000.000,00
100	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.799.700.000,00	1.819.700.000,00
101	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.133.970.195,00	1.646.606.420,00
102	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	20.000.000,00	20.000.000,00
103	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	181.843.000,00	281.843.000,00
104	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	35.753.000.000,00	37.475.650.000,00
105	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.575.000.000,00	1.745.000.000,00
106	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	200.000.000,00	230.000.000,00
107	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	549.776.600,00	580.776.600,00
108	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.593.286.400,00	3.336.734.150,00
109	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	25.000.000,00	25.000.000,00
110	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	25.000.000,00	25.000.000,00
111	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.047.080.008,00	1.056.100.008,00
112	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	911.000.000,00	911.000.000,00
113	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	70.000.000,00	105.000.000,00
114	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	500.000.000,00	505.200.000,00
115	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.165.000.000,00	1.215.000.000,00
116	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80.000.000,00	3.040.800.000,00
117	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	135.000.000,00	135.000.000,00
118	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	135.000.000,00	135.000.000,00
119	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	40.000.000,00	40.000.000,00
120	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	20.000.000,00	95.000.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
121	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	5.206.765.610,00	19.507.798.306,00
122	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	572.250.000,00	572.250.000,00
123	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	200.000.000,00	200.000.000,00
124	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	13.055.408.752,00	16.479.162.852,00
125	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	135.000.000,00	185.000.000,00
126	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	220.000.000,00	245.000.000,00
127	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.990.472.000,00	5.545.819.354,00
128	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00
129	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	300.000.000,00	600.000.000,00
130	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.540.000.000,00	1.600.000.000,00
131	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.213.540.000,00	1.348.540.000,00
132	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	190.000.000,00	190.000.000,00
133	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	1.145.000.000,00	1.165.000.000,00
134	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	1.440.000.000,00	1.480.000.000,00
135	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00
136	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00	175.000.000,00
137	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25.000.000,00	75.000.000,00
138	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	125.000.000,00	150.000.000,00
139	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	210.000.000,00	1.140.191.500,00
140	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LW	175.000.000,00	177.500.000,00
141	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	2.020.345.560,00	2.020.345.560,00
142	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	13.198.427.000,00	51.963.427.000,00
143	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	490.000.000,00	750.000.000,00
144	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.530.569.000,00	28.728.897.135,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
145	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.427.974.897,00	20.988.904.893,00
146	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	233.000.000,00	278.000.000,00
147	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.991.274.500,00	11.525.507.900,00
148	Program Perbaikan Sistem Administrasi Perkantoran	70.000.000,00	70.000.000,00
149	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	125.000,00	675.000.000,00
150	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	565.000.000,00	815.000.000,00
151	Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	646.700.000,00	622.600.000,00
152	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	189.450.000,00
153	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-	150.000.000,00

Pacitan, 28- 9 - 2015



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015	% CAPAIAN						
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik																
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1.1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	6,75	5,24	6,69	6,52	6,50	6,65	98,52	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.773.058.000	2.512.674.250	90,61	260.383.750
											2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.789.334.999	48.167.703.684	96,74	1.621.631.315
											3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.980.000.000	1.810.628.245	91,45	169.371.755
2	Tercapainya SPM daerah	2.1	Prosentase SPM yang mencapai target	80,00	43,30	71,70	70,51	70,51	70,51	94,01	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SPM	25.000.000,00	24.647.000,00	98,59	353.000,00
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	81,00	80,00	79,00	97,90	100,00	100,00	1	Program Penetapan dan pengendalian Penerapan SOP	75.000.000	73.556.850	98,08	1.443.150
											2	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	45.000.000	26.088.400	57,97	18.911.600
											3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	750.000.000	712.905.300	95,05	37.094.700
											4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	922.000.000	801.840.250	86,97	120.159.750
											5	Program Peningkatan Sarana dan	16.479.162.852	15.814.060.109	95,96	665.102.744
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	4.1	Opini audit BPK	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	n.a	n.a	1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	4.392.834.158	3.818.939.191	96,12	573.894.968
											2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	103.199.000	97.751.300	94,72	5.447.700
											3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.545.819.354	5.003.235.745	90,22	542.583.609
											4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.612.252.000	2.533.196.022	96,97	79.055.978
											5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	825.000.000	819.537.600	99,34	5.462.400
											6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.367.379.000	10.853.100.935	70,62	4.514.278.065
											7	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.565.507.900	11.340.757.283	98,06	224.750.617
											8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35.000.000	34.808.200	99,45	191.800
											9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	425.000.000	423.186.450	99,57	1.813.550
											10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur	439.051.000	314.407.425	71,61	124.643.575

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015	% CAPAIAN						
											11	Program perencanaan pembangunan daerah	1.600.000.000	1.590.223.700	99,39	9.776.300
											12	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.348.540.000	1.340.003.600	99,37	8.536.400
											13	Program Perencanaan Pembagunan	1.480.000.000	1.444.367.900	97,59	35.632.100
											14	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.165.000.000	1.156.158.850	99,24	8.841.150
											15	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	724.137.500	722.570.554	99,78	1.566.946
											16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	815.000.000	737.836.750	90,53	77.163.250
											17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.056.100.008	1.015.118.464	96,12	40.981.545
											18	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturn pengawasan	572.250.000	539.159.700	94,22	33.090.300
											19	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	65.000.000	64.854.500	99,78	145.500
											20	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	60.000.000	59.999.800	100	200
											21	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	70.000.000	69.830.450	99,76	169.550

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN							NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI		
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015							% CAPAIAN	
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																	
MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																	
1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	1.1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	89,20	79,47	83,02	100,00	100,00	100,00	112,11	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.140.191.500	1.104.794.750	96,9	35.396.750	
		1.2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	64,00	58,10	52,83	55,16	60,26	61,03	95,36							
2	Terciptanya lingkungan sehat	2.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	40,92	38,68	39,73	40,00	40,61	41,22	100,73	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	355.000.000	348.351.500	98,13	6.648.500	
		2.2	Skor Evaluasi Adipura		78,46	74,46	76,68	76,68	74,22	74,70	95,21	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.466.500.000	2.406.580.550	97,57	59.919.450
												3	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	850.000.000	800.176.400	94,14	49.823.600
												4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	50.000.000	49.517.000	99,03	483.000
												5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.213.312.550	1.148.665.400	94,67	64.647.150
												6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	175.000.000	162.605.100	92,92	12.394.900
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan	3.1	Angka Usia Harapan Hidup	72,00	71,48	71,69	71,71	71,80	70,75	98,26	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000	24.730.000	98,92	270.000	
											2	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000	24.497.650	97,99	502.350	
											3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	37.475.650.000	41.196.491.983	109,93	-3.720.841.983	
											4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.929.747.200	1.919.004.798	99,44	10.742.402	
											5	Program Keluarga Berencana	1.522.042.848	1.492.968.025	98,09	29.074.823	
											6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000	54.162.000	98,48	838.000	
											7	Program pelayanan kontrasepsi	235.000.000	235.000.000	100	-	
											8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.896.400.000	1.784.764.500	94,11	111.635.500	
											9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	600.000.000	597.070.100	99,51	2.929.900	
											10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	500.000.000	493.175.250	98,64	6.824.750	
											11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28.728.897.135	24.917.058.860	86,73	3.811.838.275	
											12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	300.000.000	278.667.175	92,89	21.332.825	
											13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	286.500.000	266.177.000	92,91	20.323.000	

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015	% CAPAIAN						
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	4.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,43	0,38	0,41	0,41	0,53	0,41	95,35	1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	230.000.000	229.501.760	99,78	498.240
											2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16.571.446.250	16.393.595.898	98,93	177.850.352
											3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	16.124.420.150	15.630.686.418	96,94	493.733.732

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN							NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																
MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat																
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil								1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.988.904.893	20.624.854.774	98,27	364.050.119
			SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2	Program Pendidikan Menengah	12.008.159.438	11.930.335.848	99,35	77.823.590
			SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	180.660.000	174.582.000	96,64	6.078.000
2	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	2.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,08	6,94	6,99	6,95	7,06	7,27	102,68	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.430.000.000	1.422.285.550	99,46	7.714.450
				2	Program Pendidikan Non Formal	484.493.900	470.545.500	97,12	13.948.400							
				3	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000	90.351.000	90,35	9.649.000							
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	3.1	Angka Melek Huruf	91,65	91,60	91,62	92,44	92,69	92,83	101,29	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.450.000.100	1.438.725.000	99,22	11.275.100
				2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.745.000.000	1.713.600.225	98,2	31.399.775							
		3.2	Angka kelulusan	SD/MI	100,00	100,00	100,00	99,40	100,00	100,00						
				SMP/MTs	99,92	100,09	99,46	99,83	99,34	100,00	100,08					
				SMA/SMK/MA	99,90	99,78	99,87	99,87	99,99	99,99	100,09					

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015	% CAPAIAN						
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																
MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan																
1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	1.1	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	2	1	1	1	2	4	200,00	1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	20.000.000	19.605.000	98,03	395.000
											2	Program Pengembangan data/informasi	150.000.000	148.852.550	99,24	1.147.450
											3	Program Pengembangan Data/Informasi	200.000.000	199.535.300	99,77	464.700
											4	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	50.000.000	48.465.250	96,93	1.534.750
											5	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	605.000.000	252.415.000	41,72	352.585.000
											6	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2.020.345.560	957.834.971	47,41	1.062.510.589
											7	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	450.000.000	260.849.000	57,97	189.151.000
											8	Program Kelitbangan	1.048.380.000	917.369.100	87,5	131.010.900
											9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	200.000.000	199.146.000	99,57	854.000
											10	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	622.600.000	614.559.350	98,71	8.040.650
											11	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.097.623.440	2.072.433.050	98,8	25.190.390
											12	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	470.000.000	465.148.000	98,97	4.852.000
											13	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	215.000.000	212.298.900	98,74	2.701.100
2	Ketersediaan pangan daerah	2.1	Penguatan cadangan pangan (%)	100,00	15,00	25,00	45,13	64,30	144,44	144,44	1	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	3.040.800.000	3.000.171.775	98,66	40.628.225
											2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	135.000.000	129.631.450	96,02	5.368.550
											3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	19.507.798.306	19.168.599.457	98,26	339.198.849
											4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	135.000.000	131.675.650	97,54	3.324.350
											5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	700.000.000	673.884.450	96,27	26.115.550
											6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	200.000.000	198.912.650	99,46	1.087.350
											7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.215.000.000	1.208.240.179	99,44	6.759.821
											8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	95.000.000	93.758.450	98,69	1.241.550
											9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1.819.700.000	1.758.587.470	96,64	61.112.530
											10	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	584.773.000	415.824.500	71,11	168.948.500
											11	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	473.005.000	468.008.500	98,94	4.996.500

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN							NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015							% CAPAIAN
										12	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	385.141.000	379.303.000	98,48	5.838.000	
										13	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	560.843.524	531.463.584	94,76	29.379.940	
										14	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	675.363.000	653.968.791	96,83	21.394.209	
										15	Program pengembangan budidaya perikanan	1.230.133.000	1.152.912.500	93,72	77.220.500	
										16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.774.979.100	2.610.383.805	94,07	164.595.295	
3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	3.1	Prosentase Koperasi Aktif	90,72	85,51	87,13	87,30	87,42	90,1	99,32	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	281.843.000	281.593.000	99,91	250.000
		3.1	Jumlah UMKM	21977	20.843	21.114	21.326	21671	22013	100,16	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	180.000.000	179.522.900	99,73	477.100
											3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	340.000.000	284.534.450	83,69	55.465.550
											4	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20.000.000	18.630.000	93,15	1.370.000
											5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	150.000.000	142.211.750	94,81	7.788.250
											6	Program Pengembangan Kemitraan	504.000.000	492.783.100	97,77	11.216.900
											7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20.000.000	19.500.000	97,5	500.000
											8	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.815.000.000	1.539.561.500	84,82	275.438.500
4	Pemasaran komoditas daerah	4.1	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	605	564	582,9	637.576	688	711	117,52	1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	305.000.000	260.295.726	85,34	44.704.274
											2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	14.482.000.000	14.004.112.900	96,7	477.887.100
											3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.790.819.020	2.545.393.200	91,21	245.425.820
											4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	375.000.000	369.424.580	98,51	5.575.420
											5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.125.000.000	1.111.264.400	98,78	13.735.600
											6	Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	875.000.000	871.845.900	99,64	3.154.100

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN							NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																
MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar																
1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	1.1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik								1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.852.380.000	15.260.602.422	96,27	591.777.578
			- Jalan	53,60	50,23	51,11	52,12	54,61	56,12	104,70	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	52.933.427.000	52.567.072.694	99,31	366.354.306
			- Jembatan	92,10	90,91	91,57	92,15	92,45	92,81	100,77	3	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	134.554.100	127.971.550	95,11	6.582.550
		1.2	Jumlah terminal bus/sub terminal	6	6	6	6	6	6	100,00	4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	185.000.000	184.434.800	99,69	565.200
			1.3	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	117.054	84.067	94.050	101.458	107063	133678	114,20	5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10.772.176.000	10.656.795.000	98,93
		6										Program pembangunan infrastruktur perdesasaan	50.370.116.348	49.060.312.533	97,4	1.309.803.815
		7										Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.985.443.952	5.777.448.700	96,52	207.995.252
		8										Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.425.000.000	6.199.238.400	96,49	225.761.600
		9										Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	723.150.000	717.982.500	99,29	5.167.500
		10										Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas	177.500.000	176.938.180	99,68	561.820
		11										Program peningkatan pelayanan angkutan	580.776.600	575.938.000	99,17	4.838.600
		12										Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110.500.000	110.487.000	99,99	13.000
		13										Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	525.564.400	524.696.100	99,83	868.300
		14	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.205.650.000	1.950.941.879	88,45	254.708.121									
		15	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000	655.619.050	81,95	144.380.950									
		16	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	190.000.000	188.600.150	99,26	1.399.850									
		17	Program Pemanfaatan Ruang	610.000.000	544.573.750	89,27	65.426.250									
		18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	91.043.000	91,04	8.957.000									
		19	Program pengendalian banjir	850.000.000	686.414.000	80,75	163.586.000									
		20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	979.769.566	898.090.107	91,66	81.679.459									
		21	Program pembinaan dan pengembangan bidang	4.385.013.250	2.822.635.502	64,37	1.562.377.748									
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	2.1	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat infrastruktur dasar	18,77	18,93	26,52	24,2	28,47	28,66	152,69	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	922.450.000	601.293.775	65,18	321.156.225

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN							NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI	
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015							% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA																
MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama																
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	1.1	Angka Kriminalitas	1,6	18,93	26,52	24,2	28,47	1,9	84,21	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	760.000.000	740.543.650	97,44	19.456.350
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,08	72,48	72,91	73,25	73,27	74,08	100,98	2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	40.000.000	40.000.000	100	-
											3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.047.630.000	1.034.064.200	98,71	13.565.800
											4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	600.000.000	563.940.000	93,99	36.060.000
											5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	189.450.000	188.502.000	99,5	948.000
											6	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	330.000.000	330.000.000	100	-
											7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	505.200.000	503.308.000	99,63	1.892.000
											8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	675.000.000	167.966.500	24,88	507.033.500
											9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	245.000.000	244.999.850	100	150
											10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	362.000.000	356.629.700	98,52	5.370.300
											11	Program Pengembangan Nilai Budaya	283.000.000	280.733.500	99,2	2.266.500
											12	Program pendidikan politik masyarakat	915.000.000	912.875.235	99,77	2.124.765
											13	Program pengembangan wawasan kebangsaan	308.675.000	303.092.575	98,19	5.582.425
											14	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.947.800.000	1.940.665.010	99,63	7.134.990
											15	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	425.000.000	412.554.000	97,07	12.446.000
2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	2.1	Prosentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60,00	3,60	3,60	40,76	60,00	72,00	120,00	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	508.000.000	407.370.000	80,19	100.630.000
		2.2	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	83,00	62,61	62,61	76,22	77,40	87,00	104,82	2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	105.000.000	105.000.000	100	-
											3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	20.000.000	20.000.000	100	-
											4	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	911.000.000	899.534.770	98,74	11.465.230

NO	SASARAN	NO	KINERJA SASARAN								NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFESIENSI
			INDIKATOR	TARGET 2015	2011	2012	2013	2014	2015	% CAPAIAN						
											5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	150.000.000	146.100.000	97,4	3.900.000
											6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	75.000.000	73.760.250	98,35	1.239.750
											7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.851.975.000	1.808.968.000	97,68	43.007.000
											8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.646.606.420	1.618.009.200	98,26	28.597.220
											9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	230.000.000	227.572.680	98,94	2.427.320
											10	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	392.800.000	392.689.900	99,97	110.100
											11	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	55.000.000	54.720.000	99,49	280.000
											12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	160.000.000	160.000.000	100	-
											13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000	44.590.000	99,09	410.000
											14	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	150.000.000	149.020.000	99,35	980.000



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15.A TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011- 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15.A TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2.A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.A

Inspektorat Kabupaten Pacitan mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ; dan
 - b. Memantau kemajuan pencapaian kinerja kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Pada Lampiran I dihapus
 3. Pada Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 26 - 5 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Mei 2014**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 - 5 - 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA								
MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik								
TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2	3		4	5	6	7
1.	Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1.	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dibanding jumlah seluruh aparaturnya	2,64	6,75
		2.	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah	Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah SKPD yang mencapai target SPM dibanding jumlah seluruh SKPD yang menerapkan SPM x 100%	31,6	82
		3.	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	ada/baik	18,75	100

	1		2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP

MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	1.	Terwujudnya perilaku hidup sehat	a. Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah Penduduk yang menggunakan jamban dibandingkan jumlah seluruh penduduk x 100 %	76,93	90
				b. Prosentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat dibanding jumlah seluruh rumah tangga x 100 %	58,1	64
		2.	Terciptanya lingkungan sehat	a. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Jumlah lingkungan (Kelurahan/Desa) yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 %	38,68	41,58

MISI II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
		b. Skor Evaluasi Adipura	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	skor penilaian adipura	74,65	79
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan	angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.	70,88	72
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dibanding Jumlah Penduduk x 1000	0,37	0,44

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Mempermudah akses pendidikan	1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan			
				a. SD/MI		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman	0	100
				b. SMP/MTs		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman	0	100

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
	2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang di jalani, kelas yang di duduki dan pendidikan yang ditamatkan	6,9	7,08
2. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan	a. Angka melek huruf	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%	91,58	91,65
		b. Angka kelulusan:	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan			
		1) SD/MI		Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya x 100 %	99,98	100
		2) SMP/MTs		Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya x 100 %	99,35	99,93

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
		3) SMA/SMK/MA		Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya x 100 %	98,34	99,91

MISI IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah <i>cluster</i> ekonomi unggulan produktif	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	jumlah <i>cluster</i> ekonomi unggulan produktif di satu wilayah dalam tahun bersangkutan	1	3
	2. Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan	ketersediaan cadangan bahan pangan dalam satu tahun dibanding jumlah kebutuhan bahan pangan pada tahun yang bersangkutan x 100 %	0	65
	3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	a. Prosentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	Jumlah Koperasi aktif dibanding jumlah seluruh koperasi x 100%	84,18	90,74
b. Jumlah UMKM						

1		2	3	4	5	6	7	
		4	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	jumlah keseluruhan omset penjualan komoditas unggulan	556	610

MISI V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	a. % jalan dan jembatan dalam kondisi baik:	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan			
				1) jalan		Panjang jalan kondisi baik dibanding Panjang Jalan seluruhnya	49,58	54,5
				2) jembatan		Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibanding jumlah seluruh jembatan x 100%	89,84	92,3
				b. Jumlah Terminal Bus/sub terminal	Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Kabupaten Pacitan	Jumlah Terminal Bus/Sub terminal yang ada di Kabupaten Pacitan	6	6
			c. Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik	60,13	73,49	

1	2	3	4	5	6	7
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan	Jumlah swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibanding Total Program Pemberdayaan Masyarakat x 100%	16,56	18,77

MISI VI : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016
1		2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	a. Angka kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibanding jumlah penduduk x 10.000	2,3	1,5
				b. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Merupakan rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	72,07	73,41
		2.	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	a. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibanding jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100%	15	80

**Daftar Penghargaan (Hasil Capaian Kinerja)
Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015**

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
1	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)	BUPATI PACITAN	15 MEI 2015	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR	156/S-HP/XVIII-SBY/05/2015
2	JUARA HARAPAN 3 LOMBA VOLLY BALL PUTRI TINGKAT PROPINSI	TIM KABUPATEN PACITAN	01 JUNI 2015	DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM	002.6/3768/103.03/2015
3	JUARA HARAPAN 2 LOMBA CATUR (PA) TINGKAT PROPINSI	ALDHI ZENIOR LAKSONO (SDN ARJOWINANGUN)	01 JUNI 2015	DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM	002.6/3768/103.03/2015
4	PENYAJI TERBAIK NON PERINGKAT KREATIVITAS SENI TARI SMP TINGKAT PROPINSI	KEPALA SMP (SMPN 1 PUNUNG)	01 JUNI 2015	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3758/D3.3/DM/2015
5	ADIWIYATA MANDIRI, SMP NEGERI 1 PACITAN	SMP NEGERI 1 PACITAN	03 JUNI 2015	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NO. 62 TAHUN 2015
6	JUARA 3 LOMBA MERANCANG PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS KURIKULUM 2013 TINGKAT PROPINSI	SUSI NURHAYATI,S.PD.AUD (KB PERWARI KEL. PACITAN, KEC. PACITAN); RIA UNTARI (PAUD MUTIARA BUNDA KEL.PACITAN KEC. PACITAN)	04 JUNI 2015	DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM	002.6/3471/103.06/2015

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
7	JUARA 3 LOMBA MERANCANG PEMBELAJARAN PAUD BERBASIS KURIKULUM 2013 TINGKAT PROPINSI	SILA UTAMI (KB ASA BUNDA DESA MENADI KEC. PACITAN)	04 JUNI 2015	DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM	002.6/3471/103.06/2015
8	JUARA HARAPAN II LOMBA MEMBUAT GAMBAR DARI POLA DASAR (DALAM RANGKA HAN)	DIAN ROCHMANIAH, S.Pd (GURU TKN PEMBINA PACITAN)	05 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3500/103.03/2015
9	JUARA I DESAIN MOTIF BATIK SMP TINGKAT PROPINSI	LINA SASIH (SMPN 1 NGADIROJO)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
10	PENYAJI TERBAIK NON PERINGKAT KREATIVITAS SENI TARI SMP TINGKAT PROPINSI	EVI KUSUMAWATI; TRIAS FEBI UTAMI; FIRDA DWI RAHMAWATI; BAYU PERMATASARI (SMPN 1 PUNUNG)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
11	PENYAJI TERBAIK NON PERINGKAT KREATIVITAS SENI TARI SMP TINGKAT PROPINSI	CLARA DYASTUTI SUYATNO (SMPN 1 PUNUNG)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
12	JUARA 1 CIPTA PUISI SMP TINGKAT PROPINSI	NI' MAH MUSTIKA NINGRUM (SMPN 1 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
13	JUARA 2 CIPTA CERPEN SMP TINGKAT PROPINSI	SEKAR ARUM SRIGATI (SMPN 1 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
14	JUARA HARAPAN 2 BACA PUISI SMP TINGKAT PROPINSI	LINTANG LASHA FERAMARHEINSHA (SMPN 1 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
15	JUARA 2 KRIYA PUTRI SMA TINGKAT PROPINSI	NIKEN ANNAFI' KUSUMA (SMAN 1 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
16	JUARA 3(PERUNGGU) CATUR PUTRI SMP TINGKAT PROPINSI	FENTY TRYA KUSUMAWATI (SMPN 2 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
17	SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TINGKAT NASIONAL	KEPALA SMP (SMPN 1 PACITAN)	07 JUNI 2015	PRESIDEN RI	
18	JUARA 3 FILM PENDEK SMA TINGKAT PROPINSI	DHANAR HANDALAS DAROJAD (SMAN NAWANGAN); BIMA KRISDIANTO (SMAN NAWANGAN); SANDY DWI CAHYOKO (SMAN NAWANGAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
19	JUARA 2 (PERAK) CATUR PUTRI SMA TINGKAT PROPINSI	ADE AJENG TRIA ADILA (SMAN 2 PACITAN)	07 JUNI 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/3534/103.04/2015
20	LAYANAN "PREDATOR" PETUGAS REGISTRASI ARMADA MOTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PACITAN	DINAS DUKCAPIL	11 JUNI 2015	BUPATI PACITAN	002/271/408.22/2015
22	JUARA 1 LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT NASIONAL	AHMAT BASHORI (SMKN 1NAWANGAN); ROI CAHYO SAPUTRO (SMKN 1 PACITAN); ANNISA ZAHRA APRILLIA (SMKN 1 PACITAN)	13 JUNI 2015	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3758/D3.3/DM/2015

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
23	JUARA 2 LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT NASIONAL	ADITA EKA RAMA DIPUTRA (SMKN 1 PACITAN) YENI ASTUTI (SMKN 1 PACITAN)	13 JUNI 2015	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3758/D3.3/DM/2015
24	JUARA II LOMBA PENYULUHAN AKI DAN AKB DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR	TRININGSIH KADER PKK POKJA IV PUNUNG	27 JUNI 2015	TP-PKK PROV. JATIM	-
25	JUARA 1 PUSKESMAS BERPRESTASI KATEGORI PEDESAAN TINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015	PUSKESMAS NGADIROJO	29 JUNI 2015	GUBERNUR JAWA TIMUR	005/10511/101.4/2015
26	JUARA 2 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROPINSI TAHUN 2015 KATEGORI KESEHATAN MASYARAKAT (PENYULUH)	TAUFIK ISMAIL, SKM	30 JUNI 2015	GUBERNUR JAWA TIMUR	424/10613/101.5/2015
27	SATYALENCANA PEMBANGUNAN	BUPATI PACITAN	30 JULI 2015	BKKBN PUSAT JAKARTA	KEPPRES RI NO. 81/TK/TAHUN 2015
28	JUARA HARAPAN I LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA DALAM KEGIATAN FLS2N	PANDAN RADITYA ARUNDHATISATYA (SDN PACITAN)	05 AGUSTUS 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/4801/103.03/2015
29	JUARA I LOMBA KRPL TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR	KWT MELATI DESA HADILUWIH KECAMATAN NGADIROJO	07 AGUSTUS 2015	BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	501/287/209.02/2015 TANGGAL 7 AGUSTUS 2015
30	JUARA 1 O2SN (BOLA VOLI) TINGKAT NASIONAL	SRI KUNCORO (SMKN 2 PACITAN); FREDI ARIK ARDIANSYAH (SMKN 2 PACITAN); WAHYU WICAKSONO (SMKN 2 PACITAN)	07 AGUSTUS 2015	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3161/D/PD/2015

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
31	KOTA LAYAK ANAK PRATAMA	BUPATI PACITAN	11 AGUSTUS 2015	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA	
32	JUARA II LOMBA PHBS TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR	DESA GEMBONG KEC. ARJOSARI	11 AGUSTUS 2015	GUBERNUR JATIM	4197/TU.102/J.I/2015
33	PRIMA WANA MITRA	KTH WANA LESTARI	13 AGUSTUS 2015	KEMENTERIAN LHK	NO. PI.279/MENLHK – PHPL/2015
34	LOMBA WANA LESTARI	DS.KARANGANYAR ,KEC.KEBONAGUNG	13 AGUSTUS 2015	KEMENTERIAN LHK	SK.317/MENLHK – P2SDM/2015
35	JUARA 1 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015 KATEGORI NUTRISIONIS	RATNA DWI KARTIKA, S. GZ	13 AGUSTUS 2015	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	HK.02.02/MENKES/305/2015
36	LOMBA BBGRM	DESA PURWOREJO KEC. PACITAN	17 AGUSTUS 2015	BAPEMAS PROV. JAWA TIMUR	188/169/KPTS/013/2015
37	JUARA HARAPAN I LOMBA LUMBUNG TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR	KELOMPOK LUMBUNG SRI MULYO DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN	28 AGUSTUS 2015	BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	005/301/209.02/2015 TANGGAL 28 AGUSTUS 2015
38	JUARA 2 KARYA NYATA INSTRUKTUR OTOMOTIF RODA DUA DALAM RANGKA APRESIASI PENDIDIK KEPENDIDIKAN PAUDNI TINGKAT PROPINSI	YUDI HERMAWAN, ST (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS BANGSA, KEC. NAWANGAN)	29 AGUSTUS 2015	DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM	002.6/5336/103.06/2015
39	JUARA HARAPAN 3 PUTRI PEMILIHAN SISWA TELADAN TINGAKT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015	NABILA ADELIA PUTRI (SDN PACITAN)	04 SEPTEMBER 2015	DINAS PERNDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	002.6/5411/103.03/2015

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
40	JUARA 1 LOMBA BOLA VOLI PIALA GUBERNUR TINGKAT	SMKN 2 PACITAN	09 SEPTEMBER 2015	GUBERNUR JAWA TIMUR	002.6/5636/103.02/2015
41	INOVATOR TEKNOLOGI DI BIDANG AGRIBISNIS TINGKAT PROVINSI JAWATIMUR TAHUN 2015	SLAMET SUPRIYONO (DESA SIRNOBOYO KECAMATAN PACITAN)	12 OKTOBER 2015	GUBERNUR JAWA TIMUR	
42	JUARA I LOMBA KINERJA LPMD TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR	KETUA LPMD DESA COKRO KEMBANG	12 OKTOBER 2015	BAPEMAS PROV. JAWA TIMUR	188/626/KPTS/031/2015
43	KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015	DINAS DUKCAPIL	10 NOVEMBER 2015	GUBERNUR JAWA TIMUR	000.6/22545/041/2015
44	KABUPATEN SEHAT KATEGORI SWASTI SABA WISTARA	BUPATI PACITAN	25 NOVEMBER 2015	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	KEP.MENKES RI NOMOR : HK.02.02/MENKES/470/2015
45	JAURA I LOMBA KADARKUM TINGKAT BAKORWIL MADIUN	BUPATI PACITAN	02 DESEMBER 2015	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	SuRAT KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
46	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN ATAS UPAYA MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN KABUPATEN PACITAN MENJADI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2014.	BUPATI PACITAN	10 DESEMBER 2015	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.	PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PADA PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA DAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM TH. 2014.
47	JAURA 4 LOMBA KADARKUM TINGKATPROPINSI JAWA TIMUR	BUPATI PACITAN	17 DESEMBER 2015	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	Piala

NO.	NAMA PENGHARGAAN	DITERIMA OLEH	TANGGAL DITERIMA	INSTANSI PEMBERI	NOMOR SK
48	WAHANA TATA NUGRAHA KATEGORI LALU LINTAS	BUPATI PACITAN	23 DESEMBER 2015	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KP 402 TAHUN 2015 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015
49	PREDIKAT "B" ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014	SEKRETARIS DAERAH MEWAKILI BUPATI PACITAN	05 FEBRUARI 2016	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	B/585/D.I.PANRB/02/2016 TANGGAL 1 FEBRUARI 2016

Lampiran I
Rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Pacitan

Lampiran II

Rencana Kinerja Pemerintah

Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Lampiran III

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Lampiran IV
Pengukuran Kinerja
Tahun 2015

Lampiran V
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pacitan
Tahun 2011-2016

Lampiran VI

Daftar Penghargaan
(Hasil Capaian Kinerja)
Yang Diterima Oleh Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT**

Jl. A. Yani No. 65 A Pacitan, Kode Pos 63512

Telp. (0357) 881164 Fax. 884879

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pacitan, 24 Maret 2016

Inspektur Kabupaten Pacitan


Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks

Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 199003 2 005

LAPORAN HASIL REVIU

ATAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERTNTH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015



Nomor : 790/ 200 /408.48/2016
Tanggal : 24 Maret 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT

Jl. A. Yani No. 65 A Pacitan, Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881164 Fax. 884879

Pacitan, 24 Maret 2016

Nomor : 790/200 /408.48/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Laporan Hasil Reviu Atas
Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Pacitan Tahun Anggaran
2015**

Kepada,

Yth. **BUPATI PACITAN**

di
PACITAN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk tahun 2015.

Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan kinerja adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Reviu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu terutama mencakup penelusuran data/informasi, permintaan

penjelasan kepada pejabat penyusun pelaporan kinerja dan prosedur analitis yang diterapkan atas data kinerja.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor: 188/07/408.48/2016 Tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

3. Waktu Pelaksanaan

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi Pemerintah

sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan, dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Dari hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyusun Laporan Kinerja secara umum telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, namun demikian masih ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penyajian Data Umum

Laporan Kinerja sudah menyajikan data umum organisasi, namun belum menyajikan data penting tentang aspek strategis organisasi yang menjadi penekanan dan permasalahan yang dihadapi organisasi. Data ini telah tercantum dalam RPJM 2011-2016, pada bab IV Analisa Isu-Isu Strategis, yang menyebutkan antara lain :

- 1) Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Pacitan.
 - Rendahnya kualitas dan akses pendidikan
 - Kurangnya Sarana prasarana pelayanan medis
 - Banyaknya kondisi jalan yang rusak
 - Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan kesehatan lingkungan
 - Belum optimalnya peningkatan PAD

2) Isu Strategis Kabupaten Pacitan.

- Belum optimalnya pengelolaan SDA
- Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik.
- Optimalisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan
- Masih kurang memadainya kondisi infrastruktur
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih
- Terdapatnya kawasan rawan bencana alam.

Kondisi ini belum sesuai dengan Sistematika Laporan, Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Seharusnya dalam menyusun laporan kinerja menyajikan data umum organisasi, tentang aspek strategis organisasi yang menjadi penekanan dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

b. Upaya perbaikan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target belum dimuat

Berdasarkan Pengukuran kinerja tahun 2015, terdapat sasaran yang belum mencapai target antara lain:

- a) Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis, capaian 98,52%
- b) Tercapainya SPM daerah, capaian 94,01%
- c) Meningkatnya pelayanan kesehatan, capaian 98,26%

d) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, capaian 95,35%

Sesuai format, pada Bab IV dalam LKj perlu menyajikan langkah di masa mendatang tentang upaya perbaikan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target, namun dalam LKj Pemda belum menyajikan hal tersebut.

Seharusnya laporan Kinerja menyajikan langkah-langkah upaya perbaikan terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target.

c. Belum terdapat perbandingan dengan standar nasional

Capaian kinerja telah memuat perbandingan dengan data capaian kinerja tahun lalu, namun belum ada perbandingan dengan standar nasional yang ada dan informasi lainnya yang bermanfaat.

Dari 27 capaian kinerja hanya terdapat 1 (satu) capaian kinerja yang telah membandingkan dengan informasi yang bermanfaat lainnya yakni Penguatan cadangan pangan (%).

Seharusnya capaian kinerja dibandingkan dengan standar nasional yang ada dan informasi lainnya yang bermanfaat disamping tetap dilakukan perbandingan dengan capaian data kinerja tahun lalu.

d. Terdapat indikator yang belum cukup mengukur capaian sasaran

Indikator Kinerja Utama Opini Audit BPK : WTP (wajar tanpa pengecualian) telah memenuhi syarat SMART

tetapi belum cukup untuk mengukur capaian sasaran terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Seharusnya perlu ditambah indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, misalnya :

- Peningkatan Peringkat LAKIP
- Hasil evaluasi LPPD maupun EKPPD
- Penetapan APBD tepat waktu

Indikator Kinerja Utama Presentase koperasi aktif dan Indikator Kinerja Utama Jumlah UMKM secara umum telah memenuhi syarat SMART tetapi belum cukup untuk mengukur capaian atas sasaran lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing.

Seharusnya untuk mencapai sasaran lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing, ada indikator lain yang menunjukkan kriteria tertentu terhadap UMKM dan koperasi yang sehat dan berdaya saing tersebut.

e. Indikator kinerja belum disertai analisa perhitungan realisasi yang memadai

Indikator kinerja sasaran strategis secara umum telah selaras dan cukup namun masih terdapat pernyataan indikator kinerja yang belum terdapat analisa perolehan realisasi yang memadai yaitu antara lain:

Sasaran:

1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah.
2. Pemasaran komoditas daerah

Indikator Kinerja:

1. Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif.
2. Omzet Penjualan komoditas unggulan (Milyar)

Dalam hal penentuan capaian realisasi kinerja seharusnya disertai analisa perhitungan perolehan realisasi.

Demikian laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PACITAN**


Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 199003 2 005

KKR 1 : REVIU FORMAT LKJ

1	LKj sudah menyajikan :		
	- Uraian singkat organisasi;	1	
	- Rencana & target kinerja yg ditetapkan;	1	
	- Pengukuran kinerja;	1	
	- Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yang seharusnya terwujud	1	
2	LKJ telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahun yang bersangkutan	1	
3	- LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.	1	
4	- Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai (kriteria lihat tempelate).	1	
5	- menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	1	
6	Minimal telah menyajikan form Pengukuran Kinerja dan lainnya yang terkait	1	
7	Dalam Bab IV sudah diuraikan ringkasan tentang upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target	1	
8	LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	1	

2 : MEKANISME PENYUSUNAN

1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	LKj disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH	1	
2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing-masing SKPD pelaksana	1	
3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun	Adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	1	
4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ka.Sub.Bag.Perencanaan dan Evaluasi	1	
5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Lakukan uji petik ke SKPD untuk keandalan perhitungannya	1	
6	Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Tanggungjawab realisasi dalam target tapkin Kabupaten di masing-masing OPD	1	
7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dari dibawahnya	Data dikumpulkan di penanggungjawab kegiatan untuk dilaporkan ke Kab.Sub.Bag.Perencanaan dan evaluasi dan tertuang dalam SOP	1	

KKR 3 : Apakah tujuan / sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan / sasaram dalam perjanjian kinerja ?
 Apakah tujuan / sasaran dalam LKJ telah selaras dengan rencana strategis (RPJMD) ?

NO	SASARAN DALAM PK		LKJ VS PK		SASARAN DALAM LKJ		LKJ VS RPJMD		SASARAN DALAM RPJMD	
	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis		Y		Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis		Y		Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	
2	Tercapainya SPM daerah		Y		Tercapainya SPM daerah		Y		Tercapainya SPM daerah	
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima		Y		Terselenggaranya Pelayanan Prima		Y		Terselenggaranya Pelayanan Prima	
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)		Y		Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)		Y		Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	
5	Terwujudnya perilaku hidup sehat		Y		Terwujudnya perilaku hidup sehat		Y		Terwujudnya perilaku hidup sehat	
6	Terciptanya lingkungan sehat		Y		Terciptanya lingkungan sehat		Y		Terciptanya lingkungan sehat	
7	Meningkatnya pelayanan kesehatan		Y		Meningkatnya pelayanan kesehatan		Y		Meningkatnya pelayanan kesehatan	
8	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan		Y		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan		Y		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	
9	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan		Y		Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan		Y		Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	
10	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau		Y		Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau		Y		Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	
11	Meningkatnya pelayanan pendidikan		Y		Meningkatnya pelayanan pendidikan		Y		Meningkatnya pelayanan pendidikan	
12	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah		Y		Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah		Y		Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	
13	Ketersediaan pangan daerah		Y		Ketersediaan pangan daerah		Y		Ketersediaan pangan daerah	

14	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Y	14	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Y	14	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing
15	Pemasaran komoditas daerah	Y	15	Pemasaran komoditas daerah	Y	15	Pemasaran komoditas daerah
16	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	Y	16	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	Y	16	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian
17	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Y	17	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Y	17	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar
18	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Y	18	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Y	18	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai
19	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Y	19	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Y	19	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat
	JUMLAH	19		JUMLAH	19		

Apakah tujuan / sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja ?
 Apakah tujuan / sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama ?

NO	INDIKATOR KINERJA LKJ	LKJ VS IK		SASARAN DALAM LKJ		LKJ VS IKU		INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Y	T	Y	T	Y	T	
	MISI I							
1.1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	1		1		1		1.1 Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
2.1	Prosentase SPM yang mencapai target	1		2		1		1.2 Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	1		3		1		1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat
4.1	Opini audit BPK	1		4		1		1.4 Opini audit BPK : WTP
	MISI II							
1.1	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	1		1		1		a. Prosentase penduduk yang menggunakan
1.2	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	1				1		b. Prosentase rumah tangga yang berperilaku hidup sehat
2.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	1		2		1		a. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
2.2	Skor Evaluasi Adipura	1				1		b. Skor evaluasi Adipura
3.1	Angka Usia Harapan Hidup	1		3		1		Angka Usia harapan hidup
4.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pusbu per satuan penduduk (%)	1		4		1		Rasio puskesmas, poliklinik, pusbu per satuan penduduk
	MISI III							
1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	1		1		1		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
	SD/MI							
	SMP/MTs							
2.1	Angka rata-rata lama sekolah		1	2			1	Angka rata-rata lama sekolah
3.1	Angka Melek Huruf	1		3		1		a. angka melek huruf
3.2	Angka kelulusan	1				1		b. Angka kelulusan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)
	SD/MI							
	SMP/MTs							
	SMA/SMK/MA							

KKR 5.1 :

1 Apakah telah memuat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat ?

2 Apakah IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran ?

NO	APAKAH IK TELAH CUKUP UTK MENGUKUR SASARAN?		APAKAH IKU TELAH CUKUP UTK MENGUKUR SASARAN?		INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Y	T	Y	T	
1	1		1		Propertase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
2	1		1		Propertase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
3	1		1		Indeks Kepuasan Masyarakat
4	1		1		Opini audit BPK
5	1		1		Propertase penduduk yang menggunakan jamban
6	1		1		Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)
7	1		1		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
8	1		1		Skor Evaluasi Adipura
9	1		1		Angka Usia Harapan Hidup
10	1		1		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)
11	1		1		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
12	1		1		Angka rata-rata lama sekolah

13	Angka Melek Huruf	1						Angka melek huruf
14	Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMK/SMA/MA	1			Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	1		Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
15	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	1			Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah	1		Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif
16	Penguatan cadangan pangan (%)	1			Ketersediaan Pangan Daerah	1		Penguatan cadangan pangan
17	Prosentase Koperasi Aktif	1			Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing	1		Prosentase koperasi aktif
18	Jumlah UMKM	1				1		Jumlah UMKM
19	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	1			Pemasaran Komoditas Daerah	1		Omset penjualan komoditas unggulan (Milyar)
20	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1			Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian	1		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
21	Jumlah terminal bus/sub terminal	1				1		Jumlah terminal Bus / Sub terminal
22	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	1				1		Jumlah rumah tangga pengguna
23	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan	1		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
24	Angka Kriminalitas	1			Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan	1		Angka kriminalitas
25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1				1		Indek Pembangunan Manusia (IPM)
26	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1			Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat	1		Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
27	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	1				1		Prosentase kader bina ketahanan keluarga
		JUMLAH	27	0		JUMLAH	27	0

KKR 5.2

1 Apakah telah memuat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat ?

NO	INDIKATOR KINERJA	Apakah telah		Apakah telah		Apakah telah	
		Y	T	Y	T	Y	T
1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	1			1		1
2	Prosentase SPM yang mencapai target	1			1		1
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	1			1		1
4	Opini audit BPK	1			1		1
5	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	1			1		1
6	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	1			1		1
7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	1			1		1
8	Skor Evaluasi Adipura	1			1		1
9	Angka Usia Harapan Hidup	1			1		1
10	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	1			1		1
11	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	1			1		1
12	Angka rata-rata lama sekolah	1			1		1
13	Angka Melek Huruf	1			1		1
14	Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMK/SMA/MA	1			1		1
15	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	1			1		1
16	Penguatan cadangan pangan (%)	1			1	1	
17	Prosentase Koperasi Aktif	1			1		1
18	Jumlah UMKM	1			1		1
19	omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	1			1		1
20	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1			1		1
21	Jumlah terminal bus/sub terminal	1			1		1
22	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	1			1		1
23	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1			1		1
24	Angka Kriminalitas	1			1		1
25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1			1		1

26	Prosentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1			1		1
27	Prosentase kader bina ketahanan keluarga	1			1		1
	JUMLAH	27	0	0	27	1	26

KKR- 6 :

Mengukur apakah IKU dan IK telah SMART ?

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	spesifik	dpt diukur	realistis/relevan	INDIKATOR KINERJA	spesifik	dpt diukur	realistis
1	Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	ya	ya	ya	1 Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	ya	ya	ya
2	Prosentase SPM yang mencapai target	ya	ya	ya	2 Prosentase SPM yang mencapai target	ya	ya	ya
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	ya	ya	ya	Indeks Kepuasan Masyarakat	ya	ya	ya
4	Opini audit BPK	tidak	ya	tidak	Opini audit BPK	tidak	ya	tidak
1a	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	ya	ya	ya	Penduduk yang menggunakan jamban (%)	ya	ya	ya
1b	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	YA	ya	ya	Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	YA	ya	ya
2a	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	ya	ya	ya	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	ya	ya	ya
2b	Skor Evaluasi Adipura	ya	ya	ya	Skor Evaluasi Adipura	ya	ya	ya
1	Angka Usia Harapan Hidup	ya	ya	ya	Angka Usia Harapan Hidup	ya	ya	ya
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	ya	ya	ya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	ya	ya	ya
1a	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	ya	ya	ya	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	ya	ya	ya
1b	Angka rata-rata lama sekolah	ya	ya	ya	Angka rata-rata lama sekolah	ya	ya	ya
2	Angka Melek Huruf	ya	ya	ya	Angka Melek Huruf	ya	ya	ya
a	Angka kelulusan	ya	ya	ya	Angka kelulusan	ya	ya	ya
b	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	ya	ya	ya	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	ya	ya	ya
	Penguatan cadangan pangan (%)	ya	ya	ya	Penguatan cadangan pangan (%)	ya	ya	ya



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/585/D.I.PANRB/02/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Jakarta, 1 Februari 2016

Yth. Bupati Pacitan
di

Pacitan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Jawa Timur atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Pacitan mendapat nilai **60.48** atau dengan predikat penilaian "B". Hasil evaluasi secara rinci, dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD, rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan harus segera ditindak lanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,


Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Gubernur Jawa Timur.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Raya Juanda Telp. (031) 8540616 Ps. 106, 107, 201 Fax. (031) 8548153
SIDOARJO

Sidoarjo, 04 Februari 2016

Nomor : 700/169.12/201/2016
Sifat : Rahasia/Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pacitan

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai **60.48** atau predikat "**B**" (**Baik**), akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	19.99	30	21.93
b.	Pengukuran Kinerja	20	10.25	25	14.44
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.14	15	10.21
d.	Evaluasi Internal	10	5.59	10	1.17
e.	Capaian Kinerja	20	11.21	20	12.71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56.18	100	60.48
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B

Uraian.....

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan. Hal tersebut karena sudah terlihat upaya yang cukup serius, nyata, signifikan, dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja, terutama pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Kriteria penilaian yang ditetapkan saat ini, selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja dan mengacu pada praktik baik (*best practices*) yang berlaku di tempat lain, dengan tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku.
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), namun dari hasil evaluasi kami masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya spesifik, relevan, dan terukur. Kondisi tersebut mempengaruhi hasil pengukuran dan simpulan capaian kinerjanya;
 - b. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mempersyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya, namun lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pagu anggaran yang tersedia, dan kurang menekankan pada hasil atau *outcome*. Praktik seperti ini belum dapat sepenuhnya mendorong SKPD untuk mengutamakan kinerja atau menerapkan anggaran berbasis kinerja secara optimal;
 - c. Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani tetapi belum dimonitor dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pimpinan SKPD, dan penjenjangan kinerja (*cascading*) minimal sampai eselon IV belum terbentuk dengan baik;

d. Inspektorat....

- d. Inspektorat belum menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, namun sudah mulai melakukan evaluasi sebatas pelaksanaan program dan kinerja unit kerja, meskipun belum sepenuhnya dievaluasi secara rinci/mendalam. Hal tersebut mempengaruhi kualitas evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.
3. Terhadap permasalahan tersebut, kami rekomendasikan:
- a. Menyusun, mereviu dan menyempurnakan IKU setiap SKPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan pemilik IKU (SKPD) tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal;
 - b. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh SKPD mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh SKPD dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);
 - c. Kepada Sekretaris Daerah untuk memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat SKPD, eselon III, IV, sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;
 - d. Agar Inspektorat menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas dan memastikan tersedianya evaluator yang cukup terlatih untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasinya;
 - e. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Pacitan;
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sampai dengan saat ini.

Demikian.....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. NURWIYATNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580910 198303 1 016

Tembusan :

- Yth. 1. Bp. Menteri Pedayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi di Jakarta;
 2. Bp. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Bp. Gubernur Jawa Timur
(Sebagai Laporan).
-



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Telp (0357) 881002, 884738
PACITAN

Pacitan, 24 Maret 2016

Nomor : 065 ~~BBY~~ 408.22 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun 2014

Kepada:
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Berdasarkan surat Deputi Bidang reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/585/D.I.PANRB/02/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan surat Inspektur Propinsi Jawa Timur Nomor : 700/169.12/201/2016 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan AKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan tersebut serta menyusun langkah- langkah perbaikan dan penyempurnaan pada penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun tindak lanjut dari hasil rekomendasi tersebut antara lain:

1. Indikator Kinerja Utama

Secara garis besar, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melakukan reuiu dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan / RPJMD tahun 2011 – 2016 dan telah menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan reuiu terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 dan menetapkan kembali hasil reuiu tersebut melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Pacitan akan menyusun dan menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

sehingga momentum tersebut akan kami manfaatkan guna mereviu dan menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan

2. Pemanfaatan Dokumen IKU Dalam Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

sesuai dengan hasil rekomendasi bahwa dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pada penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Pacitan telah melaksanakan reviu dan verifikasi terhadap dokumen RKA tahun 2016 sebelum ditetapkan menjadi dokumen APBD 2016 dan DPA 2016. Hal ini dengan dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening dan pagu anggaran yang tersedia serta untuk memastikan bahwa dalam dokumen tersebut telah terdapat outcome dengan target yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hasil rekomendasi, Pemerintah Kabupaten Pacitan akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan dengan memonitor secara berkala (triwulan / semester) pencapaian perjanjian kinerja dimaksud, dan akan menindaklanjuti penyusunan perjanjian kinerja tersebut secara berjenjang (*cascading*) untuk seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan menyusun petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

4. Evaluasi Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah melaksanakan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengukur pencapaian kinerja / akuntabilitas kinerja SKPD. Sesuai dengan rekomendasi tim, Inspektorat Kabupaten Pacitan telah menyusun draft Peraturan Bupati Pacitan tentang Pedoman Evaluasi / Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

5. Evaluasi Kinerja

Untuk menjaga kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, Inspektorat Kabupaten Pacitan melalui Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) serta dibantu oleh Pejabat Auditor guna melaksanakan evaluasi LAKIP SKPD melaksanakan evaluasi secara komprehensif terhadap pencapaian kinerja atas satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

Demikian kami sampaikan langkah - langkah dan penyempurnaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan guna menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menerapkan dan meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Akhirnya atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

a.n. **PJ. BUPATI PACITAN**
Sekretaris Daerah

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

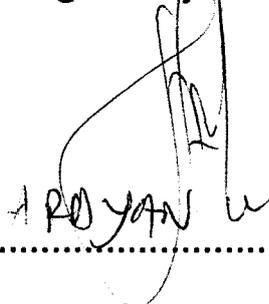
TANDA TERIMA

Telah Diterima Surat

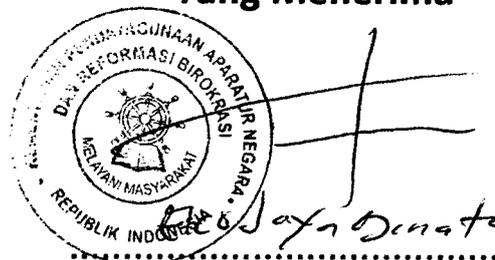
Dari : PJ. Bupati Pacitan
Kepada : Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
3. Gubernur Jawa Timur
Tanggal : 24 Maret 2016
Nomor : 065/332/408.22/2016
Tentang : 1. Pengiriman Dokumen LKj.IP Kab.
Pacitan Tahun 2015
2. Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016

Jakarta, 25 Maret 2016

Yang Menyerahkan


A. ROYAN

Yang Menerima


Syaiful Anwar

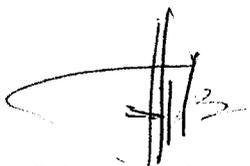
TANDA TERIMA

Telah Diterima Surat

Dari : PJ. Bupati Pacitan
Kepada : Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
3. Gubernur Jawa Timur
Tanggal : 24 Maret 2016
Nomor : 065/332/408.22/2016
Tentang : 1. Pengiriman Dokumen LKj.IP Kab.
Pacitan Tahun 2015
2. Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016

Jakarta, Maret 2016

Yang Menyerahkan



.....
RIRIN D.M.H.K.

Yang Menerima



.....

TANDA TERIMA

Telah Diterima Surat

Dari : PJ. Bupati Pacitan
Kepada : Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
3. Gubernur Jawa Timur
Tanggal : 24 Maret 2016
Nomor : 065/ 332/408.22/2016
Tentang : 1. Pengiriman Dokumen LKj.IP Kab.
Pacitan Tahun 2015
2. Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016

Surabaya, 28 Maret 2016

Yang Menyerahkan



SITI Kusarini

Yang Menerima

